

2024

LAPORAN KINERJA

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dalam amanah pelaksanaan kinerja pembangunan kepariwisataan ekonomi kreatif nasional sesuai tugas dan fungsi yang diemban, serta sebagai upaya akuntabilitas untuk mewujudkan *good governance* di Indonesia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari kerja sama dan dukungan dari seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, serta seluruh pihak terkait baik pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, masyarakat/komunitas maupun media.

Semoga Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan dasar pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang lebih baik untuk pengembangan destinasi pariwisata dan infrastruktur ekonomi kreatif di masa mendatang.

Jakarta, 28 Februari 2025
Deputy Bidang Pengembangan
Destinasi dan Infrastruktur,



Hariyanto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Arah kebijakan dan strategi Kemenparekraf/Baparekraf memaparkan upaya untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional, yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024, yaitu mewujudkan destinasi pariwisata berdaya saing dan infrastruktur ekonomi kreatif yang memadai.

Pencapaian ini tercermin dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terus berkembang ditengah dinamika global. Setelah beradaptasi dan berinovasi pasca pandemi Covid-19, sektor ini tidak hanya mampu bertahan tetapi juga terus maju menuju masa depan Indonesia yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Keberhasilan ini sejalan dengan proyeksi yang disampaikan dalam *Outlook* Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024/2025, dimana para ahli, yang terdiri dari kalangan industri, akademisi dan pemerintah, berpendapat bahwa industri pariwisata Indonesia akan pulih dan berkembang baik dalam beberapa tahun mendatang. Sebanyak 30,23% ahli percaya bahwa pariwisata Indonesia akan kembali normal pada tahun 2025, menunjukkan optimisme tentang masa depan sektor ini.

Peningkatan optimisme terhadap sektor ini didorong oleh beberapa faktor kunci yang diperkirakan akan mendorong pertumbuhannya, antara lain (1) Aksesibilitas yang didukung harga penerbangan terjangkau dan infrastruktur yang lebih baik, (2) Kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal, dan (3) Pembangunan destinasi wisata dan bisnis pariwisata yang berkelanjutan.

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2024, target capaian 5 (lima) indikator kinerja, yaitu: rasio pemenuhan infrastruktur ekonomi kreatif terhadap kebutuhan infrastruktur ekonomi kreatif sebesar 85%, jumlah destinasi pariwisata berdasarkan prioritas yang dikembangkan sebanyak 19 lokasi, jumlah destinasi pariwisata yang menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan sebanyak 19 lokasi, lama tinggal (*length of stay*) wisman di destinasi dengan target 3-5 hari, serta pemenuhan tingkat kepuasan Satker terhadap layanan internal Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Selain itu, total realisasi anggaran Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur pada Tahun Anggaran 2024 adalah Rp 186.181.135.434,- atau 99,65%.

Berdasarkan evaluasi kinerja 2024, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas perencanaan program dan penganggaran, memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor, meningkatkan implementasi *monitoring* dan evaluasi terpadu serta mendorong penciptaan inovasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. <i>Latar Belakang</i>	1
1.2. <i>Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur</i>	3
1.3. <i>Mandat dan Peran Strategis Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur</i>	5
1.4. <i>Sistematika Pelaporan</i>	13
BAB II PERENCANAAN	16
2.1 <i>Rencana Strategis Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2020-2024</i>	16
2.2 <i>Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2024</i>	25
2.3 <i>Rencana Kerja dan Anggaran Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024</i>	27
2.3.1 <i>Proses Penyusunan Rencana Kerja</i>	27
2.3.2 <i>Rencana Kerja dan Anggaran</i>	28
2.3.3 <i>Perjalanan Pagu Anggaran</i>	29
2.4 <i>Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur</i>	31
BAB III AKUNTABILITAS	33
3.1. <i>Capaian Kinerja Tahun 2024</i>	33
3.1.1 <i>Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif</i>	37
3.1.2 <i>Tersedianya Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas yang Dikembangkan</i>	49
3.1.3 <i>Tersedianya Destinasi Pariwisata yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan</i>	101
3.1.4 <i>Meningkatnya Lama Tinggal (Length of Stay) Wisatawan Mancanegara di Destinasi ...</i>	156
3.1.5 <i>Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Internal Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024</i>	163
3.2. <i>Realisasi Anggaran 2024</i>	170

3.3.	<i>Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</i>	171
3.4.	<i>Kinerja Lain-Lain T.A. 2024</i>	171
3.4.1	Dana Alokasi Khusus (DAK)	171
3.4.3	Pengarusutamaan Gender (PUG)	201
3.4.4	Program Pemberdayaan Ekonomi dalam Rangka Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024	207
3.4.5	Sustainable Development Goals (SDGs)	210
3.5.	<i>Evaluasi Internal</i>	216
BAB IV PENUTUP		218
4.1	<i>Kesimpulan</i>	218
4.2	<i>Rekomendasi/Langkah-Langkah Perbaikan</i>	219
LAMPIRAN		221

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	4
Gambar 2. Agenda Pembangunan 1	7
Gambar 3. Sasaran Strategis (SS) Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024	8
Gambar 4. Peta Sasaran Program Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur 2020-2024	10
Gambar 5. Peta Sasaran Kegiatan Badan Pelaksana Otorita Pariwisata 2020-2024	13
Gambar 6. Persebaran 19 Destinasi Pariwisata dalam RPJMN 2020-2024	27
Gambar 7. Gambar Rencana Gedung UPT BPU-Ekraf di Kota Tanjungpinang	41
Gambar 8. Kabupaten Bone Bolango	43
Gambar 9. Kabupaten Cirebon	43
Gambar 10. Kota Depok	43
Gambar 11. Kabupaten Bantul	43
Gambar 12. Kota Bitung	43
Gambar 13. Kabupaten Kuningan	43
Gambar 14. Kabupaten Majalengka	43
Gambar 15. Kabupaten Subang	43
Gambar 16. Kabupaten Ponorogo	44
Gambar 17. Kota Surakarta	44
Gambar 18. Kegiatan Penyusunan Masterplan Cemara Siu	52
Gambar 20. Kegiatan Penyusunan Masterplan Air Terjun Tekaian Telu	53
Gambar 21. Kegiatan Penyusunan Masterplan Pulau Dodola	53
Gambar 22. Kegiatan Penyusunan Masterplan Pulau Kumala	54
Gambar 23. Bimtek Pengelolaan Wisata Ramah Muslim di Destinasi Pariwisata Prov. Sumsel	57
Gambar 24. Bimtek Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Bagi Pengelola Destinasi Pariwisata di Prov. Kepri	58
Gambar 25. Koordinasi Pengembangan Destinasi di Kota Batam, TWA Muka Kuning Kota Batam dan Pulau Sugi dskt	58
Gambar 26. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Homestay di Kab. Merangin, Prov. Jambi	59
Gambar 27. Bimbingan Teknis Penguatan Jejaring dan Tata Kelola Destinasi Pariwisata di DPSP Labuan Bajo dan Sekitarnya	61
Gambar 28. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Desa Wisata dan Toilet Bersih di Kota Samarinda	62
Gambar 29. Bimbingan Teknis Peningkatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata di Kawasan Raja Ampat	63
Gambar 30. Forum Penguatan Jejaring Pengelolaan Desa Wisata di Kab. Merauke, Prov. Papua Selatan	64
Gambar 31. Forum Penguatan Jejaring Pengelolaan Desa Wisata Wilayah Perbatasan Negara di Prov. Kalimantan Barat	64
Gambar 32. Penguatan Jejaring Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Digital di Bali	65
Gambar 33. Menu Pengajuan Dukungan Sarana Pariwisata	111
Gambar 34. Pelaksanaan Sosialisasi Tugas Pembantuan Pengembangan Tata Kelola Destinasi	120
Gambar 35. Revalidasi Batur UGGp	123
Gambar 36. Revalidasi Belitung UGGp	123
Gambar 37. Validasi Kebumen UGGp	125
Gambar 38. Validasi Meratus UGGp	126
Gambar 39. Alur Pelaksanaan DAK Bidang Pariwisata	175

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data SDM di Lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	5
Tabel 2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur 2020-2021	18
Tabel 3. Perubahan Target pada Indikator Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur 2020-2024	20
Tabel 4. Manual IKU Rasio Pemenuhan Infrastruktur Ekonomi Kreatif Terhadap Kebutuhan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	21
Tabel 5. Manual IKU Tersedianya destinasi pariwisata berdasarkan prioritas yang dikembangkan	22
Tabel 6. 8 Destinasi dalam Wilayah Kerja Pengembangan Destinasi I	22
Tabel 7. 11 Destinasi dalam Wilayah Kerja Pengembangan Destinasi II	23
Tabel 8. Manual IKU Jumlah destinasi pariwisata yang menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan	23
Tabel 9. Manual IKU Lama tinggal (Length of Stay) Wisatawan Mancanegara di Destinasi	24
Tabel 10. Major Project dalam RPJMN 2020-2024 yang dilaksanakan Kemenparekraf/Baparekraf	25
Tabel 11. Rincian Major Project 1 dalam RPJMN 2020-2024	26
Tabel 12. Rincian Major Project 2 dalam RPJMN 2020-2024	26
Tabel 13. Rencana Kerja dan Anggaran T.A. 2024 Deputy Bidang Pengembangan	29
Tabel 14. Revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2024	30
Tabel 15. Perbandingan Anggaran Renja dan Revisi DIPA ke-12	31
Tabel 16. Capaian Sasaran Program "Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif" Tahun 2020-2023	33
Tabel 17. Capaian Sasaran Program "Tersedianya Destinasi Pariwisata Berdasarkan yang Siap Dipasarkan"	34
Tabel 18. Capaian Sasaran Program "Tersedianya Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas yang"	34
Tabel 19. Capaian Sasaran Program "Tersedianya Destinasi Pariwisata yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan" Tahun 2020	34
Tabel 20. Capaian Sasaran Program "Tersedianya Destinasi Pariwisata yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan" Tahun 2021-2023	34
Tabel 21. Capaian Sasaran Program "Lama Tinggal (Length of Stay) Wisman di Destinasi" Tahun 2020-2023	35
Tabel 22. Capaian Sasaran Program "Meningkatnya Kepuasan Satker Terhadap Layanan Internal Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur" Tahun 2021-2024	35
Tabel 23. Data Capaian Sasaran Program Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2020-2024	36
Tabel 24. Realisasi Sasaran Program "Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif"	37
Tabel 25. Penerima Fasilitas Infrastruktur Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2023 di 19 Destinasi	48
Tabel 26. Realisasi Sasaran Program "Tersedianya Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas yang Dikembangkan"	49
Tabel 27. Program di 8 Destinasi pada Wilayah Pengembangan Destinasi I Tahun 2024	72
Tabel 28. Program di 11 Destinasi pada Wilayah Pengembangan Destinasi II Tahun 2024	76
Tabel 29. Daftar Kegiatan Tahun 2020-2023 untuk 19 Destinasi Prioritas yang Dikembangkan	100
Tabel 30. Realisasi Sasaran Program "Tersedianya Destinasi Pariwisata yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan"	101
Tabel 31. Daftar Kegiatan di 19 Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan	105
Tabel 32. 50 Desa Wisata terbaik ADWI 2024	109
Tabel 33. 19 Lokasi yang Memengaruhi Capaian IKU Berdasarkan 50 Desa Wisata ADWI 2024	112

Tabel 34. Desa Wisata yang Difasilitasi Proses Sertifikasi Berkelanjutan	114
Tabel 35. Tugas dan Fungsi dari Komisi Nasional Geopark Indonesia (KNGI)	121
Tabel 36. Daftar Kegiatan Tahun 2020-2023 untuk 19 Destinasi Prioritas yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan	155
Tabel 37. Realisasi Sasaran Program "Lama Tinggal (Length of Stay) Wisatawan Mancanegara di Destinasi"	158
Tabel 38. Capaian Rata-Rata Lama Tinggal Wisman Tahun 2024	160
Tabel 39. Realisasi Capaian Sasaran Program "Meningkatnya Kepuasan Satker Terhadap Layanan Internal Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur"	163
Tabel 40. Daftar Kegiatan Pelayanan Perencanaan dan Pemantauan di Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024	164
Tabel 41. Daftar Kegiatan Keuangan di Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024	166
Tabel 42. Daftar Kegiatan Hukum di Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024	168
Tabel 43. Daftar Kegiatan Tata Usaha dan Rumah Tangga di Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024	169
Tabel 44. Rincian Realisasi Anggaran Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	171
Tabel 45. Menu DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2024	175
Tabel 46. Penerima DAK Fisik Bidang Pariwisata T.A. 2024	179
Tabel 47. Penerima DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2020-2023	192
Tabel 48. Total Penerimaan DAK T.A. 2020-2024 di Setiap Lokpri	200
Tabel 49. Daftar Kegiatan Pada Tujuan 5 SDG's di Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024	211
Tabel 50. Daftar Kegiatan Pada Tujuan 8 SDG's di Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024	212
Tabel 51. Daftar Kegiatan Pada Tujuan 10 SDG's di Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024	214
Tabel 52. Daftar Kegiatan Pada Tujuan 11 SDG's di Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024	215
Tabel 53. Daftar Kegiatan Pada Tujuan 12 SDG's di Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024	215
Tabel 54. Realisasi Capaian Kinerja Berdasarkan PK Tahun 2024	218



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2024 adalah tahun kedua setelah pemberhentian PPKM Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia, yang membuka lebar kesempatan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia untuk bangkit dan melanjutkan tren sebelumnya yang terhenti oleh pandemi Covid-19. Keadaan ini juga menjadi salah satu faktor yang membantu mewujudkan rencana kepariwisataan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 yang berakhir di tahun 2024.

Pada tahun 2023, pariwisata dunia telah mencapai 90% tingkat pemulihan dari kondisi sebelum pandemi. Di Indonesia, kunjungan wisman sebanyak 9,49 juta orang pada tahun 2023 telah melampaui target 8,5 juta orang. Hal tersebut berdampak baik pada penghasilan Devisa senilai 16,91 miliar USD atau mencapai 82,79% dari capaian tahun 2019. Melihat data wisatawan nusantara, 825,80 juta perjalanan di tahun 2023 menjadi capaian yang sangat baik, bahkan melebihi tahun 2019 yang berada di angka 722,16 juta perjalanan. Rata-rata pengeluaran yang mencapai 2,57 juta Rupiah juga sudah melebihi rata-rata di tahun 2019 senilai 1,5 juta Rupiah. Data pada tahun 2023 tersebut memberikan harapan yang cukup besar untuk pariwisata Indonesia di tahun 2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2024 mencapai 13,9 juta kunjungan atau tumbuh 19,05% dibandingkan tahun sebelumnya. pada kuartal keempat 2024, Dimana pada kuartal keempat 2024, tercatat 3,53 juta kunjungan wisman ke Indonesia, meningkat 15,6% dari 3,05 juta pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan tren positif dan semakin memperkuat sektor pariwisata di masa mendatang.

Di sisi lain, pergerakan wisatawan nusantara juga mengalami lonjakan yang signifikan. Pada kuartal keempat 2024, BPS mencatat 263,13 juta perjalanan wisnus, meningkat 23,2% dibandingkan periode yang sama di 2023. Sepanjang tahun, total perjalanan wisnus mencapai 1,02 miliar, naik 21,7% dari 839,67 juta di tahun sebelumnya.

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun internasional, memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Sektor pariwisata diperkirakan menyumbang devisa sebesar 16,7 miliar dolar AS, tumbuh 19,3% dibandingkan 2023. Selain itu, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional pada 2024 diestimasikan mencapai 4,01-4,5%.

Pencapaian kebangkitan pariwisata nasional tersebut, tidak lepas dari kerja keras seluruh pemangku kepentingan pariwisata di seluruh Indonesia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) melakukan pemulihan pembangunan pariwisata pasca Covid-19 dengan pendekatan “*New Normal – New Tourism*” melalui beberapa aspek yang menjadi tren pariwisata dan adaptasi kebiasaan baru:

1. *Health, Hygiene Sanitation Sensitive, safe, and New Protocol*
2. *Staycation, Hommy, Interactive Relationship, and Activities*
3. Destinasi jarak pendek atau dekat, *Domestic Travel*
4. *Sustainable and Responsible Tourism*
5. *Reliance and Local Knowledge Experience, Local Wisdom and Past Literacy*
6. *Authentic Value Creation Product Development*
7. *Digital Ecosystem*
8. *Non-Personal Services Deliverables and Distancing*
9. *Niche Market, Voluntourism, Education, Philanthropy, Eco-Nature Seekers, Healing, Ecotourism*

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur selama tahun 2024 telah menjalankan kebijakan, program serta kegiatan yang mendorong terciptanya destinasi pariwisata Indonesia yang lebih baik melalui pengembangan destinasi dan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan serta ketersediaan infrastruktur ekonomi kreatif. Demi terwujudnya pemerintahan yang baik, terpercaya dan akuntabel, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dalam bentuk penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program serta kegiatan yang kemudian dituangkan dalam sebuah laporan akuntabilitas kinerja yang kami sebut sebagai Laporan Kinerja atau LAKIN Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur tahun 2024.

Realisasi kinerja dan anggaran Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan sasaran strategis dalam

Rencana Strategis Perubahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 yang kemudian ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pada bulan Januari 2024. Terdapat lima Indikator Kinerja yang menjadi perjanjian antara Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu:

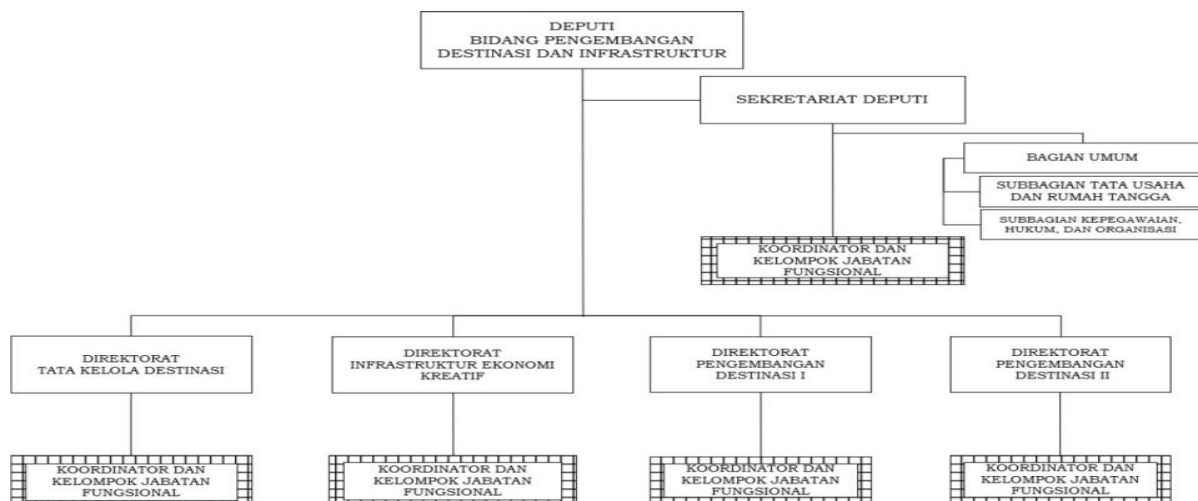
1. Rasio pemenuhan infrastruktur ekonomi kreatif terhadap kebutuhan Infrastruktur ekonomi kreatif
2. Jumlah destinasi pariwisata yang menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan
3. Jumlah destinasi pariwisata berdasarkan prioritas yang dikembangkan
4. lama tinggal (*length of stay*) wisman di destinasi
5. Tingkat Kepuasan Satker Terhadap Layanan Internal Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.

LAKIN Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur tahun 2024 ini adalah sebuah dokumen yang akan menjelaskan secara lebih detail capaian atas lima Indikator Kinerja tersebut dan juga tantangan serta hambatan yang dilalui.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

Dalam menjalankan program dan kegiatan untuk menyelesaikan Target Indikator Kinerja, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur bersinergi dengan 5 unit kerja eselon 2, yaitu:

1. Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
2. Direktorat Pengembangan Tata Kelola Destinasi
3. Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif
4. Direktorat Pengembangan Destinasi I
5. Direktorat Pengembangan Destinasi II



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permenparekraf) No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur merupakan unsur pelaksana yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas (Pasal 71):

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan destinasi dan infrastruktur di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

2. Fungsi (Pasal 72):

- A. Perumusan kebijakan teknis pengembangan destinasi dan infrastruktur di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- B. Pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan destinasi dan infrastruktur di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- C. Penyusunan norma destinasi standar, prosedur, dan kriteria pengembangan dan infrastruktur di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- D. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan destinasi dan infrastruktur di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- E. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pengembangan destinasi dan infrastruktur di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- F. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/ Kepala.

Berdasarkan Peraturan tersebut, Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur melalui Direktorat Tata Kelola Destinasi mendapatkan mandat untuk melakukan perintisan dan pembinaan Badan Pelaksana Otorita Pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sampai dengan tahun 2024, telah ditetapkan tiga Badan Pelaksana Otorita Pariwisata berdasarkan Peraturan Presiden berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba
2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo-Flores

Dalam upaya mengembangkan pariwisata Indonesia melalui pemenuhan target Indikator Kinerja Utama, Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur telah menyusun kebutuhan jabatan dan kemampuan untuk kemudian dipercayakan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten agar arus kebijakan yang sudah ditetapkan dapat terimplementasi secara baik.

Berdasarkan data pegawai yang terdaftar di sistem kepegawaian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berikut adalah statistik SDM pada Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur:

Unit Kerja	JPT	Jabatan Administrator		Jabatan Fungsional (PNS + PPPK)					PNS Pelaksana	PTT	TA	KI	Total ASN	Total SDM
		Es III	Es IV	Utama	Madya	Muda	Pratama	Terampil						
Deputi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Dit. TKD	1	-	-	-	2	8	8	-	10	6	-	12	29	47
Dit. IEK	1	-	-	-	5	2	8	-	15	7	-	9	31	47
Dit. PD I	1	-	-	-	7	6	5	-	13	7	-	-	32	39
Dit. PD II	1	-	-	-	3	8	7	-	12	5	-	2	31	38
Setdep	1	1	1	1	1	1	7	4	17	12	1	9	34	56
Total	6	1	1	1	18	25	35	4	67	37	1	32	158	228

Tabel 1. Data SDM di Lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

1.3. Mandat dan Peran Strategis Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

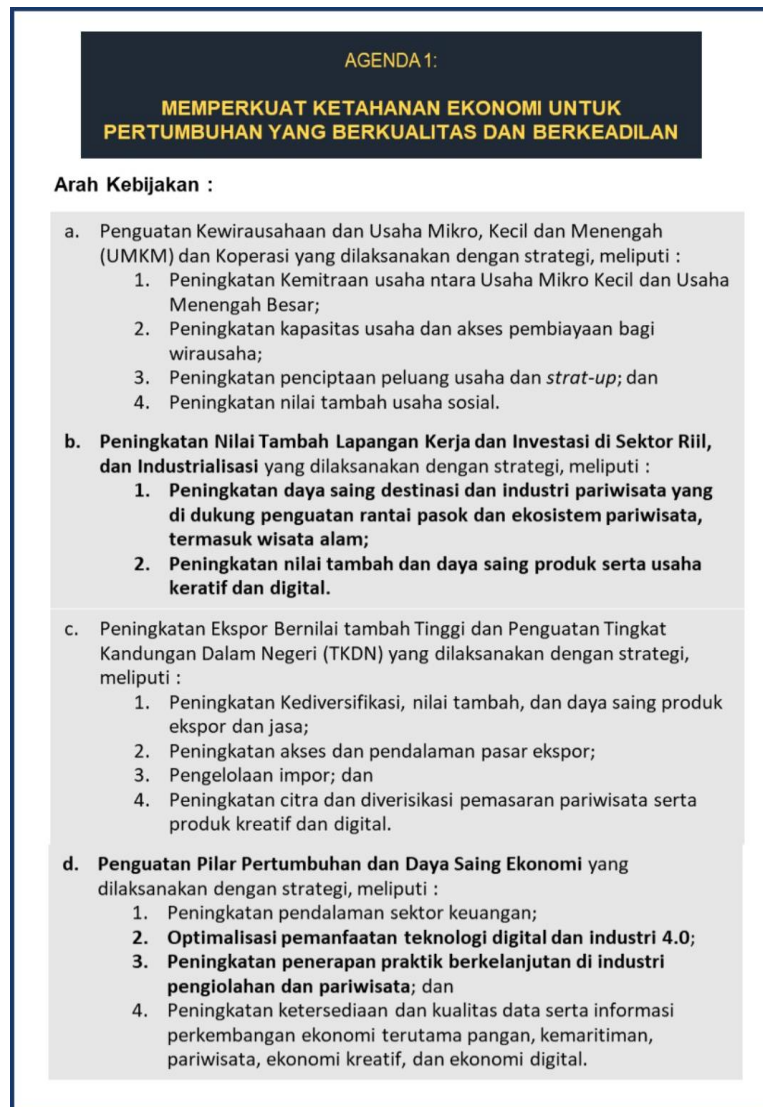
RPJMN tahun 2020-2024 telah mencapai masa berakhir di tahun 2024 ini. Sejak tahun 2020 tema pembangunan yang diusung adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang diterjemahkan dalam 7 agenda pembangunan atau

Prioritas Nasional yang mencakup Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Kemenparekraf/Baparekraf secara umum dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur secara khusus, mendukung tercapainya sasaran target yang ditetapkan pada **Agenda Pembangunan 1**, pada arah kebijakan:

- Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang dilaksanakan melalui strategi:
 1. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata termasuk wisata alam
 2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk serta usaha kreatif dan digital
- Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang dilaksanakan melalui strategi:
 1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0
 2. Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata.



Sumber : Permen Pariwisata & Ekonomi Kreatif No 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata & Ekonomi Kreatif, 2022.

Gambar 2. Agenda Pembangunan 1

Demi tercapainya percepatan pencapaian target pembangunan dan memberikan akses pembangunan yang merata dan adil, RPJMN 2020-2024 juga telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif serta katalis pembangunan, yaitu:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
2. Pengarusutamaan Gender (PUG)
3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya
4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Sasaran Strategis Kemenparekraf/Baparekraf yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan 2020-2024 menjadi dasar bagi

perencanaan kinerja seluruh satuan kerja di Kemenparekraf/Baparekraf. Dengan 8 Sasaran Strategis (SS) yang dipetakan ke dalam 4 perspektif *Balance Score Card* (BSC), maka terbentuklah Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai indikator pengukuran. Setiap Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya akan melakukan penjabaran secara langsung untuk menentukan Sasaran Program (SP) yang diproyeksikan dapat berdampak pada SS. Demi tercapainya SS Kemenparekraf/Baparekraf, maka SP tersebut juga dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) sebagai indikator pengukuran.



Gambar 3. Sasaran Strategis (SS) Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024

Perspektif *Balance Score Card* (BSC) yang digunakan pada SS merupakan representasi *output* dan *outcome* yang ingin dicapai oleh Kemenparekraf/Baparekraf dengan mayoritas berada di perspektif *Customer* dengan 5 SS dan 3 perspektif lain secara seimbang memiliki 1 SS, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perspektif *Stakeholder*

Memiliki SS 1, “Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi” yang dikur oleh 3 IKSS. Perspektif ini ditujukan pada kebutuhan *Stakeholder* Kemenparekraf/Baparekraf.

2. Perspektif *Customer*

Perspektif ini ditujukan pada *customer* dari kinerja Kemenparekraf/Baparekraf, dengan 5 Sasaran Strategis:

- SS 2. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional
- SS 3. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan

- SS 4. Meningkatnya indeks pembangunan kepariwisataan Indonesia
- SS 5. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
- SS 6. Terwujudnya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual produk kreatif

Dengan total 9 IKSS sebagai indikator pengukuran.

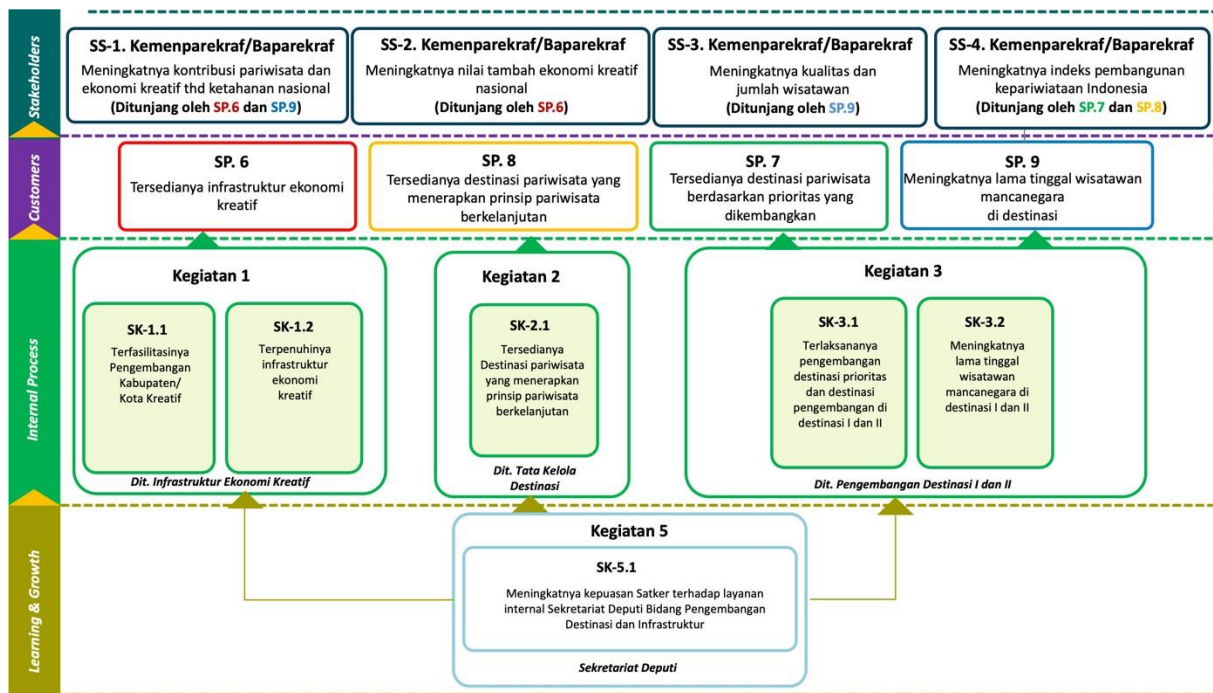
3. Perspektif Internal Proses

Memiliki SS 7, “Meningkatnya kapabilitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif” yang diukur oleh 3 IKSS. Perspektif ini ditujukan kepada internal Kemenparekraf/Baparekraf dengan tujuan utamanya adalah dapat menciptakan kinerja yang prima sehingga dapat memenuhi SS pada perspektif *customer*.

4. Perspektif *Learn & Growth*

Memiliki SS 8, “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih” yang diukur dengan 1 IKSS. Perspektif ini ditujukan kepada internal Kemenparekraf/Baparekraf untuk menciptakan kinerja prima yang berkelanjutan.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur melakukan penjabaran dari SS Kemenparekraf/Baparekraf ke dalam 4 Sasaran Program (SP) dengan total 4 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) untuk selanjutnya dijabarkan kembali ke dalam 4 Sasaran Kegiatan (SK) dengan 6 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK).



Gambar 4. Peta Sasaran Program Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur 2020-2024

Gambar di atas menjelaskan skema seluruh SK dan SP di Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dalam memberikan pengaruh pada SS Kemenparekraf/Baparekraf. Seluruh SK dijalankan oleh 5 JPT Pratama yang ada di Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur:

1. Direktorat Tata Kelola Destinasi
 - SK 2.1: Tersedianya destinasi pariwisata yang menerapkan pariwisata berkelanjutan
2. Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif
 - SK 1.1: Terfasilitasinya Pengembangan Kab/Kota Kreatif
 - SK 1.2: Terpenuhinya Infrastruktur Ekonomi Kreatif
3. Direktorat Pengembangan Destinasi I
 - SK 3.1: Terlaksananya pengembangan destinasi prioritas dan destinasi pengembangan di destinasi I dan II
 - SK 3.2: Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara di Destinasi I dan II
4. Direktorat Pengembangan Destinasi II
 - SK 3.1: Terlaksananya pengembangan destinasi prioritas dan destinasi pengembangan di destinasi I dan II
 - SK 3.2: Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara di Destinasi I dan II
5. Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Destinasi

- SK 5.1: Meningkatnya Kepuasan Satker Terhadap Layanan Internal Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

Dan berikut adalah penjelasan skema relasi antara SK-SP-SS di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur:

SS 1: Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan nasional

SS ini memiliki total 3 IKSS yang dipengaruhi oleh Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur:

- IKSS 1: Nilai devisa pariwisata
- IKSS 2: Kontribusi PDB pariwisata
- IKSS 3: Nilai ekspor produk ekonomi kreatif

Pengaruh terhadap 3 IKSS tersebut diawali dari:

- SK 1.1: Terasilitasinya Pengembangan Kab/Kota Kreatif,
- SK 1.2: Terpenuhinya Infrastruktur Ekonomi Kreatif,
- SK 3.2: Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara di Destinasi I dan II.

SK 1.1 dan SK 1.2 berkontribusi pada SP 6 “Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif” untuk kemudian berpengaruh secara tidak langsung pada IKSS 3. Kemudian, SK 3.2 berkontribusi langsung pada SP 9 “Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara di Destinasi” untuk kemudian berpengaruh secara tidak langsung pada IKSS 1 dan IKSS 2.

SS 2: Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Nasional

SS ini memiliki 1 IKSS yang dipengaruhi oleh Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur:

- IKSS 4: Nilai tambah ekonomi kreatif

Dampak terhadap IKSS 4 diawali dari:

- SK 1.1: Terasilitasinya Pengembangan Kab/Kota Kreatif,
- SK 1.2: Terpenuhinya Infrastruktur Ekonomi Kreatif.

Dua SK tersebut berkontribusi terhadap SP 6 “Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif” yang juga berdampak secara tidak langsung terhadap SS 2 pada IKSS 4.

SS 3: Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan

SS ini memiliki 1 IKSS yang dipengaruhi oleh Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur:

- IKSS 6 CT Rata-Rata *spending* wisatawan mancanegara

Dampak terhadap IKSS 6 diawali dari:

- SK 3.2: Meningkatnya Lama Tinggal (*Length of Stay*) Wisatawan Mancanegara di Destinasi I dan II.

SK 3.2 berkontribusi terhadap SP 9 “Meningkatnya Lama Tinggal (*Length of Stay*) Wisatawan Mancanegara di Destinasi, yang berdampak secara tidak langsung terhadap SS 3, pada IKSS 6.

SS 4: Meningkatnya Indeks Pembangunan Kepariwisata Indonesia

SS ini memiliki 1 IKSS yang dipengaruhi oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur:

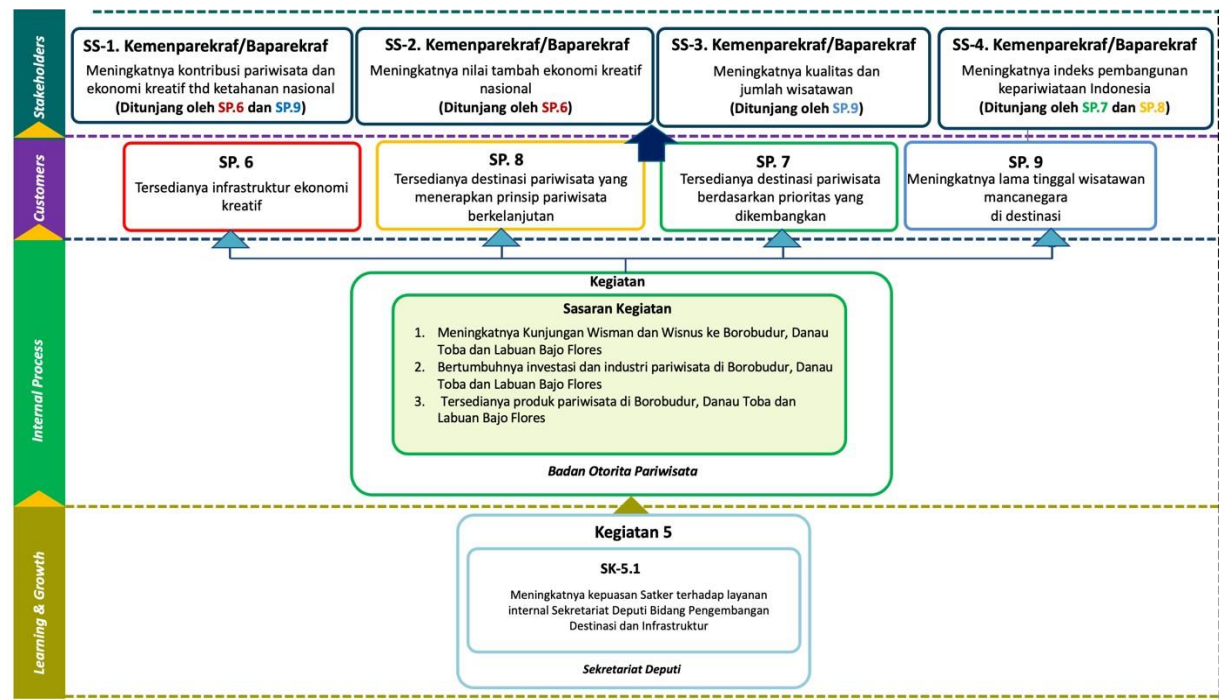
- IKSS 9: Jumlah Destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan

Dampak terhadap IKSS 9 diawali dari:

- SK 2.1: Tersedianya destinasi pariwisata yang menerapkan pariwisata berkelanjutan
- SK 3.1: Terlaksananya pengembangan destinasi prioritas dan destinasi pengembangan di destinasi I dan II

SK 2.1 berkontribusi terhadap SP 8 “Tersedianya Destinasi Pariwisata yang Menerapkan Pariwisata Berkelanjutan” dan SK 3.1 berkontribusi terhadap SP 7 “Tersedianya Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas Yang Dikembangkan”. SP 8 dan SP 9 ini secara simultan berkontribusi langsung terhadap SS 4, pada IKSS 9 “Jumlah Destinasi Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan”.

Dalam pemenuhan SK agar bisa berdampak pada SS Kemenparekraf/Baparekraf, seluruh SK yang ada di Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur didukung oleh SK 5.1 “Meningkatnya Kepuasan Satker Terhadap Layanan Internal Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur” agar bisa tercapai secara baik dan berkelanjutan.



Gambar 5. Peta Sasaran Kegiatan Badan Pelaksana Otorita Pariwisata 2020-2024

Badan Pelaksana Otorita Pariwisata yang berada dalam perintisaan dan pembinaan oleh Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur melalui Direktorat Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur, memiliki SK sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kunjungan Wisman dan Wisnus ke Borobudur, Danau Toba dan Labuan Bajo Flores
2. Bertumbuhnya investasi dan industri pariwisata di Borobudur, Danau Toba dan Labuan Bajo Flores
3. Tersedianya produk pariwisata di Borobudur, Danau Toba dan Labuan Bajo Flores

Ketiga SK tersebut juga didukung oleh SK 5.1, sehingga bisa berdampak secara tidak langsung terhadap seluruh SP dan SS di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur sebagaimana dijelaskan gambar 6.

1.4. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi dan peran strategis Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.

2. Bab II Perencanaan

Bab ini berisi uraian tentang rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Tahun 2024, serta perjanjian kinerja organisasi.

3. Bab III Akuntabilitas

Bab ini berisi uraian tentang capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran 2024, efisiensi penggunaan sumber daya, kinerja lain-lain, dan evaluasi internal.

4. Bab IV Penutup

Bab ini berisi uraian tentang hasil kinerja Deputy Bidang Pengembangan



BAB II

PERENCANAAN

2.1 Rencana Strategis Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur disusun berdasarkan Renstra Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 yang disusun berdasarkan RPJMN 2020-2024 dan telah disetujui oleh Bappenas. Kemudian, Renstra Kemenparekraf/Baparekraf ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024.

Renstra 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024. Sejak tahun 2020, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur bekerja untuk memenuhi target dan capaian sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur yang berlandaskan Renstra pada Peraturan Menteri tersebut sekaligus melakukan evaluasi atas target dan capaian yang ditetapkan.

Tetapi, pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 menjadi pukulan telak bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Bahkan pada 2 tahun setelah awal pandemi, tepatnya tahun 2022, Indonesia baru berhasil memasuki era DVUCA: *Disruptive* (Disrupsi), *Volatility* (Volatilitas), *Uncertainty* (Ketidakpastian), *Complexity* (Kompleksitas), dan *Ambiguity* (Ambiguitas).

Berdasarkan proyeksi organisasi pariwisata dunia (UNWTO), kondisi pariwisata baru akan kembali seperti tahun 2019 setidaknya pada tahun 2024/2025. Hal tersebut menjadi kendala bagi Kemenparekraf/Baparekraf untuk mencapai target capaian yang telah ditetapkan di tahun 2020, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali Renstra Kemenparekraf/Baparekraf dengan mengakomodir kebutuhan kondisi Indonesia yang telah berubah pada masa Covid-19.

Kemudian di tahun 2021 terjadi perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kemenparekraf/Baparekraf, ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 21 Maret 2021. Pandemi Covid-19 serta perubahan organisasi dan tata kelola ini berdampak langsung pada terjadinya perubahan Renstra Kemenparekraf/Baparekraf. Penyusunan perubahan tersebut berhasil diselesaikan pada tahun 2022, tepatnya pada tanggal 07 Oktober 2022 melalui Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024. Pengesahan Peraturan tersebut menjadikan Renstra Perubahan Kemenparekraf/Baparekraf sebagai landasan kinerja oleh seluruh satuan kerja di Kemenparekraf/Baparekraf.

Dengan ditetapkannya Renstra Perubahan Kemenparekraf/Baparekraf, maka Sasaran Program Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, sehingga juga mengubah beberapa indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

No.	Sasaran Program		Indikator Kinerja	
	2020	2021	2020	2021
1.	Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Tetap	Rasio Pemenuhan Infrastruktur Ekraf terhadap Kebutuhan Ekraf	Tetap
2.	Tersedianya Destinasi Pariwisata yang Siap Dipasarkan	Tersedianya Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas yang Dikembangkan	Jumlah Destinasi Pariwisata Yang Siap Dipasarkan	Jumlah Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas Yang Dikembangkan
3.	Tersedianya Destinasi Pariwisata yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Tetap	Jumlah Perangkat Tata Kelola Destinasi Dan Pariwisata Berkelanjutan Yang Siap Diimplementasikan	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan
4.	Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara di Destinasi	Tetap	Lama Tinggal (<i>Length Of Stay</i>) Wisman Di Destinasi	Tetap
5.	-	-	-	Tingkat Kepuasan Satker Terhadap Layanan Internal Deputi Bidang pengembangan Destinasi Dan Infrastruktur

Tabel 2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur 2020-2021

Sumber: 1. Renstra Kemenparekraf 2020-2024

2. Renstra Perubahan Kemenparekraf 2020-2024

Pada akhir tahun 2020, dilaksanakan evaluasi atas Sasaran Program dan Indikator Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dengan mempertimbangkan perubahan kondisi Indonesia. Hasil evaluasi tersebut menghasilkan keputusan untuk mengubah Sasaran Program “Tersedianya Destinasi Pariwisata yang Siap Dipasarkan” menjadi “Tersedianya Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas yang Dikembangkan” yang diikuti perubahan Indikator Kinerja “Jumlah Destinasi Pariwisata Yang Siap Dipasarkan” menjadi “Jumlah Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas Yang Dikembangkan”. Penyesuaian yang dilakukan pada Sasaran Program berpengaruh secara langsung pada Indikator Kinerja.

Faktor utama penentu perubahan ini adalah penyelarasan dengan RPJMN 2020-2024. Pengembangan destinasi pariwisata dianggap lebih efisien dan efektif dalam mewujudkan agenda pembangunan, yaitu nilai tambah lapangan kerja dan investasi serta praktik berkelanjutan. Dengan melibatkan *hexahelix* dari hulu ke hilir, potensi yang bisa dikonversi menjadi lebih luas dari sekadar aspek pemasaran secara parsial, melainkan juga aspek pembangunannya. Aspek pembangunan ini menjadi hal krusial, karena melibatkan hal yang terjadi sementara (selama pembangunan) dan yang tetap (setelah pembangunan).

Dengan tingkat komprehensif yang lebih tinggi sebagaimana dijelaskan, “Jumlah Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas yang Dikembangkan” dianggap menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan “Tersedianya Destinasi Pariwisata yang Siap Dipasarkan”. Penyesuaian tersebut dilakukan pada Oktober 2022 melalui penetapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024. Penyesuaian ini berdampak langsung pada berubahnya beberapa jumlah target pada Indikator Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dari tahun 2022-2024 sebagaimana tabel berikut:

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
			Renstra Awal	Renstra Perubahan	Renstra Awal	Renstra Perubahan	Renstra Awal	Renstra Perubahan	Renstra Awal	Renstra Perubahan	Renstra Awal	Renstra Perubahan
1.	Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Rasio Pemenuhan Infrastruktur Ekraf terhadap Kebutuhan Ekraf	60%	Tetap	70%	Tetap	80%	Tetap	85%	Tetap	90%	85%
2.	Tersedianya Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas yang Dikembangkan	Jumlah Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas yang Dikembangkan	-	9 Destinasi	-	19 Destinasi	-	19 Destinasi	-	19 Destinasi	-	19 Destinasi
3.	Tersedianya Destinasi Pariwisata yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah Perangkat Tata Kelola Destinasi Dan Pariwisata Berkelanjutan Yang Siap Diimplementasikan	9 Lokasi	-	19 Destinasi	-	19 Destinasi	-	19 Destinasi	-	19 Destinasi	-
		Jumlah Destinasi Pariwisata yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan	-	10 Destinasi	-	19 Destinasi	-	19 Destinasi	-	19 Destinasi	-	19 Destinasi
4.	Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara di Destinasi	Lama Tinggal (<i>Length of Stay</i>) Wisman Di Destinasi	2,80 Hari	Tetap	3 hari	3-5 Hari	3,10 hari	3-5 Hari	3,25 hari	3-5 Hari	3,35 hari	3-5 Hari
5.	Meningkatnya Kepuasan Satker Terhadap Layanan Internal Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	Tingkat Kepuasan Satker Terhadap Layanan Internal Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tersedianya Destinasi Pariwisata yang Siap Dipasarkan	Jumlah destinasi pariwisata yang siap dipasarkan	9 Lokasi	-	19 Lokasi	-	19 Lokasi	-	19 Lokasi	-	19 Lokasi	-

Tabel 3. Perubahan Target pada Indikator Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur 2020-2024

Sumber: 1. Renstra Kemenparekraf 2020-2024

2. Renstra Perubahan Kemenparekraf 2020-2024

Pemenuhan seluruh Sasaran Program (SP) pada level Eselon 1 diatur melalui Manual Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan penjelasan detail untuk setiap Indikatornya. Seiring dengan ditetapkannya Renstra Perubahan Kemenparekraf pada tahun 2022, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur juga melakukan perubahan pada Manual IKU ke deputian.

Sasaran Program	01. Tersedianya infrastruktur ekonomi kreatif
Indikator Kinerja Sasaran Program	01. Rasio pemenuhan infrastruktur ekraf terhadap kebutuhan infrastruktur ekraf
Bukti realisasi	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen permintaan ataupun kebutuhan terkait infrastruktur ekonomi kreatif yang diterima Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) infrastruktur ekonomi kreatif
Formula/cara menghitung	1.Hitung jumlah usulan fasilitasi infrastruktur ekonomi kreatif yang telah memenuhi syarat 2.Hitung jumlah infrastruktur ekonomi kreatif yang difasilitasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun berjalan 3.Hitung indeks pemenuhan dengan rumus: $\frac{\text{Jumlah infrastruktur ekonomi kreatif yang difasilitasi}}{\text{Jumlah usulan fasilitasi infrastruktur ekonomi kreatif yang telah memenuhi syarat}}$
Klasifikasi Target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi administrasi dan teknis terhadap proposal yang masuk Jumlah pemenuhan infrastruktur ekonomi kreatif dapat dihitung melalui jumlah BAST yang telah ditandatangani.

Tabel 4. Manual IKU Rasio Pemenuhan Infrastruktur Ekonomi Kreatif Terhadap Kebutuhan Infrastruktur Ekonomi Kreatif

Untuk SP “Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif” memiliki IKSP yang “Rasio Pemenuhan Infrastruktur Ekonomi Kreatif terhadap Kebutuhan Infrastruktur Ekonomi Kreatif” yang kemudian diturunkan menjadi IKSK dipersempit “Jumlah Fasilitasi Infrastruktur Ekonomi Kreatif” dan IKSK buat baru (*Mandatory*) “Jumlah Kabupaten/Kota Kreatif yang Difasilitasi” oleh Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif. Pemenuhan SP ini berkaitan erat dengan jumlah usulan fasilitasi yang memenuhi syarat dan jumlah fasilitasi yang diberikan.

Sebagai bukti dukung dua pekerjaan tersebut, perlu dilakukan verifikasi usulan dan penandatanganan BAST. Setelah dua pekerjaan tersebut dilakukan, selanjutnya dilakukan pembagian antara jumlah fasilitasi yang dilakukan dengan jumlah usulan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan persentase rasio pemenuhan infrastruktur ekonomi kreatif terhadap kebutuhan infrastruktur ekonomi kreatif.

Indikator Kinerja Sasaran Program	02. Jumlah destinasi pariwisata berdasarkan prioritas yang dikembangkan
Bukti realisasi	Laporan hasil asesmen terhadap destinasi pariwisata
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jumlah destinasi dengan kategori "super prioritas" yang dikembangkan di destinasi I (A) 2. Identifikasi jumlah destinasi dengan kategori "prioritas" yang dikembangkan di destinasi I (B) 3. Identifikasi jumlah destinasi dengan kategori "pengembangan" yang dikembangkan di destinasi I (C) 4. Identifikasi jumlah destinasi dengan kategori "super prioritas" yang dikembangkan di destinasi II (D) 5. Identifikasi jumlah destinasi dengan kategori "prioritas" yang dikembangkan di destinasi II (E) 6. Identifikasi jumlah destinasi dengan kategori "pengembangan" yang dikembangkan di destinasi II (F) 7. Identifikasi jumlah destinasi dengan kategori "revitalisasi" yang dikembangkan di destinasi II (G) 8. Hitung dengan rumus: A + B + C + D + E + F + G
Klasifikasi Target	<i>Maximize</i>
Sumber data	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktorat Pengembangan Destinasi I ▪ Direktorat Pengembangan Destinasi II
Cara pengambilan data	Ambil laporan hasil asesmen terhadap destinasi pariwisata.

Tabel 5. Manual IKU Tersedianya destinasi pariwisata berdasarkan prioritas yang dikembangkan

Untuk SP "Tersedianya destinasi pariwisata berdasarkan prioritas yang dikembangkan" memiliki IKSP "Tersedianya destinasi pariwisata berdasarkan prioritas yang dikembangkan" dengan IKS dipersempit "Jumlah destinasi prioritas dan destinasi pengembangan di destinasi I yang dikembangkan" dan "Jumlah destinasi prioritas dan destinasi pengembangan di destinasi II yang dikembangkan" oleh Direktorat Pengembangan Destinasi I (area Sumatera dan Jawa) dan Direktorat Pengembangan Destinasi I II (area Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua). Pemenuhan IKSP ini didasarkan pada jumlah destinasi yang terbagi dalam 4 kategori, yaitu super prioritas, prioritas, pengembangan dan revitalisasi, dengan referensi dari RPJMN 2020-2024 sebagaimana pada tabel berikut:

JENIS DESTINASI	NAMA DESTINASI	KATEGORI
10 Destinasi Pariwisata Prioritas	Bangka Belitung	Destinasi I (B)
	Borobudur dskt	Destinasi I (A)
	Bromo-Tengger-Semeru	Destinasi I (B)
	Danau Toba	Destinasi I (A)
8 Destinasi Pariwisata Pengembangan	Bandung-Halimun-Ciletuh	Destinasi I (C)
	Banyuwangi	Destinasi I (C)
	Batam-Bintan	Destinasi I (C)
	Bukittinggi-Padang	Destinasi I (C)

Tabel 6. 8 Destinasi dalam Wilayah Kerja Pengembangan Destinasi I

JENIS DESTINASI	NAMA DESTINASI	KATEGORI
10 Destinasi Pariwisata Prioritas	Labuan Bajo	Destinasi II (D)
	Lombok-Mandalika	Destinasi II (D)
	Manado-Likupang	Destinasi II (D)
	Morotai	Destinasi II (E)
	Raja Ampat	Destinasi II (E)
	Wakatobi	Destinasi II (E)
8 Destinasi Pariwisata Pengembangan	Biak-Teluk cenderawasih	Destinasi II (F)
	Derawan-Berau	Destinasi II (F)
	Sambas-Singkawang	Destinasi II (F)
	Toraja-Makassar-Selayar	Destinasi II (F)
1 Revitalisasi Destinasi Pariwisata Bali	Bali	Destinasi II (G)

Tabel 7. 11 Destinasi dalam Wilayah Kerja Pengembangan Destinasi II

Kemudian dilakukan identifikasi jumlah destinasi pada setiap kategori di destinasi I dan destinasi II, untuk selanjutnya dilakukan penjumlahan dan dicatatkan sebagai capaian IKSP. Identifikasi tersebut didasarkan pada laporan hasil asesmen terhadap suatu destinasi.

Sasaran Program	03. Tersedianya destinasi pariwisata yang menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan
Indikator Kinerja Sasaran Program	03. Jumlah destinasi pariwisata yang menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan
Bukti realisasi	Dokumen/regulasi hasil penetapan destinasi pariwisata berkelanjutan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Formula/cara menghitung	1. Identifikasi jumlah destinasi pariwisata yang telah menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan (A) 2. Hitung dengan rumus: $A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + \dots + A_N$
Klasifikasi Target	Maximize
Sumber data	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur; dan Direktorat Tata Kelola Destinasi
Cara pengambilan data	Melihat dokumen/regulasi penetapan destinasi pariwisata berkelanjutan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tabel 8. Manual IKU Jumlah destinasi pariwisata yang menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan

Untuk SP “Tersedianya destinasi pariwisata yang menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan” memiliki IKSP “Jumlah destinasi pariwisata yang menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan” dengan IKS adopsi langsung “Jumlah destinasi pariwisata yang menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan” oleh Direktorat Tata Kelola Destinasi. Pemenuhan IKS ini didasarkan pada

penjumlahan dari jumlah destinasi pariwisata berkelanjutan yang teridentifikasi.

Pariwisata berkelanjutan dalam SP ini adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permenparekraf) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Sasaran Program	04. Meningkatnya lama tinggal wisatawan mancanegara di destinasi
Indikator Kinerja Sasaran Program	04. Lama tinggal (<i>Length of Stay</i>) wisman di destinasi
Bukti realisasi	Informasi lama tinggal wisatawan mancanegara (wisman) di destinasi dalam tahun berjalan yang didapat dari hasil olahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas data dari Badan Pusat Statistik
Formula/cara menghitung	Identifikasi perhitungan lama tinggal (<i>length of stay</i>) wisatawan di destinasi
Klasifikasi Target	<i>Maximize</i>
Sumber data	BPS yang diolah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Cara pengambilan data	Melihat hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tabel 9. Manual IKU Lama tinggal (*Length of Stay*) Wisatawan Mancanegara di Destinasi

Untuk SP “Meningkatnya lama tinggal wisatawan mancanegara di destinasi” memiliki IKSP “Lama tinggal (*Length of Stay*) Wisatawan Mancanegara di Destinasi” dengan IKS dipersempit “Lama tinggal (*Length of Stay*) Wisatawan Mancanegara di Destinasi I” dan “Lama tinggal (*Length of Stay*) Wisatawan Mancanegara di Destinasi II”.

Pemenuhan IKS ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik yang diolah oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dengan menggunakan definisi bahwa *Length of Stay* adalah waktu yang dihabiskan wisatawan di suatu destinasi. Lama tinggal ini berdasarkan perhitungan per provinsi.

2.2 Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2024

RPJMN 2020-2024 menetapkan beberapa Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*), Kemenparekraf/Baparekraf tercatat diamanahkan untuk melaksanakan *Major Project* berikut:

No.	MAJOR PROJECT	MANFAAT PROYEK	INDIKASI PENDANAAN (TRILIUN)
1.	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makan dan Minum, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Meningkatnya kontribusi industri dalam PDB menjadi 21,0%	245,8 • APBN : 13 • BUMN : 125,9 • Swasta : 106,9
2.	10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya devisa sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024) • Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kedatangan (2024) 	161 (APBN, KPBU, BUMN, Swasta)
3.	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pertumbuhan industri pariwisata Batam-Bintan 	69,9 • APBN : 6,4 • KPBU: 9,5 • Badan Usaha : 54

Tabel 10. Major Project dalam RPJMN 2020-2024 yang dilaksanakan Kemenparekraf/Baparekraf

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur ikut berkontribusi kepada *Major Project* nomor 1 dan 2. Sesuai dengan amanah dalam RPJMN 2020-2024, untuk *Major Project* 1, Kemenparekraf/Baparekraf dimanahkan untuk pemberdayaan UMKM bersama dengan Kemenperin dan KemenKUKM. Mayoritas kontribusi yang dihasilkan adalah hasil dari Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, sejalan dengan tugas dan fungsi mengembangkan ekonomi kreatif yang banyak memiliki irisan dengan UMKM.

1. Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none">• Nilai kontribusi PDB industri menurun menjadi di bawah 20 persen, dengan rata-rata pertumbuhan PDB 4,3% lebih rendah dari pertumbuhan nasional.• Produktivitas tenaga kerja industri meningkat namun dalam laju yang lebih lambat dibandingkan peningkatan produktivitas tenaga kerja di negara lain• Kontribusi ekspor industri Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara China, Filipina, Thailand, Vietnam dan Malaysia, dan sebagian besar ekspor industri dari Indonesia memiliki kandungan teknologi yang lebih rendah.• Potensi pemanfaatan teknologi digital sangat besar untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri berbasis konten.					
Manfaat	Meningkatnya pertumbuhan PDB industri pengolahan menjadi 8,1 persen Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam PDB menjadi 21,0 persen Meningkatnya nilai ekspor produk industri pengolahan menjadi USD 183,4 miliar			Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi menjadi 13 persen Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) \geq 3.0 menjadi 60 perusahaan (kumulatif)		
Durasi	2020-2024 (5 tahun)					
	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN
Indikasi Target dan Pendanaan	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kontribusi PDB Industri Pengolahan : 19,7% Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 5,0%	Kontribusi PDB Industri Pengolahan : 19,8% Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 5,5%	Kontribusi PDB Industri Pengolahan : 20% Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 6,5%	Kontribusi PDB Industri Pengolahan : 20,4% Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 7,5%	Kontribusi PDB Industri Pengolahan : 21% Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 8,1%	Rp 245,8 T <ul style="list-style-type: none">• APBN: Rp 13 T• Swasta: Rp 106,9 T• BUMN: Rp 125,9 T
Pelaksana	Kemenperin, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenkominfo, Kemenristek, Kemenparekraf, KemenKUKM, KemenKP, Kemendag, KPPU, KemenLHK, K/L lainnya (Sesuai Making Indonesia 4.0: KemenPUPR, KemenESDM, Kementan, Bappenas, BKPM, Kemenaker dan Kemendagri), Pemda, Dunia Usaha					
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none">1. Harmonisasi peraturan dan kebijakan (Kemenperin, Kemendag, KPPU, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemendagri, Bappenas)2. Perbaikan alur aliran material dan penerapan standar keberlanjutan (Kemenperin, KemenKP, Kemendag, KemenKP, KemenLHK, Kementan, KemenESDM, Kemenkeu)3. Pengembangan ekosistem inovasi, infrastruktur digital dan insentif investasi teknologi (Kemenristek, Kemenperin, Kemenkominfo, Kemenparekraf, KemenKP, KemenLHK, KemenKUKM, Kementan, KemenESDM, Kemenkeu)4. Peningkatan investasi (BKPM, Kemenperin, Kemenko Perekonomian)5. Pemberdayaan UMKM (Kemenperin, KemenKUKM, Kemenparekraf)					

Tabel 11. Rincian Major Project 1 dalam RPJMN 2020-2024

Major Project 2 berupa pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas menjadi salah satu prioritas bagi seluruh direktorat di Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Hal ini menjadi bukti komitmen kami, yang sejalan dengan penempatan Kemenparekraf/Baparekraf sebagai pelaksana pertama dan *highlight* proyek pertama, yaitu Perintisan Destinasi Pariwisata.

2. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai

Latar Belakang	Pariwisata Indonesia masih bertumpu pada Bali (41 persen). Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas membuka peluang pengembangan destinasi yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal sekelas Bali. Pemerintah mendorong penyiapan 5 destinasi super prioritas dan 5 destinasi pariwisata prioritaslainnya					
Manfaat	1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDB menjadi 5,5% (2024) 2. Meningkatnya devisa dari sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024) 3. Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara 350-400 juta perjalanan (2024) dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kunjungan (2024)					
Durasi	2020-2024 (5 tahun)					
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total
	• Perpres ITMP untuk Borobudur dskt, Danau Toba dskt, dan Lombok (100%) • Penyusunan ITMP untuk Labuan Bajo, Manado-Likupang, Bromo-Tengger-Semeru (BTS), Wakatobi, Bangka Belitung dan Morotai • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Danau Toba, Borobudur dskt, Lombok (100%)	• Perpres ITMP untuk Labuan Bajo, Manado-Likupang, BTS, Wakatobi, Morotai, Bangka Belitung (100%) • Penyusunan ITMP untuk Raja Ampat • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Labuan bajo, dan Manado-Likupang (100%) • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi (20%)	• Perpres ITMP untuk Raja Ampat (100%) • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi (40%) • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Morotai, Bangka Belitung, dan Raja Ampat (20%)	• Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi (80%) • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Morotai, Bangka Belitung, dan Raja Ampat (60%)	• Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi (100%) • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Morotai, Bangka Belitung, dan Raja Ampat (100%)	• 10 Kawasan Prioritas Selesai 100%
Pelaksana	Kemenparekraf, KemenPUPR, Kemenhub, KemenLHK, KemenKP, KemendesPDTT, KemenKUKM, KemenESDM, Kemenaker, BKPM, BNPB, Kemendagri, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, KemenATR/BPN, Kementan, KemenBUMN, Kemendag, Bappenas, Pemda, Badan Pengelola Otorita Kawasan Pariwisata, BUMN, Dunia Usaha dan Mitra Pembangunan					
Highlight Proyek	1. Perintisan Destinasi Pariwisata (Kemenparekraf, KemenATR/BPN, BKPM) 2. Penanganan Jalan Mendukung 10 DPP (KemenPUPR, Pemda) 3. Pembangunan Pelabuhan dan Bandara (Kemenhub, BUMN)			4. Pembangunan Desa Wisata dan Fasilitas BUMDes (Kemenparekraf, KemendesPDTT, Kemendikbud, Kemenaker, KemenKUKM) 5. Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata (KemenPUPR, KemenESDM, Kemenkes, BNPB, Pemda) 6. Pembangunan dalam Wilayah dan Kawasan (Kemenparekraf, Kementan, KemenKP, KemenLHK, BUMN, Badan Otorita, Kemendag)		

Tabel 12. Rincian Major Project 2 dalam RPJMN 2020-2024

Selain itu, *highlight* proyek nomor 4 (Pembangunan Desa Wisata dan Fasilitas BumDes), menjadi salah satu program unggulan Kemenparekraf/Baparekraf yang ada di direktorat Tata Kelola Destinasi. Lalu *highlight* proyek nomor 6 (pembangunan dalam Wilayah dan Kawasan) juga menjadi hal yang diintervensi oleh Deputy Bidang Pengembangan Destinasi

Infrastruktur, melalui koordinasi dengan satker terkait dan Badan Pelaksana Otorita.



Gambar 6. Persebaran 19 Destinasi Pariwisata dalam RPJMN 2020-2024

2.3 Rencana Kerja dan Anggaran Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024

2.3.1 Proses Penyusunan Rencana Kerja

Tahapan penyusunan Rencana Kerja dilaksanakan sesuai dengan PP No. 40/2006 dan PP No. 90/2010 tentang Penyempurnaan Siklus Perencanaan dan Penganggaran Nasional. Pada awal Tahun 2023 Kemenparekraf/Baparekraf menetapkan Proyek Prioritas dan Prioritas Bidang yang dilaksanakan pada Tahun 2024 sesuai dengan amanah RPJMN. Proyek Prioritas yang ditetapkan adalah kegiatan Kemenparekraf/Baparekraf yang bersifat signifikan untuk mencapai sasaran nasional sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Kemenparekraf/Baparekraf. Sedangkan, Prioritas Bidang adalah kegiatan Kemenparekraf/Baparekraf yang bersifat signifikan untuk mencapai sasaran.

Dalam penyusunan Rencana Kerja, Kemenparekraf/Baparekraf mengikuti timeline strategis Kemenparekraf/Baparekraf. Selanjutnya Proyek Prioritas dan Prioritas Bidang dimaksud dibahas bersama dalam pertemuan dua pihak (*Bilateral Meeting*) antara Kemenparekraf/Baparekraf dengan Kementerian PPN/Bappenas yang membahas draft Renja yang berisi informasi dan struktur kinerja organisasi. Setelah surat bersama antara Menteri PPN/Kepala

Bappenas dengan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif Tahun 2023 ditetapkan, maka untuk itu dilakukan penyempurnaan Rancangan Awal Renja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2023 melalui penelaahan dalam forum pertemuan tiga pihak (*Trilateral Meeting*) dengan Kementerian PPN/Bappenas c.q Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Keuangan c.q Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. Pertemuan ini merupakan wadah sinkronisasi perencanaan level nasional dan sinkronisasi perencanaan di setiap level yang diharapkan akan menghasilkan suatu perencanaan yang lebih baik dan berkualitas.

2.3.2 Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana kerja dan anggaran Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur pada tahun 2024 secara total bernilai Rp236.468.000.000, yang terdiri atas Rp212.450.000.000 untuk Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Rp24.018.000.000 untuk Dukungan Manajemen. Berikut adalah detail rencana kerja dan anggaran Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur yang ditetapkan sebagai DIPA awal 2024:

Kode	Nomenklatur Kegiatan/KRO/RO	Pagu Anggaran 2024
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR		236.468.000.000
040.01.EA	PROGRAM KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	212.450.000.000
4313	PENGEMBANGAN TATA KELOLA DESTINASI PARIWISATA	79.900.000.000
4313.AEA	Koordinasi	18.250.000.000
4313.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.000.000.000
4313.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1.500.000.000
4313.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	2.800.000.000
4313.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2.000.000.000
4313.PEA	Koordinasi	54.350.000.000
4314	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR EKONOMI KREATIF	84.300.000.000
4314.CAM	Sarana Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	5.300.000.000
4314.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	400.000.000

Kode	Nomenklatur Kegiatan/KRO/RO	Pagu Anggaran 2024
4314.PEA	Koordinasi	22.500.000.000
4314.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	4.450.000.000
4314.RAM	Sarana Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	11.500.000.000
4314.RBN	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	40.150.000.000
4315	PENGEMBANGAN DESTINASI I	24.250.000.000
4315.AEC	Kerja sama	3.850.000.000
4315.PEA	Koordinasi	14.200.000.000
4315.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3.900.000.000
4315.RAM	Sarana Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	2.300.000.000
4316	PENGEMBANGAN DESTINASI II	24.000.000.000
4316.AEC	Kerja sama	5.500.000.000
4316.PEA	Koordinasi	14.500.000.000
4316.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2.500.000.000
4316.RAM	Saran Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	1.500.000.000
040.01.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	24.018.000.000
4312	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR	24.018.000.000
4312.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.200.000.000
4312.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	495.350.000
4312.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	13.522.650.000
4312.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.300.000.000
4312.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7.500.000.000

Tabel 13. Rencana Kerja dan Anggaran T.A. 2024 Deputi Bidang Pengembangan

2.3.3 Perjalanan Pagu Anggaran

Sepanjang tahun 2024, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur mengalami 12 kali revisi Dipa dengan 1 kali revisi di bulan Desember (revisi ke-12) yang memberikan tambahan anggaran. Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program *Quick Win* Menteri Pariwisata seiring dengan dilaksanakannya

pergantian menteri dan pemisahan nomenklatur dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif pada Oktober 2024.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur mendapatkan tambahan anggaran senilai Rp4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta Rupiah) untuk melaksanakan program Gerakan Wisata Bersih dan Pemutakhiran Data *Geopark* dalam rangka peningkatan kualitas destinasi sebagai upaya peningkatan daya saing untuk mendukung capaian program jangka pendek dalam menangkap peluang dan menangani kendala sebagai bentuk intensifikasi program bangsa berwisata di Indonesia.

Revisi Dipa	Tanggal	Jumlah
1	31 Januari 2024	Rp236.468.000.000
2	16 Februari 2024	Rp236.468.000.000
3	18 April 2024	Rp236.468.000.000
4	27 Mei 2024	Rp236.468.000.000
5	1 Juli 2024	Rp236.468.000.000
6	12 Juli 2024	Rp236.468.000.000
7	6 September 2024	Rp236.468.000.000
8	1 Oktober 2024	Rp236.468.000.000
9	4 Oktober 2024	Rp236.468.000.000
10	14 Oktober 2024	Rp236.468.000.000
11	18 November 2024	Rp236.468.000.000
12	4 Desember 2024	Rp240.968.000.000

Tabel 14. Revisi Dipa pada Tahun Anggaran 2024

Secara proporsi anggaran, terjadi perubahan signifikan pada Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang kemudian berdampak pada Direktorat Pengembangan Destinasi I dan Direktorat Pengembangan Destinasi II. Terbitnya PMK no. 60 Tahun 2023 yang secara spesifik mengatur pelaksanaan Bantuan Pemerintah, membuat anggaran di Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebanyak 15 Milyar Rupiah tidak bisa digunakan. Kondisi ini diselesaikan dengan melakukan optimalisasi melalui mekanisme perpindahan anggaran ke Direktorat Pengembangan Destinasi I dan Direktorat Pengembangan Destinasi II dalam bentuk program Bantuan 3A kepada pelaku pariwisata.

No.	Direktorat	Renja	Revisi Dipa 12
1.	Tata Kelola Destinasi	Rp79.900.000.000	Rp79.900.000.000
2.	Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Rp84.300.000.000	Rp69.300.000.000
3.	Pengembangan Destinasi I	Rp24.250.000.000	Rp39.400.000.000
4.	Pengembangan Destinasi II	Rp24.000.000.000	Rp28.350.000.000
5.	Dukungan Manajemen	Rp24.018.000.000	Rp24.018.000.000

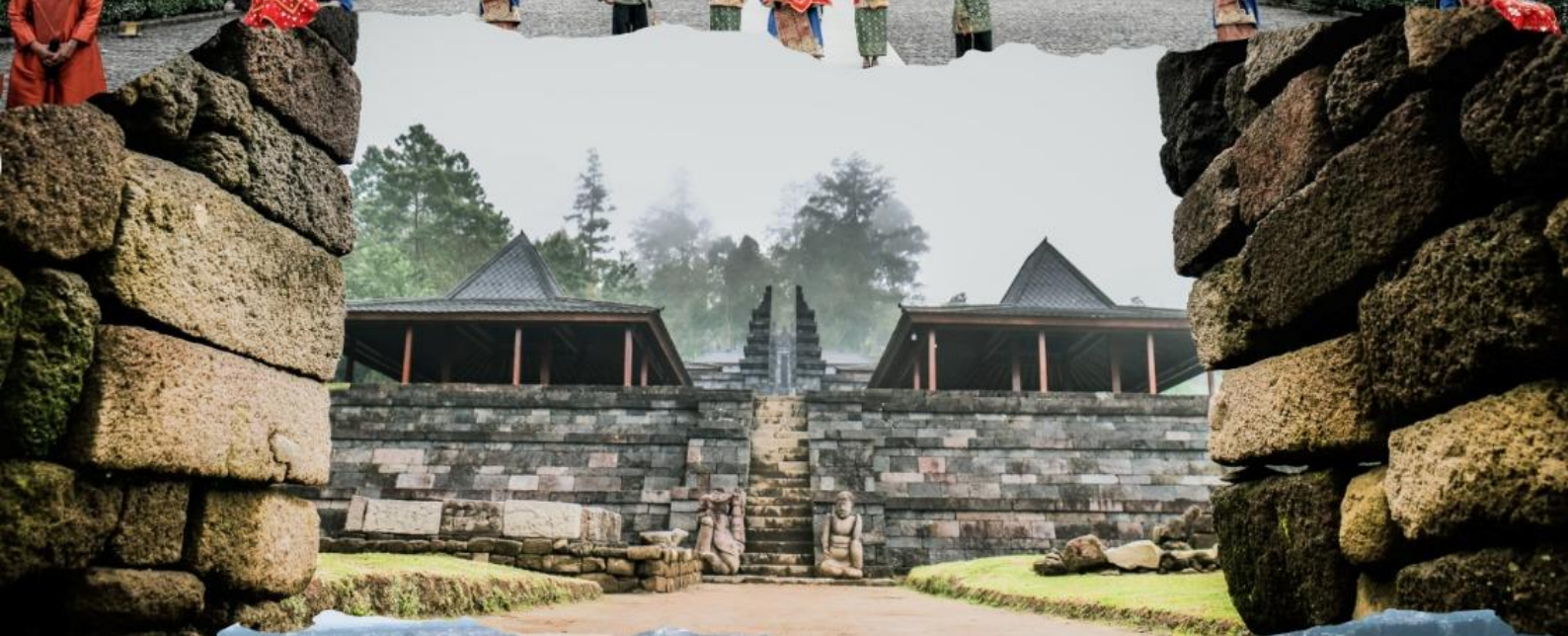
Total	Rp236.468.000.000	Rp 240.968.000.000
-------	-------------------	--------------------

Tabel 15. Perbandingan Anggaran Renja dan Revisi Dipa ke-12

2.4 Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

Berdasarkan SS pada Renstra Perubahan Kemenparekraf/Baparekraf, maka dilakukan pendetailan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur sesuai Permenparekraf No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hasil pendetailan tersebut merupakan SP yang kemudian ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, beserta dengan IKSP, yang kemudian dilakukan pendetailan kembali untuk diturunkan menjadi SK beserta dengan IKS untuk eselon 2 di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Perjanjian Kinerja awal Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024 terdapat pada lampiran.

Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur tahun 2024 mengalami 1 kali perubahan seiring dengan penambahan anggaran untuk menunjang *Quick Win* Menteri Pariwisata. Perubahan anggaran tersebut merupakan pergeseran anggaran dari Sekretaris Kementerian ke Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dalam rangka optimalisasi sisa anggaran, yang terjadi setelah dikeluarkannya surat perintah Plt. Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, sehingga terdapat perubahan Perjanjian Kinerja pada bagian anggaran.



BAB III

AKUNTABILITAS

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Sejalan dengan berakhirnya Renstra Perubahan Kemenparekraf 2020-2024, Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur memiliki data capaian kinerja yang dicatat mulai tahun 2020 sampai dengan 2024. Beberapa capaian kinerja tidak tersedia selama 5 tahun ke belakang karena perubahan perjanjian kinerja seiring perubahan organisasi dan renstra Kemenparekraf.

Kinerja “Rasio Pemenuhan Infrastruktur Ekonomi Kreatif terhadap Kebutuhan Ekonomi Kreatif” terus mengalami kenaikan realisasi sejak 2020. Hal ini menjadi prestasi yang baik, mengingat pada tahun 2020 dan 2021, Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19 yang memperlambat perputaran ekonomi secara global. Perkembangan pemenuhan juga terjadi cukup signifikan setelah selesainya tahun pertama Covid-19, dari 60% di tahun 2020 menjadi di kisaran 90% pada 2021-2023. Salah satu hal yang menjadi pemicunya adalah perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang menyebabkan berkurangnya hambatan geografis sehingga meningkatkan permintaan akan Ekonomi Kreatif.

Sasaran Program : Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif

Indikator Kinerja : Rasio Pemenuhan Infrastruktur Ekonomi Kreatif terhadap Kebutuhan Ekonomi Kreatif

Tahun	Target	Jumlah Realisasi	Persentase Realisasi
2020	60%	60%	100%
2021	70%	92%	131%
2022	80%	92,18%	115%
2023	85%	97,46%	115%

Tabel 16. Capaian Sasaran Program "Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif" Tahun 2020-2023

Kinerja “Jumlah destinasi pariwisata yang siap dipasarkan” pada tahun 2020 telah memenuhi target untuk 9 destinasi, yaitu destinasi pariwisata Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang, Banyuwangi, Batam-Bintan, Bandung-Halimun-Ciletuh, dan Bukittinggi-Padang. Kemudian pada 2021, kinerja tersebut diubah menjadi “Jumlah Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas yang Dikembangkan”. Target perubahan sebanyak 19 destinasi sesuai dengan jumlah destinasi pariwisata prioritas pada RPJMN 2020-2024 telah dicapai selama tahun 2021-2023.

Sasaran Program : Tersedianya Destinasi Pariwisata yang Siap Dipasarkan
Indikator Kinerja : Rasio Pemenuhan Infrastruktur Ekonomi Kreatif terhadap Kebutuhan Ekonomi Kreatif

Tahun	Target	Jumlah Realisasi	Persentase Realisasi
2020	9 Lokasi	9 Lokasi	100%

Tabel 17. Capaian Sasaran Program "Tersedianya Destinasi Pariwisata Berdasarkan yang Siap Dipasarkan"

Sasaran Program : Tersedianya Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas yang Dikembangkan

Indikator Kinerja : Jumlah Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas yang Dikembangkan

Tahun	Target	Jumlah Realisasi	Persentase Realisasi
2021	19 Destinasi	19 Destinasi	100%
2022	19 Destinasi	19 Destinasi	100%
2023	19 Destinasi	19 Destinasi	100%

Tabel 18. Capaian Sasaran Program "Tersedianya Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas yang Dikembangkan"

Kinerja "Jumlah Perangkat Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan yang Siap Diimplementasikan" di tahun 2020 juga menyasar pada 9 destinasi yang sama. Kinerja ini telah memenuhi target tersebut. Kemudian pada 2021, kinerja ini diubah menjadi "Jumlah Destinasi Pariwisata yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan" dan diperluas pada 19 destinasi sebagai target. Selama 2021-2023, target yang ditetapkan selalu tercapai 100%.

Sasaran Program : Tersedianya Destinasi Pariwisata yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan

Indikator Kinerja : Jumlah Perangkat Tata Kelola Destinasi Dan Pariwisata Berkelanjutan Yang Siap Diimplementasikan

Tahun	Target	Jumlah Realisasi	Persentase Realisasi
2020	10 Destinasi	15 Destinasi	150%

Tabel 19. Capaian Sasaran Program "Tersedianya Destinasi Pariwisata yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan" Tahun 2020

Sasaran Program : Tersedianya Destinasi Pariwisata yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan

Indikator Kinerja : Jumlah Destinasi Pariwisata yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan

Tahun	Target	Jumlah Realisasi	Persentase Realisasi
2021	19 Destinasi	19 Destinasi	100%
2022	19 Destinasi	19 Destinasi	100%
2023	19 Destinasi	19 Destinasi	100%

Tabel 20. Capaian Sasaran Program "Tersedianya Destinasi Pariwisata yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan" Tahun 2021-2023

Terdapat satu kinerja yang sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tidak berhasil dipenuhi, yaitu “Lama Tinggal (*Length of Stay*) Wisman di Destinasi” dengan capaian rata-rata berada di bawah 3 hari, sementara target yang ditetapkan adalah 3-5 hari. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur hanya berhasil memenuhi target pada kinerja ini di tahun 2020, dengan realisasi 8,63 hari. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan sejak tahun 2021 terdapat beberapa faktor yang memengaruhi, di antaranya:

1. Metode pengumpulan data yang dilakukan kurang representatif
2. Pola perjalanan yang memang dirancang untuk singkat
3. Ketersediaan kualitas data yang tidak sama di setiap provinsi

Sasaran Program : Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara di Destinasi

Indikator Kinerja : Lama Tinggal (*Length of Stay*) Wisman di Destinasi

Tahun	Target	Jumlah Realisasi	Persentase Realisasi
2020	2,80 Hari	7,79 Hari	278%
2021	3-5 Hari	4,3 Hari	143%
2022	3-5 Hari	2,67 Hari	89%
2023	3-5 Hari	2,18 Hari	73%

Tabel 21. Capaian Sasaran Program "Lama Tinggal (*Length of Stay*) Wisman di Destinasi" Tahun 2020-2023

Kinerja “Tingkat Kepuasan Satker Terhadap Layanan Internal Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur” merupakan kinerja yang mulai diakomodir pada tahun 2021. Dalam rentang waktu tersebut, target yang telah ditetapkan selalu berhasil dicapai oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.

Sasaran Program : Meningkatnya Kepuasan Satker Terhadap Layanan Internal Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

Indikator Kinerja : Tingkat Kepuasan Satker Terhadap Layanan Internal Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

Tahun	Target	Jumlah Realisasi	Persentase Realisasi
2021	3,2 Skala Likert	3,21 Skala Likert	100%
2022	3,3 Skala Likert	3,31 Skala Likert	100%
2023	3,4 Skala Likert	3,4 Skala Likert	100%

Tabel 22. Capaian Sasaran Program "Meningkatnya Kepuasan Satker Terhadap Layanan Internal Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur" Tahun 2021-2024

Berikut adalah data capaian kinerja dari Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur tahun 2024, dan historis sejak tahun 2020:

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Jumlah Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Jumlah Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Jumlah Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Jumlah Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Jumlah Realisasi	Persentase Realisasi
1.	Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Rasio Pemenuhan Infrastruktur Ekonomi Kreatif terhadap Kebutuhan Ekonomi Kreatif	60%	60%	100%	70%	92%	131%	80%	92,18%	115%	85%	97,46%	115%	85%	100%	117%
2.	Tersedianya Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas yang Dikembangkan	Jumlah Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas yang Dikembangkan	-	-	-	19 Destinasi	19 Destinasi	100%	19 Destinasi	19 Destinasi	100%	19 Destinasi	19 Destinasi	100%	19 Destinasi	19 Destinasi	100%
3.	Tersedianya Destinasi Pariwisata yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah Perangkat Tata Kelola Destinasi Dan Pariwisata Berkelanjutan Yang Siap Diimplementasikan	10 Lokasi	15 Lokasi	150%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Destinasi Pariwisata yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan	-	-	-	19 Destinasi	19 Destinasi	100%	19 Destinasi	19 Destinasi	100%	19 Destinasi	19 Destinasi	100%	19 Destinasi	19 Destinasi	100%
4.	Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara di Destinasi	Lama Tinggal (<i>Length of Stay</i>) Wisman Di Destinasi	2,80 Hari	7,79 Hari	278,2%	3-5 Hari	4,3 Hari	143%	3-5 Hari	2,67 Hari	89%	3-5 Hari	2,18 Hari	73%	3-5 Hari	2,17 Hari	72,4%
5.	Meningkatnya Kepuasan Satker Terhadap Layanan Internal Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	Tingkat Kepuasan Satker Terhadap Layanan Internal Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	-	-	-	3,2 Skala Likert	3,21 Skala Likert	100%	3,3 Skala Likert	3,31 Skala Likert	100%	3,4 Skala Likert	3,4 Skala Likert	100%	3,5 Skala Likert	3,54 Skala Likert	101%
6.	Tersedianya Destinasi Pariwisata yang Siap Dipasarkan	Jumlah destinasi pariwisata yang siap dipasarkan	9 Destinasi	9 Destinasi	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 23. Data Capaian Sasaran Program Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2020-2024

3.1.1 Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Realisasi	Persentase Realisasi
Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Rasio Pemenuhan Infrastruktur Ekonomi Kreatif terhadap Kebutuhan Ekonomi Kreatif	85%	100%	117%

Tabel 24. Realisasi Sasaran Program "Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif"

Pada tahun 2024 realisasi sasaran program ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2023. Jumlah realisasi tersebut didapatkan dari penghitungan rasio terpenuhinya Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam manual IKU. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur berhasil memfasilitasi 10 infrastruktur ekonomi kreatif dari 10 kebutuhan infrastruktur yang terverifikasi.

Infrastruktur menjadi salah satu alat dalam mengembangkan potensi serta membangun konektivitas suatu daerah. Melalui penyediaan infrastruktur ekonomi kreatif yang terencana dengan baik, aktivitas dan ekosistem subsektor ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian bagi daerah untuk kemudian berdampak secara simultan pada nilai tambah ekonomi nasional. Rasio Pemenuhan Infrastruktur Ekonomi Kreatif terhadap Kebutuhan Infrastruktur Ekonomi Kreatif merepresentasikan sejauh mana ketersediaan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan permintaan atau proposal infrastruktur yang diajukan kepada Kemenparekraf/Baparekraf. Definisi Infrastruktur ekonomi kreatif yang digunakan adalah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 20 UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, meliputi infrastruktur fisik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka memenuhi infrastruktur ekonomi kreatif melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas ruang kreatif di Indonesia, dilaksanakan Program Bantuan Pemerintah (Banper) yang memberikan fasilitasi berupa pembangunan prasarana ruang kreatif dan pemberian sarana ruang kreatif. Bantuan Pemerintah diberikan sebagai stimulan bagi pelaku kreatif untuk meningkatkan kapasitas dan produktifitasnya dalam berkarya. Selain itu, bantuan yang diberikan kepada pelaku

kreatif adalah dalam bentuk barang, bukan berbentuk uang seperti pada umumnya diberikan oleh pemerintah dalam bantuan bantuan sosial.

Program Bantuan Pemerintah di tahun 2024 terdiri dari:

- a. Bantuan Pemerintah Fasilitas Sarana Ruang Kreatif TA 2024 dengan keluaran Sarana Ruang Kreatif yang Difasilitasi; dan
- b. Bantuan Pemerintah Fasilitas Rehabilitasi Sarana Ruang Kreatif TA 2024 dengan keluaran Prasarana Ruang Kreatif.

Sebagai penguatan di tahun 2024, Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur juga melaksanakan kegiatan Pengembangan Sentra Kreatif Indonesia untuk menghadirkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Ekonomi Kreatif sebagai institusi yang menginduk dan berada di bawah Kemenparekraf/Baparekraf untuk mendukung aktivitas pelaku ekraf pemula. Kemudian Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur juga memberikan fasilitas ruang kreatif kepada daerah dengan mekanisme Tugas Pembantuan ke 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan fasilitas ruang kreatif kepada daerah ini langsung diberikan kepada Kabupaten/Kota Pengampu Dana Tugas Pembantuan, tapi seluruh prosesnya tetap didampingi dan dipantau oleh Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur agar tepat guna dan tepat sasaran.

1. Sarana Ruang Kreatif yang Difasilitasi

Keluaran ini dihasilkan dari program Bantuan Pemerintah Fasilitas Sarana Ruang Kreatif TA 2024 yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non-pemerintah, termasuk juga UMKM yang bergerak di 17 (tujuh belas) subsektor ekonomi kreatif untuk meningkatkan karsa dan karya para pelaku kreatif sehingga pada akhirnya mampu menyokong perekonomian nasional. Dalam menjamin ketercapaian tujuan tersebut, telah disusun Petunjuk Teknis (Juknis) Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Nomor JUKNIS/9/DI.01.01/D.3/2023 Tentang Bantuan Pemerintah Fasilitas Sarana Ruang Kreatif Tahun 2024 dan penyebar luasan informasi pada media sosial, situs web kemenparekraf.go.id dan banper.kemenparekraf.go.id.

Pelaksanaan program ini juga melibatkan para pakar dari bidang arsitek, sipil, mekanikal elektrik, etnomusikolog, seniman tari, ahli

lighting, fesyen desainer, fotografer, dan *sound*. Seluruh elemen yang terlibat bekerja sama menjalankan penerimaan proposal diunggah secara online melalui situs banper.kemenparekraf.go.id pada tanggal 2 Januari hingga 7 Februari 2024 dengan jumlah proposal lengkap sebanyak 280 proposal. Kemudian tahap penilaian administrasi proposal pada tanggal 4 Maret 2024 dan terpilih 30 proposal yang memenuhi syarat untuk verifikasi lapangan dan 20 proposal sebagai cadangan verifikasi lapangan. Namun, pelaksanaan kegiatan ini belum dapat dilanjutkan karena adanya blokir anggaran karena tidak dapat memenuhi salah satu persyaratan yang tercantum pada Pasal 40 ayat 1 PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dalam pasal tersebut pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Bantuan Pemerintah, dilaksanakan dengan memenuhi syarat: 1) Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengamankan Pemerintah memberikan bantuan; 2) Mendapat penugasan Presiden; dan/atau 3) Tercantum dalam RKP.

2. Prasarana Ruang Kreatif

Keluaran ini dihasilkan dari program Bantuan Pemerintah Fasilitas Rehabilitasi Ruang Kreatif yang berfungsi untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan yang sama di tahun 2022 akibat pemotongan anggaran (*Automatic Adjustment*) di tahun tersebut untuk 10 penerima yang telah ditetapkan pada tahun 2021 melalui SK PPK Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif Nomor SK/01/KU.06.00/PPK4-DPDI.3/2021, yang kemudian diperbarui dengan SK PPK Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif Nomor SK/09/DI.01.01/PPK/D.3.3/2023. Demi tercapainya tujuan tersebut, telah disusun Petunjuk Teknis (Juknis) Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Nomor JUKNIS/9/DI.01.01/D.3/2023 tentang Bantuan Pemerintah Fasilitas Rehabilitasi Ruang Kreatif Tahun 2024. Adapun 10 (sepuluh) Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitas Rehabilitasi Ruang Kreatif Tahun 2024, yaitu:

- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Lepo Lorun, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur;
- Lembaga Sanggar Saandiko, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat;
- Sanggar Seni Putra Purnayudha, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat;

- Sanggar Tari dan Musik Metanika, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan;
- Yayasan Ekodance, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;
- Yayasan Eksotika Karmawibhangga, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Yayasan Jagad Sentana Art, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;
- Yayasan Jember *Fashion Carnaval*, Kabupaten Jember, Jawa Timur;
- Yayasan Pelangi Nusantara Singhasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur; dan
- Yayasan Yasa Putra Sedana, Kabupaten Gianyar, Bali.

Tapi, pelaksanaan kegiatan ini belum dapat dilanjutkan akibat pemotongan anggaran (*Automatic Adjustment*) berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor B/SD/19/KU.00/S/2024 pada tanggal 9 Januari 2024 perihal *Automatic Adjustment* (AA) Belanja Kemenparekraf/Baparekraf Tahun Anggaran 2024 sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan Rnomo S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 terkait *Automatic Adjustment* (AA) Belanja Kementerian/Lembaga.

3. Pengembangan Sentra Kreatif (SKI)

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur melalui Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif bermaksud membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang akan bermarkas di Gedung UPT Bidang Ekonomi Kreatif di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. UPT ini merupakan perpanjangan tangan Kemenprekraf/Baparekraf dalam memaksimalkan pengelolaan pelaku ekraf di wilayah tertentu. Keberadaan UPT dimaksudkan untuk mendukung aktivitas pelaku kreatif pemula dengan melakukan pengembangan, fasilitasi, kerja sama, dan pendudukan pemasaran agar para pelaku kreatif dapat berkreasi, berorganisasi, serta membangun jejaring sehingga tercipta kolaborasi antar pelaku kreatif. UPT ini telah disepakati dengan nama Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif (UPT BPU-Ekraf) oleh Kemenparekraf dan KemenPAN-RB.

Gedung UPT BPU-Ekraf direncanakan berlokasi di Kawasan Gurindam 12, Kota Tanjungpinang. Luas lahan Gedung UPT BPU-

Ekraf sebesar 6.643m². Pelaksanaan konstruksi Gedung UPT BPU-Ekraf direncanakan dilakukan dalam 2 tahap, di tahun 2024 dan di tahun 2025.



Gambar 7. Gambar Rencana Gedung UPT BPU-Ekraf di Kota Tanjungpinang

Kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana di Semester II Tahun 2024 terkait Pengembangan Sentra Kreatif Indonesia (SKI), antara lain:

- Penyelesaian Dokumen Perencanaan, meliputi gambar *Detailed Engineering Design* (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Spesifikasi Teknis;
- Pengesahan Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Ruang Kreatif pada tanggal 10 September 2024;
- Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Kabinet terkait surat pemberian izin pembangunan Gedung UPT-BPU Ekraf oleh Presiden RI.

Namun, pelaksanaan kegiatan ini belum dapat dilanjutkan karena adanya blokir anggaran akibat tidak dapat memenuhi dokumen pendukung berupa Surat Izin Pembangunan Gedung UPT-BPU Ekraf oleh Presiden RI.

4. Fasilitas Ruang Kreatif Daerah

Keluaran ini dihasilkan dari Tugas Pembantuan Kegiatan Fasilitas Pengembangan Infrastruktur Ruang Kreatif kepada 10 Kabupaten/Kota Penerima. Sasaran dari Tugas Pembantuan Kegiatan Fasilitas Pengembangan Infrastruktur Ruang Kreatif adalah

terlaksananya kegiatan dukungan pengembangan infrastruktur ruang kreatif di daerah berupa sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan bagi para pemangku kepentingan di sektor ekonomi kreatif untuk menstimulus pengembangan ekonomi kreatif daerah. Anggaran Dana Tugas Pembantuan Kegiatan Fasilitas Pengembangan Infrastruktur Ruang Kreatif Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.000.000.000,00 yang diberikan kepada 10 Kabupaten/Kota Penerima dengan nilai masing-masing Rp1.400.000.000,00.

Berikut daftar Kabupaten/Kota Pengampu Dana Tugas Pembantuan Kegiatan Fasilitas Pengembangan Infrastruktur Ruang Kreatif Tahun Anggaran 2024:

- Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
- Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
- Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat;
- Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;
- Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
- Kabupaten Depok, Provinsi Jawa Barat;
- Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
- Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur; dan
- Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.

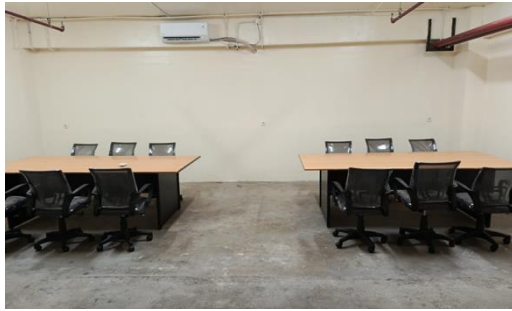
Dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang sudah menyelesaikan pekerjaan konstruksi dan pengadaan sarana, 1 (satu) diantaranya telah dilaksanakan Audit/Pemeriksaan oleh Inspektorat Kemenparekraf/Baparekraf untuk Kabupaten Cirebon. Sedangkan 9 (sembilan) Kabupaten/Kota lainnya masih menunggu konfirmasi jadwal dari Tim Audit Inspektorat. Pelaksanaan Audit oleh Inspektorat menjadi langkah awal dalam proses pemindahtanganan dan penyerahterimaan BMN.



Gambar 8. Kabupaten Bone Bolango



Gambar 9. Kabupaten Cirebon



Gambar 10. Kota Depok



Gambar 11. Kabupaten Bantul



Gambar 12. Kota Bitung



Gambar 13. Kabupaten Kuningan



Gambar 14. Kabupaten Majalengka



Gambar 15. Kabupaten Subang



Gambar 16. Kabupaten Ponorogo



Gambar 17. Kota Surakarta

Sejak tahun 2020, pemenuhan infrastruktur ekonomi kreatif telah diterima oleh pelaku ekonomi kreatif baik di Destinasi Pariwisata Prioritas, Destinasi Pariwisata Pengembangan, dan Revitalisasi Destinasi Pariwisata Bali. Destinasi Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, dan Bandung-Halimun-Cileteuh merupakan destinasi yang paling banyak mendapatkan bantuan infrastruktur ekonomi kreatif setiap tahunnya. Sedangkan destinasi yang belum mendapatkan infrastruktur ekonomi kreatif adalah Morotai, Batam-Bintan, Biak-Teluk Cendrawasih, dan Sambas-Singkawang. Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang dimaksud terdapat Sarana Ruang Kreatif, Fasilitas Ruang Kreatif, dan Tugas Pembantuan. Total ada sebanyak 820 penerima yang telah difasilitasi sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- 805 penerima Bantuan Pemerintah Sarana Ruang Kreatif pada tahun 2020 hingga 2023;
- 4 penerima Bantuan Pemerintah Revitalisasi Ruang Kreatif dalam bentuk *Creative Hub* pada tahun 2020 (1 unit), 2022 (2 unit), dan 2023 (1 unit); dan
- 11 penerima Tugas Pembantuan pada tahun 2022 (1 unit) dan tahun 2024 (10 unit).

Berikut adalah data sebaran penerima Infrastruktur Ekonomi Kreatif di 19 Destinasi sepanjang tahun 2020-2023, disampaikan dalam Tabel berikut :

Nama Destinasi		2020	2021	2022	2023
10 Destinasi Pariwisata Prioritas					
1.	Bangka Belitung	-	Sarana Ruang Kreatif: PT Cassava Industri Estat Tujuh Sembilan, Kab Bangka Tengah	-	-
2.	Borobudur dskt.	Sarana Ruang Kreatif: • Desa Pucang, Kab Magelang; • Desa Prajeksari, Kab Magelang	Sarana Ruang Kreatif: • CV Cipta Data Mandiri, Kab Magelang; • Rumah Makan Milik Kita, Kab Magelang	Sarana Ruang Kreatif: • ANSnack dan <i>Catering</i> , Kab Magelang; • Warung Bakmi Pak Kadis, Kab Magelang;	Sarana Ruang Kreatif: • CV Cipta Data Mandiri, Kab Magelang; • Rumah Makan Milik Kita, Kab Magelang
3.	Bromo-Tengger-Semeru	Sarana Ruang Kreatif: • CV <i>Informant</i> , Kota Malang; • LPMM Lumajang, Kab Lumajang	Sarana Ruang Kreatif: • Tumapel <i>Creative</i> , Malang; • Birendra Nawa Bhirawa, Kab Malang; • Cahaya Unitrans <i>Management</i> , Malang; • Forum Determinan Indonesia, Kota Malang; • Lembaga Pemuda Membangun Mansyarakat, Kab Lumajang;	Sarana Ruang Kreatif: • PT Indiekraf Indonesia Digital Kreatif, Kota Malang; • Bakti Nusa Mandiri, Kota Malang; • Bumi Bina Karya, Kota Malang; • CV Ediide Infografika, Kota Malang; • Lembaga Karya Buntaran Kidul, Kabupaten Malang; • Yayasan Srikandian, Kota Malang	Sarana Ruang Kreatif: • Birendra Nawa Bhirawa, Kab Malang; • Cahaya Unitrans <i>Management</i> , Malang; • Forum Determinan Indonesia, Kota Malang; • Tumapel <i>Creative</i> , Malang
4.	Danau Toba dskt.	-	Fasilitas Ruang Kreatif: • <i>Creative Hub</i> Samosir, Danau Toba	-	-
5.	Labuan Bajo-NTT	-	Fasilitas Ruang Kreatif: • Creative Hub Labuan Bajo	Fasilitas Ruang Kreatif: • <i>Creative Hub</i> Ruteng, Manggarai	-
6.	Lombok-Mandalika	Sarana Ruang Kreatif: • <i>Eco Design</i> Songket Alam, Lombok Tengah	-	Sarana Ruang Kreatif: • Multi Talenta Lombok Timur, Kab Lombok Timur; • Angglang Studio, Kota Mataram	Sarana Ruang Kreatif: • Pemerintah Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai Barat
7.	Manado-Likupang	-	Sarana Ruang Kreatif:	Sarana Ruang Kreatif:	-

Nama Destinasi		2020	2021	2022	2023
			<ul style="list-style-type: none"> PT Antarjo Produk Solut, Manado; UD Kartini Cakalang, Kota Manado; 	<ul style="list-style-type: none"> CV Great KL, Kota Manado 	
8.	Raja Ampat	-	Sarana Ruang Kreatif: <ul style="list-style-type: none"> Komunitas Imaji Papua, Kota Jayapura 	-	Sarana Ruang Kreatif: PT Kasuari Solusi Teknologi, Kab Sorong
9.	Wakatobi	-	Sarana Ruang Kreatif: <ul style="list-style-type: none"> Komunitas Lensa Wakatobi (LEKAT), Wakatobi 	-	-
8 Destinasi Pariwisata Pengembangan					
10.	Bandung-Halimun-Ciletuh	Sarana Ruang Kreatif: <ul style="list-style-type: none"> Yayasan Panca Raya Khatulistiwa, Kab Bandung; <i>South Legend</i>, Kab Bandung; <i>Dogged Materials</i>, Kota Bandung; CV Jagat Ilahi Multiniaga, Kab Bandung; PT Atom Rekadaya Cipta, Kota Bandung; PT Karya Pohon Emas, Kota Bandung; Garda Digital Indonesia, Kota Bandung; 	Sarana Ruang Kreatif: <ul style="list-style-type: none"> Perkumpulan Cimahi <i>Creative Action</i>, Kota Bandung; Perhimpunan Penggiat Angklung Indonesia, Bandung; <i>Audio Music Crew</i>, Kab Bandung Barat; CV. Riung Padjadjaran (Visualpaca.Id), Kab Bandung; CV Zelia, Kab Bandung; PT Sucore Amanah Berprestasi, Bandung; PT Manjada, Kab Bandung; PT Tesaputra Adiguna, Kota Bandung; Putra Mandiri Dua Gaming, Kab Bandung Barat; 	Sarana Ruang Kreatif: <ul style="list-style-type: none"> PT Pesona Citalutug Berdikari, Kab Bandung; <i>Bandung Trust Advisory Group</i>, Kota Bandung; <i>Campaka End Act Kue</i>, Kota Bandung; CV Abimanyu Raksa Pratama, Kota Bandung; CV Solusi Teknologi Cerdas, Kota Bandung; CV Vier Broers, Kota Bandung; De' Sundawi <i>Photography</i>, Kota Bandung; Kelas Garasi, Kota Bandung; Keripik Cimol Surili, Kab Bandung; Kopi Lembur, Kab Bandung; 	Sarana Ruang Kreatif: <ul style="list-style-type: none"> Perkumpulan Cimahi Creative Action, Kota Bandung; Perhimpunan Penggiat Angklung Indonesia, Bandung; <i>Audio Music Crew</i>, Kab Bandung Barat; CV Riung Padjadjaran (Visualpaca.id), Kab Bandung; CV Zelia, Kab Bandung; PT Manjada, Kab Bandung; Yayasan Habibi Bina Cendikia, Kab Bandung; Yayasan Insan Daya Berkah, Kota Bandung; Yayasan Rumah Cerdas Mulia, Kota Bandung;

Nama Destinasi		2020	2021	2022	2023
		<ul style="list-style-type: none"> • Argo Pesona Indonesia, Kota Bandung; • CV Karya Nugraha, Kab Bandung; • CV Prima Citra Sakti, Kota Bandung; • CV Camilla, Kota Bandung; • Intra Indotama Karya, Kota Bandung; • Yayasan Untuk Anak Negeri, Kota Bandung; • LSM <i>Smart And Creative People</i>, Kota Bandung; • Yayasan Persada Bandung, Kota Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> • Yayasan Amanat Pendidikan Rakyat Indonesia, Kota Bandung; • Yayasan Habibi Bina Cendikia, Kab Bandung; • Yayasan Insan Daya Berkah, Kota Bandung; • Yayasan Rumah Cerdas Mulia, Kota Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> • Kubik, Kab Bandung; • PT Chlorine Digital Kreator, Kota Bandung; • PT Chlorine Digital Media, Kota Bandung; • PT Chlorine Kreatif Studio, Kota Bandung; • PT Mitra Film Alditama, Kota Bandung; • PT Cakrawala Kusuma Indonesia, Kota Bandung; • PT Hanan Boga Rasa, Kota Bandung; • Renura Kids, Kota Bandung; • Yayasan Madrasah Keluarga Indonesia, Kota Bandung; 	
11.	Banyuwangi	-	-	Tugas Pembantuan: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Creative Hub</i> Banyuwangi 	-
12.	Bukittinggi-Padang	-	-	-	Sarana Ruang Kreatif: <ul style="list-style-type: none"> • Sapilin <i>Animation Studio</i>, Kota Padang
13.	Derawan-Berau	-	Sarana Ruang Kreatif: <ul style="list-style-type: none"> • CV Ulin Sari Lestari, Tanjung Redeb - Berau 	Sarana Ruang Kreatif: <ul style="list-style-type: none"> • <i>My Trip Media</i>, Kab Berau 	-
14.	Toraja-Makassar-Selayar	-	Sarana Ruang Kreatif:	Sarana Ruang Kreatif:	Sarana Ruang Kreatif:

Nama Destinasi		2020	2021	2022	2023
			• Lontara Panrita Indonesia, Makassar	• Jentera <i>Center</i> Indonesia, Kota Makassar	• Kristar, Tana Toraja; Lontara Panrita Indonesia, Makassar
1 Revitalisasi Destinasi Pariwisata Bali					
15.	Bali	Sarana Ruang Kreatif: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata Kota Denpasar; • Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar. 	Sarana Ruang Kreatif: <ul style="list-style-type: none"> • Pasraman Wrdhi Kumara Santhi, Kab Singaraja 	-	Sarana Ruang Kreatif: <ul style="list-style-type: none"> • Yayasan Sigar Mangsi Bali, Kab Gianyar; • Pemerintah Desa Batuan, Kab Gianyar; • Yayasan Deka Sentara, Kab Tabanan; • Bali Surgawi, Kota Denpasar

3.1.2 Tersedianya Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas yang Dikembangkan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Realisasi	Persentase Realisasi
Tersedianya Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas yang Dikembangkan	Jumlah Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas yang Dikembangkan	19 Destinasi	19 Destinasi	100%

Tabel 26. Realisasi Sasaran Program "Tersedianya Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas yang Dikembangkan"

Pada tahun 2024, realisasi sasaran program ini kembali memenuhi target sebanyak 100% sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kinerja "Tersedianya Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas yang Dikembangkan" memiliki target sejumlah 19 destinasi sesuai dengan RPJMN 2020-2024 yang terbagi menjadi 3 klasifikasi utama:

- 10 Destinasi Pariwisata Prioritas
- 8 Destinasi Pariwisata Pengembangan
- 1 Revitalisasi Destinasi Pariwisata Bali

Adapun 19 lokasi wilayah kerja tersebut tercantum pada Tabel 24, yang merupakan titik destinasi dengan potensi pariwisata yang baik dan memiliki kemampuan untuk mencapai hasil pengembangan yang baik dalam rentang waktu yang relatif singkat. Titik destinasi ini diharapkan untuk mampu meningkatkan kondisi pariwisata pada destinasi tempat titik destinasi tersebut berada. Intervensi pengembangan yang dilakukan berfokus pada tiga tema:

1. Keberagaman Tahapan Pengembangan Destinasi

11 Destinasi yang terbagi dalam 3 klasifikasi berdasarkan kondisi kepariwisataan yang berbeda, yaitu Destinasi Prioritas, Destinasi Pengembangan, dan Destinasi Revitalisasi. Destinasi Prioritas difokuskan pada percepatan pembangunan dan peningkatan tata kelola untuk memastikan kesiapan menjadi destinasi unggulan nasional. Klasifikasi selanjutnya, Destinasi Pengembangan difokuskan pada penguatan daya tarik pariwisata, baik dari sisi atraksi maupun pengelolaan yang mendukung pertumbuhan pariwisata lokal. Sementara Destinasi Revitalisasi berfokus pada penyesuaian dengan kebutuhan wisatawan terkini melalui pembaruan atraksi dan amenitas yang tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.

2. Penguatan Kolaborasi *Multi-Stakeholder*

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif memberikan hasil positif dalam pengembangan destinasi. Sinergisme program nasional dan daerah mampu menjawab kebutuhan daerah sekaligus berkontribusi di tingkat nasional. Sinergisme tersebut menjadi lebih efektif dari sekadar keluaran (*output*) tetapi mampu menjadi hasil (*outcome*) karena komunitas pariwisata menguatkan diri untuk berperan sebagai penggerak utama pada destinasi dengan merangkul sektor lain seperti pelaku ekonomi kreatif. Dengan kesadaran sebagai penggerak utama, maka rasa kepemilikan atas destinasi tersebut semakin meningkat hingga mampu memastikan keberlanjutan pengelolaan.

3. Keberlanjutan dan Pelibatan Komunitas Lokal

Dengan banyaknya destinasi berbasis alam dan budaya di wilayah kerja Pengembangan Destinasi II, maka keberlanjutan menjadi fokus utama dalam pengembangannya. Contoh nyatanya adalah Derawan dan Teluk Cendrawasih yang berhasil mengembangkan ekowisata untuk mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar. Secara khusus, pelibatan komunitas lokal untuk memanfaatkan potensi daerah mereka telah mampu memperkaya pengalaman wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan mereka di saat yang bersamaan. Untuk mendukung komunitas lokal tersebut, peningkatan kapasitas dan pelatihan spesifik menjadi hal yang krusial terhadap penguatan peran komunitas lokal dalam pengembangan destinasi.

Ketiga tema tersebut menjadi dasar untuk intervensi yang dilakukan di setiap destinasi. Secara lebih luas, intervensi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan melalui pengelolaan destinasi yang terstruktur. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, berikut adalah beberapa kategori program yang berdampak cukup signifikan:

1. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Destinasi

Tahapan pertama dalam pengembangan destinasi yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur adalah penyusunan dokumen perencanaan atau *masterplan* untuk setiap destinasi yang mencakup namun tidak terbatas pada:

- pemetaan daya tarik wisata
- analisis kebutuhan pengelolaan, dan
- perencanaan pengembangan

Perencanaan ini memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan sebuah destinasi, dengan memastikan bahwa setiap destinasi memiliki rencana yang jelas dan terarah. Penyusunan *masterplan* melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal dengan tujuan untuk membangun destinasi wisata yang berkelanjutan dan sesuai dengan potensi di destinasi tersebut dan lingkungan sekitarnya serta kebutuhan pasar yang ingin dicapai. *Masterplan* ini juga menjadi upaya memastikan pengembangan destinasi sejalan dengan visi pariwisata nasional dan dapat dijalankan oleh berbagai pihak, baik melalui APBN, APBD, atau kerjasama dengan sektor swasta.

Di tahun 2024, penyusunan *masterplan* dilaksanakan di 4 lokasi:

- Cemara Siu, *Geopark Rinjani*, Kab. Lombok Timur, NTB
Dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan DPSP Mandalika dengan tenaga ahli dari Universitas Mataram. Penyusunan ini juga melibatkan BP. *Geopark Rinjani*, DMO Sembalun, Asosiasi Pariwisata, Dispar Kab. Lombok Timur, dan Pemprov NTB sebagai *stakeholder* lokal. Gagasan utama *masterplan* ini adalah menjadikan Cemara Siu sebagai titik transit pagi wisatawan yang berkunjung ke *Geopark Rinjani*.



Gambar 18. Kegiatan Penyusunan Masterplan Cemara Siu

- Air Terjun Tekaian Telu, Kota Tomohon, Sulawesi Utara
Dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan DPSP Likupang dengan tenaga ahli dari Universitas Sam Ratulangi dan Unika De La Salle. Penyusunan ini juga melibatkan Pemdes Tinoor Satu dan Kinilow, perwakilan tokoh masyarakat, OPD Kota Tomohon, dan Pemprov Sulawesi Utara sebagai stakeholder lokal. Gagasan utama *masterplan* ini adalah penguatan Tomohon sebagai salah satu *Key Tourism Area* di Provinsi Sulawesi Utara.



Gambar 19. Kegiatan Penyusunan Masterplan Air Terjun Tekaan Telu

- Pulau Dodola, Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara
Dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan DPP Morotai dengan tenaga ahli dari P2Par ITB. Penyusunan ini juga melibatkan OPD Kab. Pulau Morotai dan Pemprov Maluku Utara sebagai *stakeholder* lokal. Gagasan utama *masterplan* ini adalah integrasi Pulau Dodola utama dengan Pulau kecil di sekitarnya, serta menjalankan amanat RIDPN DPP Morotai.



Gambar 20. Kegiatan Penyusunan Masterplan Pulau Dodola

- Pulau Kumala, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
Dilakukan dalam rangka mendukung Ibu Kota Negara (IKN) dengan tenaga ahli dari P2Par ITB dan Poltekpar Samarinda. Penyusunan ini juga melibatkan jajaran OPD Kab. Kutai Kartanegara dan Pemprov Kalimantan Timur sebagai *stakeholder* lokal. Gagasan utama *masterplan* ini adalah reaktivasi Pulau Kumala sebagai DTW yang dahulu pernah sangat aktif.



Gambar 21. Kegiatan Penyusunan Masterplan Pulau Kumala

Keempat *masterplan* tersebut diserahkan langsung oleh Menparekraf kepada perwakilan Pemerintah Kota/Kabupaten pada tanggal 14 Oktober 2024 di acara *Weekly brief with Sandi Uno*, di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona.

Dalam rangka mendukung pengembangan sebuah destinasi pariwisata salah satunya melalui penyusunan *masterplan*, maka juga dibutuhkan sebuah dokumen rencana jangka pendek atau rencana aksi berdasarkan kondisi terkini dari suatu destinasi pariwisata. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, telah melakukan penyusunan rencana aksi tersebut melalui kegiatan Desain Strategis Rencana Aksi (DSRA). Dengan tersusunnya DSRA, harapannya seluruh pihak yang terkait, bisa melakukan evaluasi dan pengukuran pengembangan sebuah destinasi pariwisata secara berkala

untuk kemudian dilakukan perumusan kembali demi tercapainya kondisi destinasi pariwisata yang sesuai dengan dokumen masterplan yang udah dibuat sebelumnya, dalam waktu yang sudah diproyeksikan. Poin yang menjadi perhatian rencana aksi ini adalah:

- Profil destinasi
- Tahapan pengembangan
- Indikasi program dan kegiatan pengembangan

Pada tahun 2024 penyusunan DSRA ini dilakukan di 4 lokasi, yaitu:

- Provinsi Sumatera Utara
Dilaksanakan penyusunan DSRA Pengembangan Desa Wisata Terpadu Kawasan Pulau Sibandang sebagai dukungan terhadap *Geosite Geopark Toba Caldera*.
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dilaksanakan penyusunan DSRA Pengembangan Desa Wisata Terpadu Pulau Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung sebagai dukungan terhadap DPP Bangka Belitung.
- Provinsi Jawa Tengah
Dilaksanakan penyusunan DSRA Pengembangan Desa Wisata Terpadu Kabupaten Sleman sebagai dukungan terhadap KSPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan dskt.
- Provinsi Jawa Barat
Dilaksanakan penyusunan DSRA Pengembangan Desa Wisata Terpadu Kabupaten Lebak sebagai dukungan terhadap Pengembangan *Geopark Bayah Dome*.

2. Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pariwisata merupakan komponen utama dalam keberlanjutan pengelolaan destinasi, salah satunya melalui penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan untuk masyarakat lokal, yang bertujuan untuk memberikan keterampilan bagi yang dibutuhkan dalam rangka mengelola destinasi, termasuk manajemen destinasi, pemasaran, pelayanan wisata, dan pengelolaan usaha berbasis pariwisata. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan bimbingan teknis

(bimtek) dan pelatihan ini, bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan destinasi tidak hanya menguntungkan pihak yang langsung terlibat di sektor pariwisata, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal secara inklusif melalui penciptaan lapangan kerja, dan perbaikan kualitas hidup.

Secara umum, peningkatan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan:

- a. Pemetaan potensi
- b. Penyusunan rencana aksi
- c. Peningkatan pengetahuan masyarakat atau SDM

Pada tahun 2024, terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan untuk masyarakat lokal, dalam rangka penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pariwisata, yang dilakukan di beberapa daerah, yakni:

a. Provinsi Aceh

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kabupaten Aceh Besar, dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2024, bertempat di Hotel Pade, yang dihadiri oleh sebanyak 50 peserta.

b. Provinsi Sumatera Utara

- Bimbingan Teknis Pengelolaan Wisata Ramah Muslim di Destinasi Pariwisata Kabupaten Langkat dilaksanakan di *The Heritage Resort & Restaurant* Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, dilakukan pada tanggal 11 Juni 2024, yang dihadiri oleh sebanyak 80 peserta.
- Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Destinasi Pariwisata di Kabupaten Nias Utara, dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2024, bertempat di *Training Center* Osseda, yang dihadiri oleh sebanyak 50 peserta.

c. Provinsi Sumatera Selatan

- Pada tanggal 12 Agustus 2024 di Hotel Harper By Aston Palembang dilaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Wisata Ramah Muslim di Destinasi

Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, yang dihadiri oleh sebanyak 50 peserta.



Gambar 22. Bimtek Pengelolaan Wisata Ramah Muslim di Destinasi Pariwisata Prov. Sumsel

d. Provinsi Kepulauan Riau

- Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Bagi Pengelola Destinasi Pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau, dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2024, bertempat di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Kota Batam, dengan menghadirkan sejumlah 50 peserta untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini.



Gambar 23. Bimtek Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Bagi Pengelola Destinasi Pariwisata di Prov. Kepri

- Pada tanggal 7-8 Agustus 2024, telah dilakukan Koordinasi Pengembangan Destinasi di Kota Batam, TWA Muka Kuning Kota Batam dan Pulau Sugi dskt, yang berlokasi di Hotel Yellow Batam, dengan dihadiri oleh sebanyak 50 peserta.



Gambar 24. Koordinasi Pengembangan Destinasi di Kota Batam, TWA Muka Kuning Kota Batam dan Pulau Sugi dskt

e. Provinsi Jambi

- Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pengelola Homestay di Kab. Merangin, Provinsi Jambi, dilaksanakan pada tanggal

15 Mei 2024, bertempat di Hotel Aston Jambi, Kota Jambi, yang dihadiri oleh sebanyak 50 peserta.



Gambar 25. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pengelolaan Homestay di Kab. Merangin, Prov. Jambi

f. Provinsi Banten

- Pada tanggal 8 Mei 2024, dilaksanakan Bimtek Peningkatan Kapastias Pengelola Kampung Wisata di Kab. Lebak, yang dihadiri oleh sebanyak 50 peserta, yang bertempat di Hotel Horison Lebak.

g. Provinsi Jawa Barat

- Bimbingan Teknis Penguatan Tata Kelola dan Jejaring Destinasi Pariwisata Ramah Muslim Di Desa Wisata Kabupaten Tasikmalaya, dilaksanakan dengan menghadirkan sebanyak 50 peserta, pada tanggal 14 Juni 2024, bertempat di Hotel Alhambra.
- Pada tanggal 6-7 Maret 2024, Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Pengembangan Desitnasi I, yang dilaksanakan di Hotel *Holiday Inn* Pasteur Bandung, dengan dihadiri oleh peserta secara *online* dan *Offline*.
- Pada tanggal 2 Juni 2024, pelaksanaan Bimbingan Teknis Penguatan Tata Kelola dan Jejaring Destinasi Pariwisata Ramah Muslim di Kampung Wisata Kota Cirebon, dilakukan di *The Luxton* Cirebon Hotel & Convention, yang dihadiri oleh sebanyak 50 peserta.

- Kegiatan *Ground Breaking* Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2024, bertempat di Leuwimunding.
 - Pada tanggal 5 Juli 2024, Bimtek Penguatan Tata Kelola dan Jejaring Destinasi Pariwisata Ramah Muslim di Desa Wisata Kabupaten Majalengka, yang dilaksanakan di Leuwimunding, dengan diikuti oleh sebanyak 50 peserta.
 - *Workshop* Peningkatan Kualitas Kunjungan *Visitor Experience* pada Destinasi Wisata *Heritage* Keraton Kasepuhan Cirebon, dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2024, bertempat di Keraton Kasepuhan Cirebon, yang dihadiri oleh sebanyak 50 peserta.
- h. Provinsi Jawa Tengah
- Bimtek Peningkatan Kualitas Tata Kelola Desa Wisata di Kabupaten Wonogiri, dilaksanakan di *Green Resort* Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, pada tanggal 29 Mei 2024, yang diikuti oleh sebanyak 80 peserta.
- i. Provinsi Jawa Timur
- Pada tanggal 11 Februari 2024, dilaksanakan Bimtek Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi dan Produk Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sidoarjo, yang dilaksanakan di Luminor Hotel, Sidoarjo, dengan dihadiri oleh sebanyak 100 peserta.
 - Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Desa Wisata yang Berkelanjutan di Kabupaten Probolinggo, Prov. Jawa Timur, dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024.
- j. Nusa Tenggara Timur
- Labuan Bajo
Kegiatan ini merupakan dukungan lanjutan dari Dit. Pengembangan Destinasi II yang diawali dengan penyusunan masterplan DTW Pulau Mules TA 2023, dan fasilitasi DAK Fisik Pariwisata TA 2024. Pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh 50 orang peserta yang terdiri dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pengelola desa dan tokoh masyarakat dari Desa Nuca Molas, Desa Golo Loni, Desa Todo, Desa

Ruteng Pu'u, Desa Liang Bua, Desa Waerebo dengan narasumber Bapak Anwar Sani (Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran) dan Bapak Rusli (Ketua Pokdarwis Pulau Untung Jawa).



Gambar 26. Bimbingan Teknis Penguatan Jejaring dan Tata Kelola Destinasi Pariwisata di DPSP Labuan Bajo dan Sekitarnya

- Samarinda

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman arah kebijakan dan strategi pengembangan destinasi/desa wisata di wilayah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, meningkatkan kapasitas pengelola destinasi/desa wisata dalam upaya peningkatan kualitas kebersihan desa wisata, meningkatkan jejaring kerja sama para pengelola destinasi/desa wisata untuk koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait agar pengembangan destinasi/desa wisata bersih dapat berjalan secara efektif dan efisien.



Gambar 27. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Desa Wisata dan Toilet Bersih di Kota Samarinda

- Raja Ampat

Narasumber yang memberikan materi dalam kegiatan ini adalah Ibu Ellen Risamasu selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Ibu Jenny Ratna Suminar selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, Ibu Meidiarti Kasmedi selaku *Tourism and Capacity Building Manager* Konservasi Indonesia, Ibu Stefani Arwakon selaku Pengelola *Homestay* di Kawasan *Geosite* Wayag dan Bapak Irwan Tamrin selaku CEO *wisatasekolah.com*. Peserta yang hadir terdiri dari 50 orang yang terdiri dari pengelola *homestay*, pengelola desa wisata, serta pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dari beberapa wilayah meliputi Waisai, Saporkren, Arborek, Warsambin, Yenbuba, Mansuar, Saukabu, Pam, Piaynemo, dan Wayag.



Gambar 28. Bimbingan Teknis Peningkatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata di Kawasan Raja Ampat

3. Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Pengelolaan destinasi yang efektif memerlukan kolaborasi antar berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Program penguatan jejaring tata kelola destinasi bertujuan untuk membangun sistem koordinasi yang baik antara *stakeholder* terkait, sebagai kunci untuk pengelolaan destinasi dilakukan dengan lebih efisien dan berkelanjutan. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan program untuk pengembangan destinasi dapat dijalankan secara terkoordinasi, mempercepat pencapaian tujuan pariwisata, serta meminimalkan potensi konflik atau tumpang tindih dalam pelaksanaan program.

Selama 2024, sebanyak 17 dari 19 destinasi mendapatkan penguatan jejaring tata kelola destinasi pariwisata. Destinasi yang tidak mendapatkan penguatan ini adalah Morotai dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kedua daerah tersebut di tahun 2024 sedang difokuskan menguatkan perencanaan untuk dilaksanakan di tahun-tahun mendatang.



Gambar 29. Forum Penguatan Jejaring Pengelolaan Desa Wisata di Kab. Merauke, Prov. Papua Selatan



Gambar 30. Forum Penguatan Jejaring Pengelolaan Desa Wisata Wilayah Perbatasan Negara di Prov. Kalimantan Barat



Gambar 31. Penguatan Jejaring Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Digital di Bali

4. Dukungan Pengembangan Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas

Salah satu dari 4 pilar pariwisata adalah destinasi, dan 3 unsur yang membangun destinasi adalah Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas. Pengembangan 3A tersebut cukup bergantung pada sarana dan prasarana yang tersedia. Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur memberikan dukungan pengembangan 3A kepada suatu destinasi dengan diawali oleh rapat koordinasi untuk memastikan kebutuhan pengembangan dan kesiapan lintas sektor untuk keberlanjutan pemanfaatan dukungan pengembangan tersebut. Dukungan pengembangan ini bersifat sebagai stimulan yang mendorong pengembangan oleh pengelola destinasi, bukan sebagai modal utama dalam pengembangan.

4 kategori program tersebut terus dilakukan dalam berbagai bentuk dan judul semenjak 2020-2024. Untuk tahun 2024, berikut adalah daftar intervensi terkait IKSP “Tersedianya Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas yang Dikembangkan” yang dilakukan di 19 Destinasi:

DESTINASI	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
DANAU TOBA	<p>Penyusunan DSRA Pengembangan Desa Wisata Terpadu Kawasan Pulau Sibandang sebagai Geosite Geopark Toba Caldera</p> <p>Rapat pembahasan <i>Issue</i> dan Lokus Penyusunan DSRA Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Desa Wisata Terpadu Kawasan Pulau Sibandang Sebagai Geosite Geopark Toba Caldera</p> <p>FGD (Ke-2) Pembahasan laporan akhir penyusunan <i>Design</i> Strategi Rencana Aksi (DSRA) Pengembangan Desa Wisata Terpadu Kawasan Pulau Sibandang Sebagai Geosite Geopark Toba Caldera</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Workshop</i> Tata Kelola Destinasi dan Desa Wisata di Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara 2. <i>Workshop</i> Tata Kelola Destinasi dan Desa Wisata di Kota medan, Prov. Sumatera Utara 3. Sosialisasi Tata Kelola Destinasi Pariwisata Dan Desa Wisata di Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara 4. <i>Workshop</i> Tata Kelola Destinasi dan Desa Wisata di Prov. Sumatera Utara 5. Sosialisasi Tata Kelola Destinasi Pariwisata Dan Desa Wisata di Kota Medan, Prov. Sumatera Utara 6. Forum Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Jejaring Destinasi Kab. Langkat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Wisata Ramah Muslim di Destinasi Pariwisata Kabupaten Langkat 2. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Destinasi Pariwisata di Kabupaten Nias Utara 	-

DESTINASI	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
BOROBUDUR	<p>Penyusunan DSRA Pengembangan Desa Wisata Terpadu Kabupaten Sleman di KSPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan dskt</p> <p>Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Desa Wisata Terpadu Kabupaten Sleman di KSPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan dskt</p> <p>Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT Ke-2) Finalisasi Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Desa Wisata Terpadu Kabupaten Sleman di KSPN Borobudur -Yogyakarta - Prambanan dskt</p>	<p>1. Forum Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Jejaring Destinasi Kampung Wisata Tematik Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah</p> <p>2. Forum Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Jejaring Destinasi Kampung Wisata Tematik Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah</p>	Bimtek Peningkatan Kualitas Tata Kelola Desa Wisata di Kabupaten Wonogiri, Prov. Jawa Tengah	-
BANGKA BELITUNG	<p>Penyusunan DSRA Desa Wisata Terpadu Pulau Bangka Belitung</p> <p>1. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Desa Wisata Terpadu Pulau</p>	-	-	Pemberian Dukungan Sarana Destinasi Wisata di Desa Wisata Kreatif Terong, Kab. Belitung, Prov. Kep. Bangka Belitung

DESTINASI	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
	Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. FGD (Ke-2) Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Desa Wisata Terpadu Pulau Bangka, Prov Kep. Bangka Belitung			
BUKITTINGGI-PADANG	-	Forum Penguatan Jejaring Desa Wisata di Kota Padang, Prov. Sumatera Barat	-	-
BATAM-BINTAN	-	Koordinasi Pengembangan Destinasi di Kota Batam	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Bagi Pengelola Destinasi Pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau	-
BANDUNG-HALIMUN-CILETUH	Penyusunan DSRA Pengembangan Desa Wisata Terpadu Kabupaten Lebak Untuk Mendorong Pengembangan Geopark Bayah Dome	1. Forum Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kab. Lebak, Prov. Banten 2. Forum Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Jejaring Dea Wisata di Kab.	1. Bimtek Peningkatan Kapastias Pengelola Kampung Wisata di Kab. Lebak, Prov. Banten 2. Bimbingan Teknis Penguatan Tata Kelola dan Jejaring Destinasi Pariwisata Ramah Muslim	-

DESTINASI	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
	<p>1. FGD 1 Penyusunan DSRA Pengembangan Desa Wisata Terpadu Kabupaten Lebak Untuk Mendorong Pengembangan <i>Geopark</i> Bayah <i>Dome</i></p> <p>2. FGD (Ke-2) Finalisasi Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Desa Wisata Terpadu Kabupaten Lebak Untuk Mendorong Pengembangan <i>Geopark</i> Bayah <i>Dome</i></p>	<p>Sukabumi, Prov. Jawa Barat</p> <p>3. Forum Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata di Kota Bandung, Prov. Jawa Barat</p> <p>4. Forum Penguatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata di Desa Wisata Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat</p> <p>5. Forum Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata di Desa Wisata Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat</p> <p>6. Forum Penguatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata di Desa Wisata Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat</p> <p>7. Forum Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dan Jejaring Destinasi Wisata di Kab. Bandung Barat, Prov. Jawa Barat</p> <p>8. Forum Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dan Jejaring Destinasi Wisata di</p>	<p>di Kampung Wisata Kota Cirebon, Prov. Jawa Barat</p>	

DESTINASI	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
		Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat 9. Forum Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dan Jejaring Destinasi Wisata di Kota. Bandung, Prov. Jawa Barat 10. Forum Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dan Jejaring Destinasi Wisata di Kab. Bandung Barat, Prov. Jawa Barat 11. Forum Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dan Jejaring Destinasi Wisata di Kota. Bandung Barat, Prov. Jawa Barat 12. Rakor Teknis Direktorat Pengembangan Desitnasi I di Kota Bandung, Prov. Jawa Barat 13. Forum Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Jejaring Destinasi Pariiwsata Kota Bandung 14. Forum Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Jejaring Destinasi Pariwisata Kota Bandung		

DESTINASI	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
		15. Forum Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Jejaring Destinasi Pariwisata Kab. Bandung 16. Forum Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Jejaring Destinasi Pariwisata Kota Bandung 17. Forum Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Jejaring Destinasi Pariwisata Kota Serang 18. Forum Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Jejaring Destinasi Pariwisata Kab. Lebak 19. Forum Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Jejaring Destinasi Pariwisata Kab. Lebak 20. Forum Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Jejaring Destinasi Pariwisata Kab. Lebak 21. Forum Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Jejaring Destinasi Pariwisata Kab. Bandung Barat		

DESTINASI	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
		22. Forum Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Jejaring Destinasi Pariwisata Kab. Bandung Barat		
BROMO-TENGER-SEMERU	-	1. Forum Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Jejaring Destinasi Pariwisata Kota Malang 2. Forum Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Jejaring Destinasi Pariwisata Kota Batu	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Desa Wisata yang Berkelanjutan di Kabupaten Probolinggo, Prov. Jawa Timur	-
BANYUWANGI	-	FGD Konektivitas Banyuwangi - Bali Barat di Kabupaten Banyuwangi	-	-

Tabel 27. Program di 8 Destinasi pada Wilayah Pengembangan Destinasi I Tahun 2024

<i>DESTINASI</i>	<i>PERENCANAAN</i>	<i>KOORDINASI / JEJARING</i>	<i>BIMBINGAN TEKNIS</i>
MANDALIKA	Penyusunan <i>Masterplan</i> Kawasan Geopark Rinjani, Kab. Lombok Timur, NTB	1. <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) Penguatan Jejaring dan Atraksi Wisata Desa di DSP Mandalika dan Sekitarnya di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB	-
LABUAN BAJO	-	1. Forum Penguatan Jejaring Tata Kelola Desa Wisata di Kab. Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur 2. Forum Penguatan Jejaring Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Budaya di Kabupaten Kupang Provinsi NTT	1. Bimbingan Teknis Penguatan Jejaring dan Tata Kelola Destinasi Pariwisata di DPSP Labuan Bajo dan Sekitarnya
LIKUPANG	Penyusunan <i>Masterplan</i> DTW Air Terjun Tekaan Telu, Kota Tomohon, Prov. Sulawesi Utara	1. Forum Penguatan Jejaring Pengelolaan Desa Wisata di DSP Likupang Provinsi Sulawesi Utara 2. Forum Penguatan Jejaring Pengelolaan Desa Wisata Di Kabupaten Minahasa 3. Forum Penguatan Jejaring Pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara 4. Forum Penguatan Jejaring Pengelolaan Destinasi Wisata Bahari Berbasis Pariwisata Berkelanjutan di Manado, Provinsi Sulawesi Utara	-
WAKATOBI	-	1. Forum Penguatan Jejaring Pengelolaan Desa Wisata di Kab. Konawe Selatan	-

<i>DESTINASI</i>	<i>PERENCANAAN</i>	<i>KOORDINASI / JEJARING</i>	<i>BIMBINGAN TEKNIS</i>
RAJA AMPAT	-	1. Forum Penguatan Jejaring Pengelolaan Destinasi Pariwisata Melalui Pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Sorong	-
MOROTAI	Penyusunan <i>Masterplan</i> DTW Pulau Dodola, Kab. Pulau Morotai, Prov. Maluku Utara	-	-
SAMBAS - SINGKAWANG	-	1. Forum Penguatan Jejaring Pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat 2. Bimbingan Teknis Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Forum Penguatan Jejaring Pengelolaan Desa Wisata Wilayah Perbatasan Negara di Provinsi Kalimantan Barat	-
DERAWAN - BERAU	Penyusunan <i>Masterplan</i> DTW Pulau Kumala, Kota Tenggarong, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur	1. Forum Penguatan Jejaring Tata Kelola Desa Wisata di Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur 2. Forum Penguatan Jejaring Tata Kelola Desa Wisata di Provinsi Kalimantan Timur 3. Forum Penguatan Jejaring Tata Kelola Desa Wisata di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur	-

<i>DESTINASI</i>	<i>PERENCANAAN</i>	<i>KOORDINASI / JEJARING</i>	<i>BIMBINGAN TEKNIS</i>
TORAJA - MAKASSAR - SELAYAR	-	1. Forum Penguatan Jejaring Tata Kelola Desa Wisata di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan 2. Forum Penguatan Jejaring Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Ekowisata di Kabupaten Maros 3. Forum Penguatan Jejaring Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Budaya di Kab. Toraja Utara 4. Bimtek Pengelolaan Destinasi dan Inovasi Penyusunan Paket Wisata di Kab. Kepulauan Selayar, Prov. Sulawesi Selatan 3. Bimtek Penguatan Jejaring dan Tata Kelola Desa Wisata Berbasis Geopark di Maros-Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan	-
BIAK - TELUK CENDRAWASIH	-	1. Pendampingan pengusulan Dana Alokasi Khusus Bidang Pariwisata TA. 2024 di DTW Pantai Samau, Kab. Biak Numfor	-
BALI	-	1. Forum Penguatan Jejaring Tata Kelola Desa Wisata Serangan, Kota Denpasar, Provinsi Bali 2. Forum Penguatan Jejaring Pengelolaan Desa Wisata Berkelanjutan di Kab. Badung Provinsi Bali 3. Penguatan Jejaring Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Digital di Bali	-

Tabel 28. Program di 11 Destinasi pada Wilayah Pengembangan Destinasi II Tahun 2024

Intervensi yang dijalankan pada tahun 2024 merupakan keberlanjutan dari intervensi yang dijalankan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini merupakan upaya Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur untuk mewujudkan ekosistem yang berkelanjutan melalui pengelolaan destinasi yang terstruktur. Intervensi yang dilakukan secara bertahap merupakan sebuah implementasi nyata dan sebuah contoh dari pengembangan destinasi yang disesuaikan dengan kondisi terkini demi tercapainya perwujudan kondisi destinasi yang sesuai *masterplan* secara efisien.

Seluruh program yang dijalankan oleh Kemenparekraf/Baparekraf melalui Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur tidak akan bisa memberikan hasil (*outcome*) yang berkelanjutan jika tidak didukung oleh pihak lain. Seperti pada tema pertama tentang perencanaan, implementasi perencanaan sangat bergantung pada eksekusi yang dijalankan oleh pengelola destinasi, utamanya terkait pendanaan untuk mewujudkan perencanaan tersebut dengan melibatkan DAK, APBD, kerjasama dengan swasta, atau sumber lainnya. Kemudian pada tema kedua tentang SDM, kebutuhan pasar akan terus berubah seiring waktu. Alokasi pemenuhan SDM pada setiap standar kemampuan adalah salah satu yang sangat perlu diperhatikan. Terakhir, pada tema ketiga tentang kolaborasi, yang sangat penting untuk memastikan seluruh pihak tetap berada pada satu tujuan yang sama dan berkomitmen mewujudkannya.

Target capaian dan langkah-langkah tersebut sudah terdokumentasi secara implisit maupun eksplisit pada dokumen perencanaan dengan indikator yang jelas. Semua pihak yang berkepentingan diharapkan untuk tetap memegang teguh perencanaan yang telah dibuat agar pengembangan destinasi dapat mencapai target yang diinginkan dengan tepat waktu. Sehingga semua yang telah dikerjakan tidak menjadi sia-sia dan masyarakat lokal destinasi secara khusus serta masyarakat Indonesia secara umum dapat merasakan hasil pembangunan pariwisata secara inklusif dan menyeluruh. Berikut adalah daftar kegiatan yang dilaksanakan Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dalam rangka memenuhi IKU “Tersedianya Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas yang Dikembangkan” tahun 2020-2023:

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
DANAU TOBA	2021	Penyusunan <i>Profiling</i> Pengembangan Desa Wisata Maninjau	Dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Destinasi Super Prioritas	-	Revitalisasi Toilet di Destinasi Pariwisata Super Prioritas
	2022	1. Pendukung Penyusunan Dokumen <i>Masterplan</i> dan Siteplan Ekowisata Girsang, Kabupaten Simalungun, Desa Wisata Pangambatan-Kabupaten Karo 2. Dukungan pada kegiatan <i>Youth Gathering</i> Naposobulung HKBP Distrik IV Toba 2022 Kabupaten Toba.	1. Kegiatan pendukung kegiatan Tour de Bakti Raja di kabupaten Humbang Hasundutan 2. Promosi dan pemasaran pariwisata di kawasan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba	1. Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata Kabupaten Parapat 2. Pelatihan <i>digital marketing</i> dan <i>ecommerce</i> bagi pelaku usaha UMKM kawasan danau toba. 3. Seminar penguatan digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah di pelabuhan ajiabata toba (it del dan bpodt). 4. Sian hita tu hita komitmen bersama untuk kemajuan UMKM kawasan danau toba. 5. Bimbingan teknis tentang pelayanan kepariwisataan bagi masyarakat di sekitar geopark kaldera toba.	1. Revitalisasi Toilet Pariwisata di Gedung Nasional Djauli Manik-Sidikalang Kabupaten Dairi, Pusat Informasi Geopark Kaldera Toba Sigulati Samosir. 2. Revitalisasi Destinasi <i>Monkey Forest</i> di <i>Geosite</i> Sibaganding Parapat Kabupaten Simalungun. 3. Pembangunan TIC di <i>Geopark</i> Silokek Kabupaten Sijunjung. 4. Dukungan perlengkapan Sarhunta <i>Homestay</i> di Hutaraja Lumban Suhi Suhi dan Huta Siallagan Samosir. 5. Pendukung kegiatan Seni <i>Etnic Musik</i> Jam Samosir yang dilaksanakan di Sipinggan Beach Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir pada tanggal 26 Maret 2022.

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
	2023	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Jejaring Destinasi Desa Wisata di Medan, Prov. Sumatera Utara. 2. Forum Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Jejaring Destinasi Desa Wisata di Medan, Prov. Sumatera Utara. 3. Workshop Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Jejaring Destinasi Desa Wisata di Medan, Prov. Sumatera Utara 4. Bimbingan Teknis Tata Kelola Destinasi Pariwisata: Aspek Perencanaan Daya Tarik Wisata di DSP Danau Toba di Humbahas, Provinsi Sumatera Utara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Dukungan Perlengkapan Sarhunta/<i>Home-stay</i> Di DSP Danau Toba Tahun Anggaran 2023 Di Desa Lumban Gaol Dan Desa Sariburaja Janji Maria, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. 2. Penyerahan Dukungan 3A (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas) Sarana Perlengkapan Susur Goa di Daya Tarik Wisata (DTW) Seribu Goa Banuarea, Desa Banuarea Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan
BOROBUDUR	2021	-	Dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Destinasi Super Prioritas	FGD Pengembangan desa wisata	Revitalisasi Toilet di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Dukungan Sarana Dan Prasarana Sarhunta/ <i>Homestay</i> Di Desa Wisata

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
	2022	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Video Pendek Materi Promosi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul 2. Pembuatan Majalah Joglosemar <i>Travel Guide</i>, Joglosemar. 3. Pembuatan Katalog Produk Ekraf di Kabupaten Magelang, Kabupateng Magelang. 4. Konsinyering Buku Kado 5 Tahun BOB untuk Kepariwisata Joglosemar, Porta Hotel Yogyakarta. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Pengelolaan Homestay di Kawasan Prioritas Borobudur. 2. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Penyusunan <i>Roadmap</i> Desa Wisata di Kawasan Prioritas Borobudur. 3. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Penyusunan Kajian Pengelolaan <i>Homestay</i> di Kawasan Prioritas Borobudur. 4. Bimbingan Teknis Tata Kelola Destinasi Borobudur <i>Trail of Civilization</i>. 5. <i>Roadmap</i> Desa Wisata di Kawasan Prioritas Borobudur. 6. <i>Focus Group Discussion</i> Digitalisasi Bisnis, Galeri Prawirotaman, Yogyakarta. 7. <i>Focus Group Discussion</i> Pemasaran Digital Ekonomi Kreatif, Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penciptaan Tari Gelangprojo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kulonprogo. 1. Fasilitasi Toilet dan Sanitasi Desa Tinalah, Purwoharjo, Samigaluh, Kulonprogo.

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
				<p>8. <i>Focus Group Discussion</i> Kabupaten Sragen, Hotel Surya Sukowati Sragen.</p> <p>9. <i>Famtrip</i> Kabupaten Sragen, Museum Purba Sangiran – Desa Batik Pilang – Kawasan Gunung Kemukus.</p> <p>10. <i>Monitoring Rebranding</i> Evaluasi Gunung Kemukus, Kabupaten Sragen.</p> <p>11. <i>Focus Group Discussion</i> Rebranding Produk Ekonomi Kreative, Omah Plntar Kabupaten Sleman.</p> <p>12. Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Kreatif Fesyen di Kawasan Pariwisata Borobudur.</p> <p>13. Peningkatan Pendampingan dan Fasilitasi Pendaftaran NIB bagi UMKM di Desa Wisata Penyangga Zona Otorita.</p> <p>14. Pelatihan dan Sertifikasi <i>Hospitality</i> Sumber Daya Manusia Parekraf di Desa</p>	

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
				<p>Wisata Penyangga Zona Otorita Borobudur, Kota Yogyakarta.</p> <p>15. FGD Fasilitasi Peningkatan Kualitas Amenitas Kawasan Pariwisata Borobudur melalui Sayembara Deasin, Kawasan Pariwisata Borobudur.</p> <p>16. Kampanye Angkutan Wisata Bersih Lingkungan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur, Taman Wisata Candi Borobudur.</p>	
	2023	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. BOB <i>Forest Run</i>, Purworejo, Jawa Tengah. 2. BOB <i>Downhill Competition</i>, Purworejo, Jawa Tengah. 3. Pegadaian Borobudur Trail Run, Magelang Jawa Tengah. 4. Pelaksanaan <i>Sound Pine</i> Musik Biru. 5. Pendukung ASITA <i>Volcano Cycling</i>. 6. <i>Event</i> Promosi Desa Wisata Pandanrejo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tata Kelola Desa Wisata di Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta 2. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Desa Wisata di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah 3. Pelatihan dan Pendampingan Penguatan Produk Parekraf di Kawasan Pariwisata Borobudur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Serah Terima Dukungan Sarana Pengembangan Atraksi di Destinasi Wisata Kaliurang, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta. 2. Serah Terima Dukungan Sarana Visibilitas Geopark di <i>Geopark</i> Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
			7. Wonosobo <i>Tourism and Business Forum</i> 2023. 8. Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada <i>Event Expo Internasional Asean Tourim Forum</i> 2023. 9. Penguatan Jejaring Pemasaran Kawasan Pariwisata Borobudur. 10. Promosi DPN Jogjakarta-Borobudur. 11. Penyusunan Strategi Pemasaran Kawasan Pariwisata Borobudur. 12. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Dengan Badan Pelaksana Otorita Borobudur	4. Pendampingan dan Fasilitasi Pengembangan Pelaku Usaha Mikro Kecil secara Komprehensif di Desa Wisata Penyangga Zona Otorita Borobudur 5. Pelatihan dan Sertifikasi Hospitality SDM Parekraf di Kawasan Pariwisata Borobudur 6. Bimbingan Teknis Tata Kelola Destinasi Desa Wisata di <i>Geopark</i> Kebumen 17. DED Infrastruktur Jaringan Air Baku dan Limbah di Kawasan Borobudur <i>Highland</i>	
BANGKA BELITUNG	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	Survei dan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Penyusunan	-

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
				Dokumen Perencanaan (<i>Masterplan</i>) Daya Tarik Wisata di Kawasan Pantai Lampu, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Selatan.	
	2023	-	-	Focus Group Discussion (FGD) I Penyusunan Perencanaan Daya Tarik Wisata Pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Bangka Belitung	Pemberian Dukungan Sarana Destinasi Wisata di Desa Wisata Kreatif Terong, Kab. Belitung, Prov. Kep. Bangka Belitung.
BUKITTINGGI-PADANG	2020	-	-	-	-
	2021	Penyusunan <i>Profiling</i> Pengembangan Desa Wisata Maninjau	-	-	-
	2022	Pendukung Penyusunan Dokumen Rencana Induk (<i>Masterplan</i>) Daya Tarik Wisata di KSPN Danau Maninjau	-	1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Destinasi melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Paket Wisata di Sumatera Barat. 2. Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penyusunan Rencana Induk (<i>Masterplan</i>) Daya Tarik	-

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
				Wisata (DTW) di KSPN Danau Maninjau, Sumatera Barat. 3. Sosialisasi Hasil Penyusunan Rencana Induk (<i>Masterplan</i>) Daya Tarik Wisata (DTW) di KSPN Danau Maninjau, Kabupaten Agam-Sumatera Barat.	
	2023	-	-	Bimtek Pemetaan Potensi Desa Wisata di KSPN Bukittinggi dan sekitarnya di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat	Pemberian Dukungan Sarana dan Prasarana <i>Homestay</i> di Desa Wisata Kab.Agam, Provinsi Sumatera Barat.
BATAM-BINTAN	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	Survei dan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Penyusunan Dokumen Perencanaan (<i>Masterplan</i>) Daya Tarik Wisata/Desa Wisata di Kawasan Pantai Trikora, Kab. Bintan, Prov. Kepulauan Riau.	Dukungan Sarana Perahu Mesin dan <i>Life Jacket</i> untuk Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip, Kota Batam.

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
	2023	-	-	-	Pemberian Dukungan Sarana Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas Pariwisata Di Desa Kampung Tua Bakau Serip, Kota Batam
BANDUNG- HALIMUN- CILETUH	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	1. Dokumen <i>Masterplan/Siteplan</i> (DTW Pantai Manjaya) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab. Sukabumi, Jawa Barat. 2. Dokumen <i>Masterplan/Siteplan</i> (DTW <i>Rest Area</i> Ciseukeut) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab. Pandeglang, Banten.	-	1. FGD Finalisasi Penyusunan <i>Masterplan/Siteplan</i> (DTW <i>Rest Area</i> Ciseukeut) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Pandeglang, Provinsi Jawa Barat. 2. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Destinasi Di Jawa Barat. 3. Bimbingan Teknis Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	-

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
				untuk Destinasi Tangguh Bencana di Provinsi Jawa Barat.	
	2023	-	-	1. Bimbingan Teknis Penguatan Tata Kelola Desa Wisata di Destinasi Cirebon, Provinsi Jawa Barat. 2. Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Desa Wisata di Destinasi Pandeglang, Provinsi Banten. 3. Bimbingan Teknis Penguatan Pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. 4. Bimbingan Teknis Penguatan Tata Kelola Desa Wisata di Destinasi Cirebon, Provinsi Jawa Barat.	1. Pemberian Dukungan Sarana 3A Penunjang Pelayanan Pariwisata di Destinasi Wisata Pantai Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. 2. Pemberian Dukungan Sarana 3A Penunjang Pelayanan Pariwisata di Destinasi Wisata Religi Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
BROMO TENGGER SEMERU	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
	2022	-	-	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Penyusunan Tata Kelola Amenitas Wisata yang Berkelanjutan Untuk Mendukung Daya Saing Produk Wisata KSPN Bromo Tengger Semeru dan sekitarnya.	-
	2023	-	-	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) I Penyusunan Roadmap Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Lumajang dan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) II Finalisasi Penyusunan <i>Roadmap</i> Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Lumajang	Serah Terima Dukungan 3A Amenitas Pariwisata di Kawasan <i>Geopark</i> Ijen, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur
BANYUWANGI	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	Dukungan Sarana Wisata Bahari di Pantai Tabuhan Banyuwangi.
	2023	-	-	1. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) I Penyusunan <i>Roadmap</i> Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Lumajang.	Serah Terima Dukungan 3A Amenitas Pariwisata di Kawasan <i>Geopark</i> Ijen, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
				2. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) II Finalisasi Penyusunan <i>Roadmap</i> Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Lumajang.	
MANDALIKA	2020	-	-	-	-
	2021	-	Dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Destinasi Super Prioritas	Bimbingan Teknis Manajemen Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta)/ <i>Homestay</i> di DSP Mandalika	Revitalisasi Toilet di Destinasi Pariwisata Super Prioritas
	2022	Pemetaan Desa Wisata Penyangga di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika, Destinasi Pariwisata Super Prioritas Mandalika.	-	1. Bimtek Pengembangan Desa Wisata di Lombok-Gili Tramen, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Penyangga Destinasi Pariwisata Super Prioritas Mandalika). 2. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola <i>Homestay</i> di Dusun Mong, Mandalika, Destinasi Pariwisata Super Prioritas Mandalika.	-

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
				3. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola <i>Homestay</i> di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Penyangga Destinasi Pariwisata Super Prioritas Mandalika).	
	2023	Pemetaan Desa Wisata Penyangga di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika, Destinasi Pariwisata Super Prioritas Mandalika.	-	1. Bimtek Pengembangan Desa Wisata di Lombok-Gili Tramen, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Penyangga Destinasi Pariwisata Super Prioritas Mandalika). 2. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola <i>Homestay</i> di Dusun Mong, Mandalika, Destinasi Pariwisata Super Prioritas Mandalika. 3. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola <i>Homestay</i> di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Penyangga	Pemberian Dukungan Pengembangan 3A Pariwisata di Desa Tunak Kab. Lombok Tengah, NTB

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
				Destinasi Pariwisata Super Prioritas Mandalika).	
LABUAN BAJO	2020	-	-	-	-
	2021	-	Dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Destinasi Super Prioritas	-	Revitalisasi Toilet di Destinasi Pariwisata Super Prioritas
	2022	1. Dukungan Persiapan dan Peresmian Resort Loh Buaya Pulau Rinca dan <i>Waterfront City</i> Labuan Bajo. 2. <i>Profiling Mapping Dive Sites Outside</i> Komodo.	Dukungan Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata Wilayah Koordinatif BPOLBF.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Desa Wisata Desinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo	1. Pengembangan Akses Digital Desa Wisata bekerjasama dengan Poltek Kupang. 2. Fasilitasi Dukungan Atraksi Wisata Pengadaan Peralatan Seni Budaya di Desa Wisata.
	2023	<i>Profiling Mapping Dive Sites Outside</i> Komodo	1. Dukungan Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata Wilayah Koordinatif BPOLBF. 2. Dukungan Persiapan dan Peresmian <i>Resort</i> Loh Buaya Pulau Rinca dan <i>Waterfront City</i> Labuan Bajo	Bimbingan Teknis Pengelolaan Desa Wisata Desinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo.	1. Pengembangan Akses Digital Desa Wisata bekerjasama dengan Poltek Kupang. 2. Fasilitasi Dukungan Atraksi Wisata Pengadaan Peralatan Seni Budaya di Desa Wisata.
LIKUPANG	2020	-	-	-	-

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
	2021	-	Dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Destinasi Super Prioritas	-	<i>Kick-off</i> Revitalisasi Toilet di Destinasi Pariwisata Prioritas Likupang
	2022	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola <i>Homestay</i> di Desa Wisata Likupang, Desa Marinsow, Destinasi Pariwisata Super Prioritas Manado-Likupang. 2. Bimtek Pengembangan Destinasi Pariwisata di Daya Tarik Wisata (DTW) Tumatenden, Desa Wisata Airmadidi Bawah, Kabupaten Minahasa Utara, Destinasi Pariwisata Super Prioritas Manado-Likupang. 3. Bimtek Pengembangan Destinasi Pariwisata di Desa Wisata, Desa Lilang Kabupaten Minahasa Utara, Destinasi Pariwisata Super Prioritas Manado-Likupang. 	-

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
	2023	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan <i>Masterplan</i> DTW Bukit Savana Lihunu, Minahasa Utara	-	Bimtek Pemetaan Potensi Desa Wisata di Destinasi Super Prioritas (DSP) Likupang	-
WAKATOBI	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	Bimbingan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata di Desa Wisata Summersari, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Penyangga Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi	-
	2023	-	-	Bimbingan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata di Desa Wisata Summersari, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Penyangga Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi).	-

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
RAJA AMPAT	2020	-	-	-	-
	2021	-	Sentra Vaksinasi di Kabupaten Raja Ampat	Kegiatan <i>Monitoring</i> Evaluasi Persiapan Daya Tarik Wisata dalam Menyambut PON XX dan DAK di Papua dan Papua Barat	-
	2022	-	-	Dukungan penyusunan dokumen Roadmap Desa Wisata dan Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola Homestay Mangrove Klawalu – Kota Sorong, Kota Sorong (Penyangga Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat)	-
	2023	-	-	Forum Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Desa Wisata Kabupaten Raja Ampat	-
MOROTAI	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	Sosialisasi Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi di Kabupaten Pulau Morotai,	-

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
				Destinasi Pariwisata Super Prioritas Morotai	
	2023	-	-	Sosialisasi Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi di Kabupaten Pulau Morotai, Destinasi Pariwisata Super Prioritas Morotai	-
SAMBAS - SINGKAWANG	2020	-	-	-	
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Workshop</i> Reaktivasi Destinasi Pariwisata Terdampak Pandemi Covid-19 di Kota Pontianak, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat (Penyangga Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang). 2. Bimtek Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. 	-

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
	2023	-	-	1. Pelaksanaan Forum Penguatan Jejaring Tata Kelola Desa Wisata di Kabupaten Sambas. 2. Pelaksanaan Bimtek Pengembangan Destinasi Pariwisata Sambas-Singkawang: Penguatan Tata Kelola Destinasi di Desa Wisata.	-
DERAWAN - BERAU	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	1. Bimtek Penguatan Konten Kreator dalam mendukung pengembangan destinasi di desa wisata, Kabupaten Berau, Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau. 2. Bimtek Penguatan Peran Pelaku Pariwisata dalam Pengembangan Destinasi	-

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
				pada Desa Wisata di Kab. Berau pada Ekowisata Mangrove Teluk Semanting, Kabupaten Berau, Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau.	
	2023	-	-	Bimtek Peningkatan Kualitas tata Kelola Destinasi di Desa Wisata Kab. Berau	-
TORAJA - MAKASSAR - SELAYAR	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola <i>Homestay</i> di Desa Wisata Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan (Penyangga Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar).	-
	2023	-	-	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola <i>Homestay</i> di Desa Wisata Rumbia, Kabupaten	Pemberian Dukungan Pengembangan 3A Pariwisata di

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
				Jeneponto, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan (Penyangga Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar).	Geopark Maros-Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan
BIAK - TELUK CENDRAWASIH	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	FGD Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Berbasis Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi dalam Pengembangan Destinasi Wisata Berkualitas, Terintegrasi dan Berkelanjutan di Biak Numfor, Papua, Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cenderawasih.	Revitalisasi Toilet di DTW Goa Jepang, Kab. Biak Numfor, Papua, Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cenderawasih
	2023	-	-	Pelaksanaan Bimtek Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Biak Numfor	Pemberian Dukungan Pengembangan 3A Pariwisata di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (Amenitas sarana

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
					pariwisata pelengkap dan penunjang kelayakan <i>homestay</i>
BALI	2020	-	-	-	-
	2021	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Destinasi Super Prioritas 2. Reaktivasi Industri Perhotelan Melalui Pendukungan Akomodasi Tenaga Kesehatan 3. <i>Kick-Off</i> Penguatan DMO-DG untuk Percepatan Revitalisasi Destinasi dan Pemulihan Pariwisata 	Bimbingan Teknis Pengelolaan Toilet Bersih, Sehat, dan Berstandar di Daya Tarik Wisata	Revitalisasi Toilet di Destinasi Pariwisata Super Prioritas
	2022	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Pemetaan Desa Wisata Bali Aga. Destinasi Revitalisasi Bali. 2. FGD Penguatan Desa Wisata Penaban, Bali. Destinasi Revitalisasi Bali. 3. FGD Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah terkait DAK Fisik Berbasis Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi 	-

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
				dalam Pengembangan Destinasi Wisata Berkualitas, Terintegrasi dan Berkelanjutan di Bali. Destinasi Revitalisasi Bali.	
	2023	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Forum Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Desa Wisata Serangan, Denpasar 2. Bimtek Peningkatan Tata Kelola Destinasi di Desa Wisata Pulau Serangan dan Sekitarnya 	-

Tabel 29. Daftar Kegiatan Tahun 2020-2023 untuk 19 Destinasi Prioritas yang Dikembangkan

3.1.3 Tersedianya Destinasi Pariwisata yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Realisasi	Persentase Realisasi
Tersedianya Destinasi Pariwisata yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan	19 Destinasi	19 Destinasi	100%

Tabel 30. Realisasi Sasaran Program "Tersedianya Destinasi Pariwisata yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan"

Pada tahun 2024, kontribusi capaian mengenai prinsip pariwisata berkelanjutan pada sasaran program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui peningkatan terhadap indikator kinerja Jumlah Destinasi Pariwisata yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan yang memiliki target sebanyak 19 destinasi.

Pencapaian sasaran program ini telah dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir dengan target dan realisasi yang terpenuhi. Keberhasilan capaian indikator kinerja Jumlah Destinasi Pariwisata yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan yang dilakukan di seluruh 19 destinasi melalui beberapa program atau kegiatan diantaranya yakni sebagaimana dalam tabel berikut:

Destinasi	Kegiatan
10 Destinasi Pariwisata Prioritas	
Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendukung Sarana Pariwisata dan Pendampingan Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 di Desa Wisata Keciput, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung 2. Dukungan Penyelenggaraan Penyusunan Capaian Tata Kelola Destinasi melalui <i>Quality Tourism</i> melalui Persiapan Pengajuan Nominasi <i>Best Tourism Village by UN Tourism</i> Tahun 2024 Desa Wisata Kreatif Terong pada tanggal 5 April 2024
Borobudur dskt, Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendukung Sarana Pariwisata dan Pendampingan Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 di Desa Wisata Wanurejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 2. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dan Pengumpulan Data Penyusunan Instrumen Monev SDM dan Kelembagaan BPO Borobudur
Borobudur dskt, DI Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendukung Sarana Pariwisata dan Pendampingan Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 di Desa Wisata Krebet, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta

Destinasi	Kegiatan
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pendukung Sarana Pariwisata dan Pendampingan Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 di Desa Wisata Jatimulyo, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta 3. Fasilitasi Penyiapan Destinasi dalam Penerapan Pariwisata Berkelanjutan melalui kegiatan Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan di Kampung Wisata Rejowinangun, Kota Yogyakarta (26-27 Agustus 2024) dan Dewi Sambu, Kab. Sleman (10-11 Agustus 2024) 4. Audit <i>Surveillance</i> Desa Wisata Berkelanjutan Tahun 2024 Desa Wisata Wukirsari, pada tanggal 18 November 2024 5. Dukungan Penyelenggaraan Penyusunan Capaian Tata Kelola Destinasi melalui <i>Quality Tourism</i> melalui Persiapan Pengajuan Nominasi <i>Best Tourism Village by UN Tourism</i> Tahun 2024 Desa Wisata Pentingsari, Sleman dan Desa Wisata Wukirsari, Bantul pada tanggal 5 April 2024.
Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendukung Sarana Pariwisata dan Pendampingan Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 di Desa Wisata Dewi Anom, Kabupaten Malang, Jawa Timur 2. Fasilitasi Penyiapan Destinasi dalam Penerapan Pariwisata Berkelanjutan melalui kegiatan Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan Desa Wisata Sanankerto di Kab. Malang pada tanggal 9-10 September 2024.
Danau Toba, dskt, Sumatera Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendukung Sarana Pariwisata dan Pendampingan Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 di Desa Wisata Pulo Sibandang, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. 2. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dan Pengumpulan Data Penyusunan Instrumen Monev SDM dan Kelembagaan BPO Danau Toba
Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendukung Sarana Pariwisata dan Pendampingan Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 di Desa Wisata Tiworiwu (Kampung Megalith Bena), Kabupaten Ngada, NTT 2. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dan Pengumpulan Data Penyusunan Instrumen Monev SDM dan Kelembagaan BPO Labuan Bajo Flores 3. <i>Workshop</i> Evaluasi dan Implementasi Protokol Keamanan dan Keselamatan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo 4. Penyediaan Sistem Informasi Prakiraan Cuaca Berbasis Dampak (<i>Impact Based Forecast</i>) di Sektor Pariwisata 5. Pendukung Program Fasilitasi Masyarakat Desa Wisata (Fasmadewi) terkait Mitigasi Risiko di Destinasi Wisata (Berkolaborasi dengan A-Pad Indonesia dan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, Lokasi: Desa Siru dan Desa Wae Lolos di Labuan Bajo)
Lombok-Mandalika, Nusa Tenggara Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi Pengelolaan Sampah Plastik Tingkat Sekolah Dasar di Destinasi Wisata Bahari Desa Tumpak Mandalika, 15-16 Mei 2024

Destinasi	Kegiatan
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pendukung Sarana Pariwisata dan Pendampingan Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 di Desa Wisata Aik Berik, Kabupaten Lombok Tengah, NTB 3. Fasilitas Penyiapan Destinasi dalam Penerapan Pariwisata Berkelanjutan melalui kegiatan Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan di Desa Wisata Taman Loang Baloq Mataram, NTB pada tanggal 5-6 Agustus 2024
Manado-Likupang, Sulawesi Utara	Pendukung Sarana Pariwisata dan Pendampingan Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 di Desa Wisata Batu Putih Bawah, Kota Bitung, Sulawesi Utara
Morotai, Maluku Utara	Pendukung Sarana Pariwisata dan Pendampingan Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 di Desa Wisata Batu Naga, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara
Raja Ampat, Papua Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendukung Sarana Pariwisata dan Pendampingan Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 di Desa Wisata Malasigi, Kabupaten Sorong
Wakatobi, Sulawesi Tenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendukung Sarana Pariwisata dan Pendampingan Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 di Desa Wisata Labengki, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Utara 2. Fasilitas Penyiapan Destinasi dalam Penerapan Pariwisata Berkelanjutan melalui kegiatan Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan di Desa Wisata Air Terjun Moramo Sumbersari, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada tanggal 22-23 Agustus 2024
8 Destinasi Pariwisata Prioritas	
Bandung-Halimun-Ciletuh, Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendukung Sarana Pariwisata dan Pendampingan Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 di Desa Wisata Edukasi Cisaat, Kabupaten Subang, Jawa Barat 2. Dukungan Penyelenggaraan Penyusunan Capaian Tata Kelola Destinasi melalui <i>Quality Tourism</i> melalui Persiapan Pengajuan Nominasi <i>Best Tourism Village by UN Tourism</i> Tahun 2024 Desa Wisata Cibuntu, Kuningan, dan Desa Wisata Selasari, Pangandaran, Jawa Barat pada tanggal 5 April 2024.
Banyuwangi, Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendukung Sarana Pariwisata dan Pendampingan Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 di Desa Wisata Osing Kemiren, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 2. Pendampingan Tata Kelola Destinasi terkait Pengelolaan Sampah dan Manajemen Pengunjung di Desa Wisata, 23 September 2024

Destinasi	Kegiatan
Batam-Bintan, Kepulauan Riau	Pendukung Sarana Pariwisata dan Pendampingan Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 di Desa Wisata Cemaga Tengah, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau
Biak-Teluk Cenderawasih, Papua Barat Daya	Pendukung Sarana Pariwisata dan Pendampingan Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 di Desa Wisata Rheapang Muaif, Kabupaten Jayapura, Papua
Bukittinggi-Padang, Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendukung Sarana Pariwisata dan Pendampingan Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 di Desa Wisata Pagadih, Kabupaten Agam, Sumatera Barat 2. Pendukung Sarana Pariwisata dan Pendampingan Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 di Desa Wisata Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 3. Pendukung Sarana Pariwisata dan Pendampingan Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 di Desa Wisata Amping Parak, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat
Derawan-Berau, Kalimantan Timur	Pendukung Sarana Pariwisata dan Pendampingan Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 di Desa Wisata Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
Sambas-Singkawang, Kalimantan Barat	Pendukung Sarana Pariwisata dan Pendampingan Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 di Desa Wisata Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat
Toraja-Makassar-Selayar, Sulawesi Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendukung Sarana Pariwisata dan Pendampingan Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 di Desa Wisata Landorundun, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan 2. Pendukung Sarana Pariwisata dan Pendampingan Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 di Desa Wisata Balleangin, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan 3. Pendukung Sarana Pariwisata dan Pendampingan Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 di Desa Wisata Landorundun, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan
1 Revitalisasi Destinasi Pariwisata Bali	
Denpasar, Bali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendukung Sarana Pariwisata dan Pendampingan Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 di Desa Wisata Les, Kab Buleleng, Bali 2. Dukungan Kegiatan <i>Carbon Footprint Action</i> pada <i>The 2nd UNWTO Regional Conference on the Empowerment of Women in Tourism in Asia and the Pacific</i> di Telaga Waja, Benoa, Bali pada tanggal 3 Mei 2024

Destinasi	Kegiatan
	3. Fasilitasi Penyiapan Destinasi dalam Penerapan Pariwisata Berkelanjutan melalui kegiatan Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan di Jatiluwih, Tabanan pada tanggal 23-24 Juli 2024 4. Dukungan Penyelenggaraan Penyusunan Capaian Tata Kelola Destinasi melalui <i>Quality Tourism</i> melalui Persiapan Pengajuan Nominasi <i>Best Tourism Village by UN Tourism</i> Tahun 2024 Desa Wisata Jatiluwih dan Desa Wisata Pemuteran pada tanggal 5 April 2024

Tabel 31. Daftar Kegiatan di 19 Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan

Kegiatan di 19 Desetinasi Pariwisata yang Berkelanjutan terbagi dalam 4 program strategis, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI)

ADWI sebagai wujud komitmen dalam mengembangkan potensi desa wisata di Indonesia sebagaimana amanat yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, dimana Kemenparekraf menargetkan sebanyak 244 pengembangan desa wisata. ADWI merupakan ajang penghargaan kepada desa wisata dalam rangka mendorong serta menstimulus potensi desa wisata - desa wisata di Indonesia untuk menjadi destinasi pariwisata yang berkualitas sehingga memiliki *multiplier effect* yang luas untuk perkembangan kepariwisataan di Indonesia.

Program ADWI bertujuan untuk menjadikan Desa Wisata di Indonesia sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia dan berdaya saing yang mampu mendorong pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat serta sebagai ajang promosi potensi desa wisata kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Tahun 2024 ini, Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) mengangkat tema “Desa Wisata Menuju Pariwisata Hijau Berkelas Dunia” yang merupakan sebuah visi untuk masa depan pariwisata di Indonesia. Pariwisata Hijau bukan hanya tentang lingkungan, tapi juga pariwisata yang berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga meminimalkan dampak negatif, menjaga dan melestarikan lingkungan dan budaya lokal.

Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2024 ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu tahap registrasi, kurasi, visitasi & penilaian juri, serta diakhiri dengan malam

anugerah untuk mengapresiasi Desa Wisata. Registrasi ADWI dilakukan oleh masing-masing Desa Wisata melalui www.jadesta.kemenparekraf.go.id, selanjutnya desa wisata akan dikurasi menjadi 50 desa wisata terbaik untuk divisitasi oleh Menparekraf dan dinilai langsung oleh dewan juri.

Desa Wisata tersebut akan dinilai berdasarkan 5 kategori penilaian diantaranya yaitu:

- a. **Kategori daya tarik desa wisata** yang merupakan potensi utama desa wisata yang memiliki keunikan, keautentikan, dan kreativitas yang menjadi daya tarik wisata berupa produk wisata (wisata alam, buatan, budaya) & produk ekonomi kreatif (kriya, kuliner, fesyen);
- b. **Kategori amenities** yaitu peningkatan standar kualitas amenities pariwisata dengan standar CHSE melalui fasilitas homestay, toilet, serta fasilitas penunjang pariwisata lainnya (restoran, tempat ibadah, dan parkir) untuk pemenuhan sarana dan prasarana kenyamanan wisatawan;
- c. **Kategori digital** yaitu akselerasi transformasi digital melalui pelayanan infrastruktur dan menciptakan konten kreatif sebagai sarana promosi desa wisata melalui media digital;
- d. **Kategori kelembagaan & SDM** yaitu pemberdayaan SDM di desa wisata untuk meningkatkan lapangan kerja, dampak ekonomi, serta mendukung kesetaraan gender dalam pelibatan SDM di desa wisata;
- e. **Kategori resiliensi** yaitu pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan dengan memperhatikan isu lingkungan serta memiliki manajemen risiko dalam menghadapi resiko alam maupun non alam.

Tahapan visitasi dan penilaian pada kegiatan Anugerah Desa Wisata (ADWI) 2024 ini merupakan tahap untuk menilai desa wisata sesuai dengan kategori penilaian yang telah ditentukan tersebut. Kemudian tahapan akhir rangkaian ADWI 2024, dilaksanakan malam penganugerahan bagi 50 desa wisata terbaik untuk memberikan apresiasi bagi pemenang berdasarkan kategori penilaian.

Adapun 50 Desa Wisata terbaik ADWI 2024 sebagai berikut:

No.	Desa Wisata	Kabupaten/Kota	Provinsi
1.	Desa Wisata Jaboi	Kota Sabang	Aceh
2.	Desa Wisata Kawasan Pulo Sibandang	Kabupaten Tapanuli Utara	Sumatera Utara
3.	Desa Wisata Ekowisata Berbasis PRB Nagari Amping Parak	Kabupaten Pesisir Selatan	Sumatera Barat
4.	Desa Wisata Danau Diateh - Alahan Panjang	Kabupaten Solok	Sumatera Barat
5.	Desa Wisata Pesona Pagadih	Kabupaten Agam	Sumatera Barat
6.	Desa Wisata Tanjung Belit	Kabupaten Kampar	Riau
7.	Desa Wisata Buluh Perindu Desa Baru Semerah	Kabupaten Kerinci	Jambi
8.	Desa Wisata Gunung Dempo	Kota Pagar Alam	Sumatera Selatan
9.	Desa Wisata Empat Suku Menanti	Kabupaten Rejang Lebong	Bengkulu
10.	Desa Wisata Teluk Kiluan	Kabupaten Tanggamus	Lampung
11.	Desa Wisata Keciput	Kabupaten Belitung	Kepulauan Bangka Belitung
12.	Desa Wisata Cemaga Tengah	Kabupaten Natuna	Kepulauan Riau
13.	Desa Wisata Pulau Pramuka	Kabupaten Kepulauan Seribu	Daerah Khusus Jakarta
14.	Desa Wisata Kaduella	Kabupaten Kuningan	Jawa Barat
15.	Desa Wisata Edukasi Cisaat	Kabupaten Subang	Jawa Barat
16.	Desa Wisata Pesona Gunung Prau	Kabupaten Wonosobo	Jawa Tengah
17.	Desa Wisata Wanurejo	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah
18.	Desa Wisata Bangowan	Kabupaten Blora	Jawa Tengah
19.	Desa Wisata Jatimulyo	Kabupaten Kulonprogo	DI Yogyakarta
20.	Desa Wisata Kreet	Kabupaten Bantul	DI Yogyakarta

No.	Desa Wisata	Kabupaten/Kota	Provinsi
21.	Desa Wisata Sempu	Kabupaten Kediri	Jawa Timur
22.	Desa Wisata Dewi Anom	Kabupaten Malang	Jawa Timur
23.	Desa Wisata Adat Osing Kemiren	Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur
24.	Desa Wisata Gunungsari	Kabupaten Madiun	Jawa Timur
25.	Desa Wisata Padarincang	Kabupaten Serang	Banten
26.	Desa Wisata Les	Kabupaten Buleleng	Bali
27.	Desa Wisata Aik Berik	Kabupaten Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat
28.	Desa Wisata Fatumnasi	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur
29.	Desa Wisata Tiworiwu (Kampung Megalith Bena)	Kabupaten Ngada	Nusa Tenggara Timur
30.	Desa Wisata Jagoi Babang	Kabupaten Bengkayang	Kalimantan Barat
31.	Desa Wisata Batu Lintang (Sungai Utik)	Kabupaten Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
32.	Desa Wisata Sei Gohong	Kota Palangka Raya	Kalimantan Tengah
33.	Desa Wisata Agro Technopark	Kabupaten Tanah Bumbu	Kalimantan Selatan
34.	Desa Wisata Pulau Derawan	Kabupaten Berau	Kalimantan Timur
35.	Desa Wisata Kelurahan Nipah-Nipah	Kabupaten Penajam Paser Utara	Kalimantan Timur
36.	Desa Wisata Mangkaban	Kabupaten Tana Tidung	Kalimantan Utara
37.	Desa Wisata Batuputih Bawah	Kota Bitung	Sulawesi Utara
38.	Desa Wisata Labuan Belanda	Kabupaten Tojo Una-una	Sulawesi Tengah
39.	Desa Wisata Balleangin	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	Sulawesi Selatan
40.	Desa Wisata Mattabulu	Kabupaten Soppeng	Sulawesi Selatan
41.	Desa Wisata Landorundun	Kabupaten Toraja Utara	Sulawesi Selatan
42.	Desa Wisata Labengki	Kabupaten Konawe Utara	Sulawesi Tenggara

No.	Desa Wisata	Kabupaten/Kota	Provinsi
43.	Desa Wisata Bihe (Botu Kapali <i>River Tubing</i>)	Kabupaten Gorontalo	Gorontalo
44.	Desa Wisata Lapeo, Baqbatoa Beach	Kabupaten Polewali Mandar	Sulawesi Barat
45.	Desa Wisata Letvuan Paradise	Kabupaten Maluku Tenggara	Maluku
46.	Desa Wisata Negeri Laha	Kota Ambon	Maluku
47.	Desa Wisata Naga	Kabupaten Halmahera Barat	Maluku Utara
48.	Desa Wisata Namatota	Kabupaten Kaimana	Papua Barat
49.	Desa Wisata Kampung Rheapang Muaib	Kabupaten Jayapura	Papua
50.	Desa Wisata Malasigi Village	Kabupaten Sorong	Papua Barat Daya

Tabel 32. 50 Desa Wisata terbaik ADWI 2024

Setelah tahap visitasi dan penilaian, selanjutnya ADWI 2024 ini memiliki tahapan dan wajah baru yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahapan pendampingan kepada 50 desa wisata terbaik yang telah ditetapkan berdasarkan hasil kurasi. Tahapan pendampingan ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi desa wisata, memperkuat kapasitas SDM dan pengelolaan desa wisata, serta memastikan keberlanjutan desa wisata agar terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang. Secara umum, tujuan kegiatan ini adalah memberikan pendampingan dan penguatan terhadap pengelola desa wisata dalam tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif desa wisata menuju desa wisata mandiri dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan daya tarik masing-masing desa wisata sehingga dapat menyediakan produk dan jasa pariwisata dan ekonomi kreatif, menciptakan lapangan pekerjaan, serta berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan desa wisata.

Secara khusus tujuan Pendampingan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 adalah:

- a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pengelola desa wisata dalam pengelolaan daya tarik desa wisata yang memiliki keunikan, keautentikan, dan kreativitas yang menjadi daya tarik berupa produk wisata (alam, buatan, dan budaya) dan produk ekonomi kreatif (kriya, kuliner, fesyen);

- b. Meningkatkan kemampuan desa dalam mengelola dan meningkatkan kualitas amenities dengan standard CHSE melalui fasilitas homestay, toilet, serta fasilitas penunjang pariwisata lainnya (restoran, tempat ibadah dan parkir) untuk pemenuhan sarana dan prasarana kenyamanan wisatawan;
- c. Meningkatkan kapasitas pengelola desa dalam melakukan akselerasi transformasi digital melalui pelayanan infrastruktur dan menciptakan konten kreatif sebagai sarana promosi desa wisata melalui media digital;
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia desa wisata sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan dampak ekonomi, serta mendukung kesetaraan gender yang inklusif; dan
- e. Meningkatkan pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan dengan memperhatikan isu lingkungan serta manajemen risiko.

50 Besar Desa Wisata ADWI Tahun 2024 juga mendapatkan pendudukan sarana pariwisata yang mencakup 3A (atraksi, amenities dan aksesibilitas) yang diberikan dalam bentuk bantuan pemerintah. Pemberian ini bersifat stimulan dan merupakan usulan kebutuhan dari pengelola desa wisata agar dapat lebih mengembangkan atraksi dan aktivitas di desa wisata melalui pemberian sarana pariwisata.

Adapun tujuan pemberian sarana pariwisata kepada 50 besar desa wisata ADWI 2024 tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas tata kelola destinasi desa wisata melalui pendudukan sarana pada aspek sarana pendukung atraksi wisata, sarana pendukung produk, sarana pendukung amenities pariwisata, dan sarana pendukung resiliensi;
- b. Meningkatkan produktivitas desa wisata yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. Meningkatkan kualitas kepariwisataan terutama lingkungan destinasi pariwisata dengan memperhatikan jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kenyamanan pengunjung;
- d. Sinergi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Dukungan sarana pariwisata bagi 50 desa wisata terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2024 selaras dengan 5 (lima) kategori penilaian ADWI 2024, yaitu (1) daya tarik; (2) amenitas; (3) digital; (4) kelembagaan; dan (5) resiliensi. Jenis dan bentuk pendukung sarana pariwisata adalah berdasarkan proposal oleh pengusul dari desa wisata kemudian dilakukan kurasi oleh tim teknis sesuai dengan alokasi penganggaran yang tersedia dan urgensi atau kebutuhan sarana pariwisata di desa wisata.

Adapun sarana pariwisata yang dimaksud adalah dapat digunakan untuk penyediaan sarana pendukung atraksi wisata, sarana pendukung produk, sarana pendukung amenitas pariwisata, dan sarana pendukung resiliensi sebagaimana berikut:



Gambar 32. Menu Pengajuan Dukungan Sarana Pariwisata

➤ 50 Besar Desa Wisata ADWI 2024 di 19 lokasi yang mempengaruhi capaian IKU

No.	Destinasi	Lokasi Desa Wisata
1.	Bangka Belitung	Desa Wisata Keciput, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung
2.	Borobudur dan sekitarnya	Desa Wisata Wanurejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
3.	Bromo-Tengger-Semeru	Desa Wisata Dewi Anom, Kabupaten Malang, Jawa Timur
4.	Danau Toba dan sekitarnya	Desa Wisata Pulo Sibandang, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara

No.	Destinasi	Lokasi Desa Wisata
5.	Labuan Bajo	Desa Wisata Tiworiwu (Kampung Megalith Bena), Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur
6.	Lombok-Mandalika	Desa Wisata Aik Berik, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
7.	Manado-Likupang	Desa Wisata Batu Putih Bawah, Kota Bitung, Sulawesi Utara
8.	Morotai	Desa Wisata Batu Naga, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara
9.	Raja Ampat	Desa Wisata Malasigi, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya
10.	Wakatobi	Desa Wisata Labengki, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
11.	Bandung-Halimun-Ciletuh	Desa Wisata Edukasi Cisaat, Kabupaten Subang, Jawa Barat
12.	Banyuwangi	Desa Wisata Osing Kemiren, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
13.	Batam-Bintan	Desa Wisata Cemaga Tengah, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau
14.	Biak-Teluk Cendrawasih	Desa Wisata Rheapang Muaif, Kabupaten Jayapura, Papua
15.	Bukittinggi-Padang	Desa Wisata Pagadih, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
		Desa Wisata Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat
		Desa Wisata Amping Parak, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat
16.	Berau	Desa Wisata Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
17.	Sambas-Singkawang	Desa Wisata Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat
18.	Toraja-Makassar-Selayar	Desa Wisata Landorundun, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan
		Desa Wisata Balleangin, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan
		Desa Wisata Landorundun, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan
19.	Bali	Desa Wisata Les, Kab Buleleng, Bali

Tabel 33. 19 Lokasi yang Memengaruhi Capaian IKU Berdasarkan 50 Desa Wisata ADWI 2024

2. Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan

Sertifikasi desa wisata berkelanjutan merupakan bagian dari kerangka program pembangunan pariwisata berkelanjutan Indonesia.

Proses pemberian sertifikasi untuk menentukan status mutu, standar dan kualitas desa wisata dengan mekanisme penilaian/audit menggunakan kriteria dan indikator pariwisata berkelanjutan yang telah ditetapkan.

Sertifikasi Pariwisata Berkelanjutan memberikan nilai tambah kompetitif dan jaminan atas kualitas fasilitas, produk, proses, dan manajemen destinasi/desa wisata telah memenuhi standar pariwisata berkelanjutan. Program sertifikasi desa wisata berkelanjutan dilakukan melalui mekanisme penilaian Lembaga Sertifikasi Produk *Indonesia Sustainable Tourism Council (LS Pro-ISTC)* dengan skema sertifikasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Adapun manfaat dilakukannya sertifikasi desa wisata berkelanjutan adalah untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran untuk melaksanakan praktik pariwisata berkelanjutan di kalangan pemangku kepentingan swasta, publik dan pemerintah;
- b. Dukungan terhadap pelestarian bumi dengan pelaksanaan kegiatan perjalanan yang ramah lingkungan (*green traveling*);
- c. Adanya pengakuan (rekognisi) terhadap standar operasional yang tinggi dan bermanfaat saat mengajukan permohonan penghargaan, dukungan, lisensi atau izin.
- d. Pemasaran dan promosi yang bertanggung jawab, menekankan pada produk yang berkelanjutan, menciptakan koneksi, kemitraan yang bermakna dan hubungan peningkatan nilai yang dapat memperluas jangkauan program pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

Kriteria dan penilaian sertifikasi desa wisata berkelanjutan disesuaikan dengan Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 dan Pedoman Desa Wisata 2019. Terdapat 4 aspek yang dinilai untuk desa wisata yang menunjukkan status mutu berkelanjutan dalam hal pengelolaan berkelanjutan, keberlanjutan sosial ekonomi, keberlanjutan budaya dan keberlanjutan lingkungan.

Pada tahun 2024, telah dilakukan proses sertifikasi desa wisata berkelanjutan kepada 7 desa wisata terpilih. Adapun desa wisata yang

mendapatkan status desa wisata berkelanjutan adalah sejumlah 4 desa wisata. Berikut adalah daftar desa wisata yang difasilitasi proses sertifikasi berkelanjutan tahun 2024:

No.	Nama Desa Wisata	Lokasi	Status
1.	Desa Wisata Sanankerto	Kab. Malang, Jawa Timur	Tersertifikasi Berkelanjutan
2.	Kampung Wisata Rejowinangun	Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta	Tersertifikasi Berkelanjutan
3.	Dewi Sambi	Kab. Sleman, DI Yogyakarta	Tersertifikasi Berkelanjutan
4.	Desa Wisata Jatiluwih	Kab. Tabanan, Bali	Tersertifikasi Berkelanjutan
5.	Desa Wisata Taman Loang Baloq	Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat	-
6.	Desa Wisata Air Terjun Moramo Summersari	Kab. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara	-
7.	Desa Wisata Budo	Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara	-

Tabel 34. Desa Wisata yang Difasilitasi Proses Sertifikasi Berkelanjutan

Proses Sertifikasi dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain:

- Sosialisasi dan Penampungan Desa Wisata untuk Penilaian Mandiri
- Panel Review I untuk Penentuan Kelayakan Assesmen Lapangan
- Assesmen Lapangan
- Panel Review II untuk Penetapan Desa Wisata Tersertifikasi Berkelanjutan
- Seremonial Penyerahan Piagam dan Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan

3. Koordinasi Manajemen Krisis

Koordinasi Manajemen Krisis merupakan upaya Kemenparekraf bersinergi dan berkolaborasi dengan lintas Kementerian dan Lembaga serta para pemangku kepentingan terkait dalam hal memberikan pendampingan untuk mengelola manajemen krisis di Destinasi Pariwisata serta melakukan mitigasi terhadap resiko bencana di Kawasan Rawan Bencana.

Selama kurun waktu 2024, telah dilakukan berbagai kolaborasi manajemen krisis di destinasi pariwisata, diantaranya:

- Workshop* Evaluasi dan Implementasi Protokol Keamanan dan Keselamatan di Destinasi Pariwisata (Berkolaborasi dengan BNPP/Basarnas, Lokasi: Labuan Bajo)

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama antara Kemenparekraf dengan Basarnas terkait peningkatan kesadaran kolektif masyarakat di destinasi pariwisata. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan latihan pencarian dan pertolongan, dengan mengundang pemerintah daerah, asosiasi, *tour operator* dan para pemangku kepentingan terkait di DPSP Labuan Bajo. Setelah dilakukan *workshop*, seluruh peserta dipandu untuk membuat rencana kontigensi pencarian dan pertolongan kecelakaan kapal di perairan Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat.

- b. Penyediaan Sistem Informasi Prakiraan Cuaca Berbasis Dampak (Berkolaborasi dengan BMKG, Lokasi: Labuan Bajo)

Kemenparekraf berkolaborasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk membangun sistem prakiraan cuaca berbasis dampak (*Impact Based Forecast*) yang tidak hanya memberikan peringatan dini terhadap kondisi cuaca yang berpotensi membahayakan, tetapi juga menyoroti dampak positif cuaca yang dapat meningkatkan pengalaman berwisata. Dengan memanfaatkan teknologi dan data terkini, serta melibatkan pemangku kepentingan lokal, IBF ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan minat wisatawan untuk mengunjungi Labuan Bajo.

Dalam menghadapi perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi, sektor pariwisata perlu menghadapi tantangan yang berkaitan dengan dampak cuaca. Labuan Bajo, sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia, sangat bergantung pada kondisi cuaca untuk memastikan pengalaman wisata yang aman dan menyenangkan bagi para pengunjung. Oleh karena itu, adanya sistem informasi prakiraan cuaca yang efektif dan berbasis dampak menjadi sangat penting untuk meningkatkan ketahanan sektor pariwisata terhadap variabilitas cuaca.

- c. Koordinasi Persiapan Keamanan dan Keselamatan di Destinasi Pariwisata pada periode libur lebaran dan nataru (Berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah)

Setiap menjelang libur lebaran dan nataru, Kementerian Pariwisata melakukan langkah antisipatif dengan mengeluarkan dan mensosialisasikan surat edaran Menteri Pariwisata tentang Penyelenggaraan Wisata yang Aman, Nyaman dan Menyenangkan.

serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengantisipasi permasalahan yang biasanya terjadi di destinasi pariwisata terutama pada saat terjadi lonjakan kunjungan wisatawan.

Kementerian Pariwisata mendorong pemerintah daerah dan pengelola di destinasi wisata melakukan indentifikasi permasalahan pada beberapa destinasi diantaranya terkait keselamatan, kenyamanan, maupun praktik pungutan liar sehingga perlu antisipasi atau kiat-kiat menanganinya, antara lain dengan melakukan pengaturan pengunjung ke destinasi; penambahan personil pengamanan di destinasi wisata bekerjasama dengan Polda/ Polres setempat; serta pengaturan parkir bekerjasama dengan Dinas Perhubungan setempat.

- d. Pendukung Program Fasilitas Masyarakat Desa Wisata (Fasmadewi) terkait Mitigasi Risiko di Destinasi Wisata (Berkolaborasi dengan APAD Indonesia dan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, Lokasi: Desa Siru dan Desa Wae Lolos di Labuan Bajo).

Program fasmadewi memiliki tema mitigasi risiko di destinasi/desa wisata, dengan Narasumber dari *Asia Pacific Alliance for Disaster Management* (APAD) Indonesia. Adapun hasil yang diharapkan adalah:

- Masyarakat desa mampu melakukan penilaian resiko di destinasi pariwisata untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan
- Kelompok pokdarwis mampu memetakan resiko untuk meminimalisir kejadian yang bisa menimpa masyarakat sekitar, wisatawan dan aset desa
- Masyarakat / kelompok pokdarwis memiliki kemampuan dasar pertolongan pertama dalam penanganan krisis pada destinasi pariwisata
- Pemdes dan pokdarwis bahu membahu dalam memberikan rasa aman dan nyaman untuk wisatawan dan masyarakat pelaku pariwisata

Selama kegiatan berlangsung, telah dilakukan pemetaan masalah yang biasa terjadi di Desa Wisata Siru dan Wae Lolos, diantaranya:

- **Atraksi:** Kecelakaan saat tarian caci atau sanda, missskomunikasi dengan wisatawan, wisatawan jatuh saat *trekking*, kurangnya pengetahuan memandu wisatawan oleh *guide* lokal, kondisi spot wisata yang curam dan licin saat hujan, kurangnya pengetahuan P3K dari *guide* lokal.
 - **Amenitas:** di sekitar TIC terdapat beberapa warung yang memiliki harga tidak seimbang (perbedaan harga makanan), kebersihan lingkungan, toilet dan kamar mandi kurang, penampilan *guide* lokal perlu lebih diperhatikan (*dress well*) untuk menjaga kenyamanan pengunjung, *hospitality* (bisa menjaga sikap dan tata krama dalam melayani tamu).
 - **Aksesibilitas:** Belum tersedianya parkir umum, kurangnya komunikasi *guide* lokal dengan pengunjung, akses masuk licin, belum ada tenaga terlatih terkait p3K, beberapa jembatan terbuat dari kayu kudah rapu, di destinasi belum ada fasilitas berenang dan fasilitas mitigasi kecelakaan
 - **Ancillary:** kecemburuan sosial antar lembaga, Belum tersedianya parkir umum, kurangnya komunikasi *guide* lokal dengan lembaga. Solusi: mengadakan musyawarah dan mufakat, hindari ego, keuangan perlu di bukukan (transparan)
- Setelah menemukan permasalahan yang ada, selanjutnya dibutuhkan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya:
1. Pengembangan dan pembangunan fasilitas infrastruktur pendukung wisata
 2. Pelatihan *hospitality* dan ke pemanduan wisata
 3. Pelatihan pengelolaan TIC
 4. Pelatihan tata kelola Desa Wisata

4. Pendampingan Pengembangan Ekosistem Pariwisata

Dalam melakukan pendampingan terbagi menjadi beberapa kegiatan, antara lain:

a. Koordinasi Pengembangan 5 DPSP

Rapat koordinasi selalu dilakukan untuk mengevaluasi progres dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, serta para pelaku industri pariwisata, untuk menyatukan langkah dan pikir dalam mengembangkan lima destinasi wisata unggulan di Indonesia, yaitu Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo.

Pada tahun 2024, Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas diselenggarakan pada tanggal 21 Juli 2024 di Plataran Borobudur *Heritage*, dengan hasil rapat menunjukkan komitmen yang kuat dari seluruh pihak untuk mengembangkan 5 DPSP menjadi destinasi berkualitas dan menjadi wisata kelas dunia, sebagai berikut: pentingnya kolaborasi, fokus pada pariwisata berkualitas, pentingnya keberlanjutan, penguatan SDM dan infrastruktur pendukung.

b. Koordinasi Pengembangan Badan Pelaksana Otorita (BPO)

Pada tahun 2024, beberapa kegiatan dilakukan dalam rangka fasilitasi dan koordinasi pengembangan lahan otorita BPO Danau Toba (*Toba Caldera Resort/TCR*), lahan otorita BPO Borobudur (*Borobudur Highland*) dan lahan otorita BPO Labuan Bajo Flores (*Parapuar*), meliputi: Rapat bulanan terkait isu dan tindak lanjut dengan salah satu isu terkait pembangunan di lahan otorita bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarvest) bersama lintas Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Swasta dan pihak terkait dalam rangka pembangunan di lahan otorita untuk percepatan investasi lahan otorita.

Selain, Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Lahan Otorita di tiga BPO Pariwisata, telah dilakukan beberapa kegiatan seperti :

- Penyusunan Pedoman Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan BPO Pariwisata Tahun Anggaran 2024
- Penyusunan Dashboard Kinerja BPO Pariwisata
- Fasilitasi dan Koordinasi BLU BPO

c. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan SISPARNAS (Tugas Pembantuan) ke-38 Provinsi

Platform Sistem Informasi Kepariwisata Nasional memuat data yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator yang merujuk pada *Travel dan Tourism Development Index* (TTDI) dan *Global Sustainable Tourism Council* (GSTC), yakni: Gambaran Umum, Aksesibilitas, Amenitas, Atraksi, Kebencanaan, Isu yang berkembang, dan *Ancillary*.

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi dengan ruang lingkup Infrastruktur

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional (SISPARNAS) dan penguatan manajemen krisis.

Pada tahun 2024, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah berkomitmen untuk mengembangkan SISPARNAS sebagai platform data tunggal pariwisata nasional. Saat ini, SISPARNAS masih dalam tahap pengembangan, di mana data pariwisata dari berbagai daerah terus dikumpulkan dan diolah secara terpusat. Tujuan akhir dari pengembangan SISPARNAS adalah untuk menyediakan data yang akurat dan terkini bagi para pemangku kepentingan dalam industri pariwisata.

Target yang ingin dicapai pada tahun 2024 pengumpulan data primer dan data sekunder di 38 provinsi dengan jumlah 516 kab/kota. Data primer yang dikumpulkan meliputi:

- Daya tarik wisata (melengkapi)
- Akomodasi (melengkapi)
- Jasa makanan dan minuman (melengkapi)
- *Tour and travel* (tambahan di 2024)
- Ekonomi kreatif seperti toko oleh-oleh/cinderamata (tambahan di 2024).

Sosialisasi diselenggarakan pada tanggal 14 Mei 2024 di *The Margo Depok Hotel* yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Pariwisata 38 Provinsi yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan Tugas Pembantuan, perwakilan Biro Perencanaan dan Keuangan, Perwakilan Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Perwakilan Inspektorat Kemenparekraf, Perwakilan Eselon II dari Kedeputan Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur serta tim konsultan pengembang SISPARNAS.

Materi yang disampaikan meliputi evaluasi pelaksanaan Tugas Pembantuan TA 2023, materi substansi detil juknis tugas pembantuan TA 2024. Pada acara tersebut ditemukan kendala yang dihadapi oleh dinas pariwisata provinsi yang dihadapi saat pelaksanaan di lapangan dan telah diberikan alternatif solusi penyempurnaan pelaksanaan tugas pembantuan TA 2024.



Gambar 33. Pelaksanaan Sosialisasi Tugas Pembantuan Pengembangan Tata Kelola Destinasi

d. Koordinasi Pengembangan Destinasi *Geopark*

Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Induk *Geopark*, dan juga melalui upaya pengelolaan yang mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals – SDG's*), serta standar nasional dan internasional.

Kemenparekraf/Baparekraf melalui Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur tergabung dalam anggota Komisi Nasional *Geopark* Indonesia sebagai Komisi IV yang memiliki peran dalam mengembangkan *geopark* sebagai destinasi pariwisata. Sebagai upaya dalam mendukung pencapaian pengembangan *geopark* di Indonesia, Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Komisi Nasional *Geopark* Indonesia (KNGI) menetapkan target kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing diantaranya sebagai berikut:

Komisi I	Komisi II	Komisi III	Komisi IV
Perencanaan Geopark	Penetapan Geopark Nasional	Peningkatan menjadi UNESCO Global Geopark	Pengembangan Geopark sebagai Destinasi Pariwisata
KemenPPN	KemenESDM	Kemenko Marves	Kemenparekraf
<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Rencana Aksi Nasional 2. Skema Kelembagaan dan Pendanaan Geopark 3. Fasilitas Tiga Rencana Induk 4. Penyediaan Pedoman Tata Kelola Manajemen Geosite termasuk Pemilihan dan Evaluasi terhadap Manajer Geosite 5. Pembiayaan dan Investasi berdasarkan Blue, Green, and Circular Economy 6. Pembinaan dan Fasilitas Indonesia Youth Geopark 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Delapan Geopark Nasional 2. Penetapan Dua Geopark Nasional 3. Penetapan Warisan Geologi di Empat atau Lima Daerah 4. Dukungan Visibilitas di dalam Kawasan Geopark (PIG) di Tiga Geopark 5. Penyediaan Evaluator Geopark Nasional dari Akademisi/Praktisi dengan Pemantauan oleh Sekretariat KNGI sesuai dengan Petunjuk Teknis Penetapan Geopark Nasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telaksananya Persiapan dan Assessment di aspiring UGGp 2. Penyusunan Prosedur pendampingan Assessment 3. Penyusunan Prosedur Seleksi Aspiring UGGp 4. Pemantauan dan Evaluasi UGGp berdasarkan 16 Fokus Area Pengembangan 5. Penyediaan Biaya Tiket Asesor Assessment 6. Pembuatan Laporan Tahunan ke UNESCO yakni (a) Integrated Report untuk kebutuhan pemerintah dan (b) Executive Summary sebanyak lima lembar Sesuai Templat UNESCO dan Pengiriman melalui KNIU 7. Pemantauan Pembayaran iuran UNESCO Global Geopark sebesar 1500 Euro/Tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Infrastruktur dan Amenitas Pariwisata di seluruh UGGp dan kandidat usulan UGGp 2. Terwujudnya Hasil Diversifikasi Pariwisata di seluruh UGGp 3. Promosi Paket Wisata dan Travel Pattern di seluruh UGGp 4. Pelaksanaan Pelatihan dan Pembinaan SDM di seluruh UGGp 5. Pelaksanaan Pembinaan UMKM di seluruh UGGp 6. Pemantauan Implementasi DAK 2023 7. Tersedianya Travel Mart Geopark termasuk Ekatalog dan Digitalisasi Marketing di seluruh UGGp 8. Pelaksanaan Event termasuk Exhibition Geopark Conference

Tabel 35. Tugas dan Fungsi dari Komisi Nasional Geopark Indonesia (KNGI)

Capaian target kinerja Kemenparekraf/Baparekraf sebagai anggota komisi IV KNGI dalam upaya mengembangkan Geopark sebagai destinasi pariwisata di tahun 2024 sebagai berikut:

1. Target 1 melalui Pengembangan Amenitas melalui DAK Bidang Pariwisata di kawasan penyangga *Geopark*
2. Target 2 dengan adanya diversifikasi Pariwisata di seluruh UGGp melalui penyusunan *Masterplan* Daya Tarik Wisata (DTW)
3. Target 3 yaitu program promosi Paket Wisata dan *Travel Pattern* melalui tayangan YouTube Indonesia Kini “*Geopark Series*”
4. Target 4 melalui pelaksanaan Pelatihan dan Pembinaan SDM desa wisata penyangga *Geopark*
5. Target 5 melaksanakan pembinaan UMKM di seluruh UGGp melalui pendampingan pengembangan produk dan pelaku usaha ekraf dan pariwisata di UGGp
6. Target 6 kegiatan pemantauan Implementasi DAK 2024 dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah
7. Target 7 mendukung tersedianya *Travel Mart Geopark* termasuk E-katalog dan Digitalisasi marketing melalui kolaborasi publikasi dengan Biro Komunikasi dan dukungan pelaksanaan *Geopark Run Series*

Berikut capaian target kerja dari Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur sebagai Komisi IV KNGI yang memiliki tugas untuk mengembangkan Geopark sebagai destinasi pariwisata dengan upaya kolaborasi dan koordinasi yang terjalin antara lintas ke deputian Kemenparekraf/Baparekraf melalui rapat koordinasi rutin yang dilaksanakan setiap bulan.

Sebagai upaya pemantauan kinerja dari masing-masing Kementerian/Lembaga dalam mencapai target kinerja dan membahas isu-isu terkait geopark di Indonesia, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dengan rutin melakukan rapat koordinasi setiap bulan dengan anggota komisi lainnya yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kondisi saat ini dengan melihat perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga terutama perubahan nomenklatur Kementerian Koordinator yang menangani pengembangan *geopark*, dimungkinkan akan terjadi perubahan struktur dan kinerja KNIGI sebagai upaya penyesuaian kebijakan yang mendukung pengembangan *Geopark* Indonesia tahun 2025-2029.

Kolaborasi dan Koordinasi dalam upaya pengembangan *geopark* sebagai destinasi pariwisata dilakukan dengan para pemangku kepentingan lainnya yaitu:

- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/BAPPENAS) sebagai Komisi I KNIGI yang bertugas untuk menyusun rencana pengembangan *geopark*
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Badan Geologi) sebagai Komisi II KNIGI yang bertugas untuk menetapkan *Geopark* Nasional
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Komisi III KNIGI yang bertugas dalam upaya penetapan *Geopark* Nasional sebagai UGGp
- Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota
- Jaringan *Geopark* Indonesia (JGI)
- Badan Pengelola *Geopark*
- Dewan Pakar *Geopark*
- Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU)

e. Proses Revalidasi UNESCO Global *Geopark* (UGGp)

Tahun 2024 terdapat dua *Geopark* Indonesia yang berstatus UNESCO *Global Geopark* (UGGp) yang dilakukan revalidasi oleh UNESCO untuk keberlanjutan pemberian status UGGp secara berkelanjutan yaitu:

1. *Geopark* Batur

Kegiatan revalidasi Batur UGGp dilakukan oleh asesor UNESCO *Global Geopark* yaitu Andreas Schüller dari Vulkaneifel UGGp Jerman dan Sarina dari Alxa Desert UGGp Tiongkok yang

dilaksanakan pada tanggal 25-30 Juli 2024. Dukungan yang diberikan dari Kemenparekraf/Baparekraf yaitu interpreter yang membantu mendampingi asesor UNESCO dalam memberikan penjelasan terkait kondisi *Geopark* Batur.



Gambar 34. Revalidasi Batur UGGp

2. *Geopark* Belitung

Kegiatan revalidasi Belitung UGGp dilakukan oleh asesor UNESCO *Global Geopark* yaitu Tran Tan Van dari Vietnam *Institute of Geoscience and Mineral Resources* dan Hiroko Torigoe dari Itoigawa UGGp Jepang yang dilaksanakan pada tanggal 16-20 Juli 2024. Dukungan yang diberikan dari Kemenparekraf/Baparekraf, yaitu interpreter yang membantu mendampingi asesor UNESCO dalam memberikan penjelasan terkait kondisi *Geopark* Belitung.



Gambar 35. Revalidasi Belitung UGGp

f. Pengajuan *Geopark* Nasional sebagai UNESCO *Global Geopark*

Tahun 2024 terdapat 2 *Geopark* Nasional yang akan diajukan kepada UNESCO sebagai UNESCO *Global Geopark*, melalui

berbagai tahapan yaitu kegiatan pra validasi oleh KNGI, dan kegiatan validasi oleh UNESCO dan sidang UNESCO dalam menetapkan UGGp, pada lokasi berikut :

1. *Geopark Nasional Kebumen di Jawa tengah*

Pada 6 - 8 Mei 2024, telah dilaksanakan kunjungan lapangan ke *Geopark Kebumen* dalam rangka Pra Validasi *Aspiring UNESCO Global Geopark Kebumen*. Kegiatan validasi *Geopark Kebumen* dilakukan oleh asesor UNESCO *Global Geopark* yaitu Andreas Schüller dari Vulkaneifel UGGp Jerman dan Sarina dari Alxa Desert UGGp Tiongkok yang dilaksanakan pada tanggal 20-25 Juli 2024.

Hasil dari kegiatan validasi tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi dalam pemberian status *Geopark Kebumen* sebagai UGGp sebagai berikut:

- Perlu diperhatikan mengenai keselamatan pengunjung ada area *Geopark Kebumen*
- Agar membuat SOP penggunaan logo pada geoproduct
- Perlunya kelestarian hutan (meskipun dalam review tidak membahas tentang jumlah, namun akan lebih baik ketika jumlah dan kualitasnya baik)
- *Staff* dan anggota BP *Geopark Kebumen* sebaiknya mendapat gaji langsung dari BP *Geopark Kebumen*, sehingga perlu adanya renstra (proyeksi pendapatan dan pengeluaran selama 4 tahun ke depan)
- Kuesioner kepuasan pengunjung perlu dilakukan kedepannya
- Dibuatkan *summary* mengenai kerjasama (MOU) perguruan tinggi dengan berbagai pihak dan juga mengenai *issue climate change* seperti (kampung proklamasi dan sekolah adiwiyata) disertai dengan foto
- Diadakannya pelatihan untuk *staff* BP *Geopark Kebumen*, seperti pelatihan yang diselenggarakan oleh APGN
- Membuat jaringan antar *geopark* internasional jika di Indonesia lebih dari 1 Unesco *Global Geopark*
- Hasil akan dibahas pada sidang UNESCO *Global Geopark Council* di acara *The 8th Asia Pacific Geoparks Network Symposium* di Cao Bang UGGp Vietnam, September 2024



Gambar 36. Validasi Kebumen UGGp

2. Geopark Nasional Meratus di Kalimantan Selatan.

Pada 29 Mei-2 Juni 2024, telah dilaksanakan kunjungan lapangan ke Geopark Meratus dalam rangka Pra Validasi *Aspiring UNESCO Global Geopark*. Kegiatan validasi Geopark Nasional Meratus menuju UGGp dilakukan oleh asesor UNESCO Global Geopark, yaitu Tran Tan Van dari Vietnam *Institute of Geoscience and Mineral Resources* dan Hiroko Torigoe dari Itoigawa UGGp Jepang yang dilaksanakan pada tanggal 11-15 Juli 2024.

Hasil dari kegiatan validasi tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi dalam pemberian status Geopark Meratus sebagai UGGp sebagai berikut:

- Geopark telah menyajikan keragaman dan potensial menjadi UGGp
- Perlu penambahan *site* lain yang dapat membuktikan adanya proses ofiolit selain *snake skin site*
- Perbaiki panel informasi (contoh: geopark Hong Kong) : informasi jangan berulang (misal: titik koordinat, nama rute); informasi disederhanakan dan langsung penyampaian substansi utama. BP tetap menyiapkan narasi panjang/ lengkap yang melalui penempatan QR Code
- Perlu lebih diperdalam hubungan antara warisan geodiversity, culture diversity, maupun *biodiversity*
- *Website* sebagai *visibility* perlu lebih disempurnakan lagi, misal opsi dual bahasa
- Badan pengelola untuk aktif ikut serta pada acara-acara internasional (APGN, GGN) untuk menambah jejaring



Gambar 37. Validasi Meratus UGGp

g. Persiapan Konferensi Nasional dan Rapat Koordinasi Nasional *Geopark* Indonesia 2024

Konferensi nasional *Geopark* merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh KNGI dengan mengundang peserta yang terdiri dari perwakilan pemerintah pusat dan daerah, BUMN, jaringan *geopark* Indonesia, akademisi dan peneliti, pegiat olahraga dan pemerhati lingkungan serta para pegiat industri kreatif yang bertujuan untuk mempertemukan para *stakeholders* dalam percepatan pengembangan dan pemanfaatan kawasan *Geopark* di Indonesia, serta memperkuat pemahaman serta dukungan dari berbagai pihak dalam mengembangkan *Geopark* di Indonesia.

Penyelenggaraan Konferensi Nasional (Konas) *Geopark* Indonesia tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 5-6 Desember 2024 bertempat di *Geopark* Kebumen yang terdiri dari rangkaian acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perencanaan *Geopark* Indonesia Tahun 2024 dan Anugerah BBWI.

Dukungan Kemenparekraf/Baparekraf dalam penyelenggaraan Konas *Geopark* antara lain sebagai berikut:

1. Dukungan kegiatan promosi dan publikasi *pre event* dan *event* Konferensi Nasional melalui Direktorat Pemasaran Nusantara dan Biro Komunikasi Kemenpar
2. Dukungan kegiatan promosi dan eksposur kegiatan konas melalui *campus digital campaign* dari Poltekpar

3. Dukungan penyampaian hasil penelitian dan kajian pariwisata di kawasan *geopark* dari mahasiswa maupun dosen Poltekpar sebagai akademisi
- h. Pendampingan Pengelolaan Sampah di Destinasi Wisata
Kemenparekraf melakukan pendampingan berupa pembentukan Unit Pengelolaan Sampah (UPS), penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Sampah sesuai karakteristik setiap destinasi, melaksanakan sosialisasi dan peningkatan kesadaran (*awareness campaign*) dan memberikan pelatihan-pelatihan terkait pengelolaan sampah di destinasi wisata kepada masyarakat, wisatawan dan pelaku usaha di sekitar destinasi wisata yang menjadi lokasi pendampingan. Program unggulan ini akan berlanjut di tahun berikutnya dengan tema kegiatan yaitu Gerakan Wisata Bersih.

Dalam pengembangan pariwisata di destinasi pariwisata maupun desa wisata, aspek kebersihan menjadi faktor yang penting, namun score Indonesia menurut *Travel and Tourism Development Index* (TTDI) tahun 2024 pada pilar *health & hygiene* posisi Indonesia berada di ranking 89 dari 119 negara dan berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Pilar *health & hygiene* juga menjadi pilar dengan skor terendah kedua yang didapat oleh Indonesia.

Sehingga pilar tersebut menjadi pilar prioritas yang perlu diintervensi untuk meningkatkan daya saing destinasi pariwisata Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat ekosistem pariwisata yang bersih dan sehat sangat dibutuhkan agar keberlanjutan sektor pariwisata dapat tercapai sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata.

Adapun rincian mengenai program atau kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2020-2023 sebagai berikut:

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
DANAU TOBA	2020	-	Koordinasi Pengembangan Destinasi Wisata Kopi di Toba (Fasilitasi Pengembangan infrastruktur dan Konektivitas Destinasi Wisata Kopi)	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu melalui pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di destinasi 2. Peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata 3. Mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait 4. Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata <p>Melakukan Sosialisasi dan Penerapan CHSE</p>
	2021	-	Rapat Koordinasi Dukungan Pembangunan di 5 Destinasi	Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021	-

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
			Pariwisata Super Prioritas (DPSP)		
	2022	Pendukung Penyusunan Dokumen Masterplan dan Siteplan Ekowisata Girsang, Kabupaten Simalungun, Desa Wisata Pangambatan-Kabupaten Karo	Promosi dan pemasaran pariwisata dikawasan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata Kabupaten Parapat 2. Kegiatan pendukung Kegiatan Tour de Bakti Raja dikabupaten Humbang Hasundutan 3. Pendukung kegiatan Seni <i>Etnic Musik</i> Jam Samosir yang dilaksanakan di Sipinggian <i>Beach</i> Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir pada tanggal 26 Maret 2022 4. Dukungan pada kegiatan <i>Youth Gathering</i> Naposobulung HKBP Distrik IV Toba 2022 Kabupaten Toba 5. Pelatihan <i>digital marketing</i> dan <i>e-commerce</i> bagi pelaku usaha UMKM kawasan danau toba. 6. Seminar penguatan digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah di pelabuhan ajiabata toba (it del dan BPODT). 7. Sian hita tu hita komitmen bersama untuk kemajuan UMKM kawasan Danau Toba. 8. Bimbingan teknis tentang pelayanan kepariwisataan bagi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi Toilet Pariwisata di Gedung Nasional Djauli Manik-Sidikalang Kabupaten Dairi, Pusat Informasi <i>Geopark</i> Kaldera Toba Sigulati Samosir 2. Revitalisasi Destinasi <i>Monkey Forest</i> di <i>Geosite</i> Sibaganding Parapat Kabupaten Simalungun 3. Pembangunan TIC di <i>Geopark</i> Silokek Kabupaten Sijunjung f. Dukungan perlengkapan Sarhunta <i>Homestay</i> di Hutaraja Lumban Suhi Suhi dan Huta Siallagan Samosir

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
				masyarakat di sekitar Geopark Kaldera Toba	
	2023	Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata	1. Pengembangan Jejaring Desa Wisata (JADESTA) 2. Dukungan Pembangunan di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas 3. Koordinasi Manajemen Krisis	1. Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional (Tugas Pembantuan) di 34 Provinsi 3. Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Penanggulangan Bencana 4. Pendampingan Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata	-
BOROBUDUR	2020	-	-	-	1. Dukungan Sistem Informasi Digital di (1) Desa Wisata Candirejo, Kab. Magelang, (2) Desa Wisata Dieng Kulon, Kab. Banjarnegara, dan (3) Desa Wisata Karangrejo, Kab. Magelang 2. Peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu melalui pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di destinasi 3. Peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
					<p>moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata</p> <p>4. Mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait</p> <p>5. Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata</p> <p>6. Melakukan Sosialisasi dan Penerapan CHSE</p>
	2021	-	Rapat Koordinasi Dukungan Pembangunan di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)	Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021	-
	2022	-	<p>1. Pembuatan Video Pendek Materi Promosi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul.</p> <p>2. Pembuatan Majalah Joglosemar Travel Guide, Joglosemar.</p> <p>3. Pembuatan Katalog Produk Ekraf di Kabupaten</p>	<p>1. Kajian Pengelolaan <i>Homestay</i> di Kawasan Prioritas Borobudur.</p> <p>2. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Penyusunan Roadmap Desa Wisata di Kawasan Prioritas Borobudur.</p> <p>3. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Penyusunan Kajian Pengelolaan <i>Homestay</i> di Kawasan Prioritas Borobudur.</p> <p>4. Bimbingan Teknis Tata Kelola Destinasi Borobudur <i>Trail of Civilization</i>.</p>	<p>1. Penciptaan Tari Gelangprojo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kulonprogo.</p> <p>2. Fasilitasi Toilet dan Sanitasi Desa Tinalah, Purwoharjo, Samigaluh, Kulonprogo</p>

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
			<p>Magelang, Kabupateng Magelang.</p> <p>4. <i>Konsinyering</i> Buku Kado 5 Tahun BOB untuk Kepariwisataaan Joglosemar, Porta Hotel Yogyakarta.</p>	<p>5. Roadmap Desa Wisata di Kawasan Prioritas Borobudur.</p> <p>6. <i>Focus Group Discussion</i> Digitalisasi Bisnis, Galeri Prawirotaman, Yogyakarta.</p> <p>7. <i>Focus Group Discussion</i> Pemasaran Digital Ekonomi Kreatif, Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta.</p> <p>8. Fokus Grup Discussion Kabupaten Sragen, Hotel Surya Sukowati Sragen.</p> <p>9. <i>Monitoring</i> Evaluasi Rebranding Gunung Kemukus, Kabupaten Sragen.</p> <p>10. <i>Focus Group Discussion</i> Rebranding Produk Ekonomi Kreative, Omah Plntar Kabupaten Sleman.</p> <p>11. Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Kreatif Fesyen di Kawasan Pariwisata Borobudur.</p> <p>12. Peningkatan Pendampingan dan Fasilitasi Pendaftaran NIB bagi UMKM di Desa Wisata Penyangga Zona Otorita.</p> <p>13. Pelatihan dan Sertifikasi <i>Hospitality</i> Sumber Daya</p>	

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
				<p>Manusia Parekraf di Desa Wisata Penyangga Zona Otorita Borobudur, Kota Yogyakarta.</p> <p>14. FGD Fasilitasi Peningkatan Kualitas Amenitas Kawasan Pariwisata Borobudur melalui Sayembara Deasin, Kawasan Pariwisata Borobudur.</p> <p>15. Kampanye Angkutan Wisata Bersih Lingkungan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur, Taman Wisata Candi Borobudur.</p>	
	2023	Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata	<p>1. Pengembangan Jejaring Desa Wisata (JADESTA).</p> <p>2. Fasilitasi Desa Wisata pada UNWTO 3rd Edition Best Tourism Village 2023.</p> <p>3. Dukungan Pembangunan di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas.</p>	<p>1. Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023</p> <p>2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional (Tugas Pembantuan) di 34 Provinsi</p> <p>3. Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Penanggulangan Bencana</p> <p>4. Pendampingan Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata</p>	-
BANGKA BELITUNG	2020	-	-	-	1. Peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu melalui

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
					<p>pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di destinasi</p> <p>2. Peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata</p> <p>3. Mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait</p> <p>4. Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata</p> <p>5. Melakukan Sosialisasi dan Penerapan CHSE</p>
	2021	-	-	Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021	-
	2022		Survei dan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Penyusunan Dokumen Perencanaan (<i>Masterplan</i>) Daya Tarik Wisata di Kawasan Pantai Lampu, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Selatan		

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
	2023	Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata	1. Pengembangan Jejaring Desa Wisata (JADESTA) 2. Fasilitasi Desa Wisata pada UNWTO 3rd Edition Best Tourism Village 2023	1. Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023. 2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional (Tugas Pembantuan) di 34 Provinsi. 3. Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Penanggulangan Bencana	-
BUKITTINGGI-PADANG	2020	-	-	-	1. Peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu melalui pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di destinasi. 2. Peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata 3. Mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait 4. Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
					dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata
	2021	-	-	Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021	-
	2022	Pendukung Penyusunan Dokumen Rencana Induk (<i>Masterplan</i>) Daya Tarik Wisata di KSPN Danau Maninjau	-	1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Destinasi melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Paket Wisata di Sumatera Barat. 2. Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penyusunan Rencana Induk (<i>Masterplan</i>) Daya Tarik Wisata (DTW) di KSPN Danau Maninjau, Sumatera Barat. 3. Sosialisasi Hasil Penyusunan Rencana Induk (<i>Masterplan</i>) Daya Tarik Wisata (DTW) di KSPN Danau Maninjau, Kabupaten Agam-Sumatera Barat	-
	2023	Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata	1. Pengembangan Jejaring Desa Wisata (JADESTA) 2. Fasilitasi Desa Wisata pada UNWTO 3rd Edition <i>Best Tourism Village</i> 2023	1. Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023. 2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional (Tugas Pembantuan) di 34 Provinsi. 3. Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Penanggulangan Bencana	-

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
BATAM-BINTAN	2020	-	-	-	1. Peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu melalui pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di destinasi 2. Peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata 3. Mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait 4. Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata 5. Melakukan Sosialisasi dan Penerapan CHSE 6. Revitalisasi Destinasi Pariwisata
	2021	-	-	Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021	-

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
	2022	-	-	Survei dan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Perencanaan (<i>Masterplan</i>) Daya Tarik Wisata/Desa Wisata di Kawasan Pantai Trikora, Kab. Bintan, Prov. Kepulauan Riau.	Dukungan Sarana Perahu Mesin dan <i>Life Jacket</i> untuk Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip, Kota Batam
	2023	Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata	Pengembangan Jejaring Desa Wisata (JADESTA)	1. Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023. 2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional (Tugas Pembantuan) di 34 Provinsi. 3. Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Penanggulangan Bencana	-
BANDUNG-HALIMUN-CILETUH	2020	-	-	-	1. Peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu melalui pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di destinasi 2. Peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
					3. Mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait 4. Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata 5. Melakukan Sosialisasi dan Penerapan CHSE
	2021	-	-	Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021	-
	2022	1. Dokumen <i>Masterplan/Siteplan</i> (DTW Pantai Manjaya) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab. Sukabumi, Jawa Barat. 2. Dokumen <i>Masterplan/Siteplan</i> (DTW Rest Area Ciseukeut) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab. Pandeglang, Banten	-	1. FGD Finalisasi Penyusunan <i>Masterplan/Siteplan</i> (DTW Rest Area Ciseukeut) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Pandeglang, Provinsi Jawa Barat. 2. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Destinasi Di Jawa Barat. 3. Bimbingan Teknis Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan untuk Destinasi Tangguh Bencana di Provinsi Jawa Barat.	-

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
	2023	Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata	Pengembangan Jejaring Desa Wisata (JADESTA)	1. Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023. 2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional (Tugas Pembantuan) di 34 Provinsi. 3. Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Penanggulangan Bencana	-
BROMO TENGGER SEMERU	2021	-	-	Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021	-
	2022	-	-	Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Tata Kelola Amenitas Wisata yang Berkelanjutan Untuk Mendukung Daya Saing Produk Wisata KSPN Bromo Tengger Semeru dan sekitarnya	-
	2023	Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata	Pengembangan Jejaring Desa Wisata (JADESTA)	1. Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional (Tugas Pembantuan) di 34 Provinsi 3. Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Penanggulangan Bencana	-
BANYUWANGI	2020	-	Rapat Koordinasi Penyusunan, Uji Kelayakan,	Pendampingan Implementasi Pengelolaan Sampah Plastik	1. Dukungan Sistem Informasi Digital di Desa Wisata Pujon Kidul, Kab.

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
			dan Persiapan Pendampingan Implementasi Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata Bahari TA 2021 di Kab. Banyuwangi		<p>Malang dan Desa Wisata Kemiren, Kab. Banyuwangi</p> <p>2. Peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu melalui pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di destinasi</p> <p>3. Peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata</p> <p>4. Mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait</p> <p>5. Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata</p> <p>6. Melakukan Sosialisasi dan Penerapan CHSE</p> <p>7. Revitalisasi Destinasi Pariwisata</p>
	2021	-	-	Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021	-

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
	2022	-	-	Dukungan Sarana Wisata Bahari di Pantai Tabuhan Banyuwangi	-
	2023	Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata	1. Pengembangan Jejaring Desa Wisata (JADESTA) 2. Koordinasi Manajemen Krisis	1. Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023. 2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional (Tugas Pembantuan) di 34 Provinsi. 3. Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Penanggulangan Bencana.	
MANDALIKA	2020	-	Penguatan Jejaring dan Peningkatan Kapasitas di Destinasi Pariwisata	Sosialisasi dan Persiapan Pendampingan Implementasi Juknis di Kawasan Mandalika, NTB	1. Peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu melalui pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di destinasi 2. Peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata 3. Mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait 4. Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
					<p>Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata</p> <p>5. Melakukan Sosialisasi dan Penerapan CHSR</p> <p>6. Revitalisasi Destinasi Pariwisata</p>
	2021	-	Rapat Koordinasi Dukungan Pembangunan di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)	Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021	-
	2022	Pemetaan Desa Wisata Penyangga di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika, Destinasi Pariwisata Super Prioritas Mandalika	-	<p>1. Bimtek Pengembangan Desa Wisata di Lombok-Gili Tramen, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Penyangga Destinasi Pariwisata Super Prioritas Mandalika).</p> <p>2. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola <i>Homestay</i> di Dusun Mong, Mandalika, Destinasi Pariwisata Super Prioritas Mandalika.</p> <p>3. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola <i>Homestay</i> di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Penyangga Destinasi Pariwisata Super Prioritas Mandalika).</p>	-

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
	2023	Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata	1. Pengembangan Jejaring Desa Wisata (JADESTA). 2. Fasilitasi Desa Wisata pada UNWTO 3rd Edition Best Tourism Village 2023. 3. Dukungan Pembangunan di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas.	1. Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023. 2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional (Tugas Pembantuan) di 34 Provinsi. 3. Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Penanggulangan Bencana. 4. Pendampingan Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata	-
LABUAN BAJO	2020	-	1. Rapat Koordinasi Penyusunan, Uji Kelayakan, dan Persiapan Pendampingan Implementasi Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata Bahari TA 2021 di Labuan Bajo 2. Bantuan Lauk Pauk Siap Saji (BALASA)	Dukungan Penyusunan dan Simulasi Protokol Keamanan dan Keselamatan Melalui Scenario Planning di 5 DSP di Labuan Bajo	1. Peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu melalui pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di destinasi 2. Peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata 3. Mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait 4. Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
					Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata 5. Revitalisasi Destinasi Pariwisata
	2021	-	Rapat Koordinasi Dukungan Pembangunan di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)	Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021	-
	2022	Profiling Mapping Dive Sites Outside Komodo	-	1. Wisata Desinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo. 2. Dukungan Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata Wilayah Koordinatif BPOLBF. 3. Dukungan Persiapan dan Peresmian <i>Resort</i> Loh Buaya Pulau Rinca dan Waterfront City Labuan Bajo. 4. Pengembangan Akses Digital Desa Wisata bekerjasama dengan Poltek Kupang.	Fasilitasi Dukungan Atraksi Wisata Pengadaan Peralatan Seni Budaya di Desa Wisata
	2023	Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata	1. Pengembangan Jejaring Desa Wisata (JADESTA). 2. Dukungan Pembangunan di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas.	1. Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023. 2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional (Tugas Pembantuan) di 34 Provinsi.	-

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
				3. Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Penanggulangan Bencana. 4. Pendampingan Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata.	
LIKUPANG	2020	-	1. Penguatan Jejaring dan Peningkatan Kapasitas di Destinasi Pariwisata 2. Bantuan Lauk Pauk Siap Saji (BALASA)	-	1. Dukungan Sistem Informasi Digital di (1) Desa Wisata Candirejo, Kab. Magelang, (2) Desa Wisata Dieng Kulon, Kab. Banjarnegara, dan (3) Desa Wisata Karangrejo, Kab. Magelang 2. Peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu melalui pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di destinasi 3. Peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata 4. Mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait 5. Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
					dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata 6. Revitalisasi Destinasi Pariwisata
	2021	-	Rapat Koordinasi Dukungan Pembangunan di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)	Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021	-
	2022	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola <i>Homestay</i> di Desa Wisata Likupang, Desa Marinsow, Destinasi Pariwisata Super Prioritas Manado-Likupang. 2. Bimtek Pengembangan Destinasi Pariwisata di Daya Tarik Wisata (DTW) Tumatenden, Desa Wisata Airmadidi Bawah, Kabupaten Minahasa Utara, Destinasi Pariwisata Super Prioritas Manado-Likupang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola <i>Homestay</i> di Desa Wisata Likupang, Desa Marinsow, Destinasi Pariwisata Super Prioritas Manado-Likupang. 2. Bimtek Pengembangan Destinasi Pariwisata di Daya Tarik Wisata (DTW) Tumatenden, Desa Wisata Airmadidi Bawah, Kabupaten Minahasa Utara, Destinasi Pariwisata Super Prioritas Manado-Likupang. 	-

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
	2023	Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata	1. Pengembangan Jejaring Desa Wisata (JADESTA). 2. Dukungan Pembangunan di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas.	1. Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023. 2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional (Tugas Pembantuan) di 34 Provinsi. 3. Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Penanggulangan Bencana. 4. Pendampingan Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata.	-
WAKATOBI	2020	-	-	-	Revitalisasi Destinasi Pariwisata
	2021	-	-	Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021	-
	2022	-	-	Bimbingan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata di Desa Wisata Sumbersari, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Penyangga Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi	-
	2023	Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata	Pengembangan Jejaring Desa Wisata (JADESTA)	1. Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023. 2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Sistem Informasi	-

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
				Kepariwisata Nasional (Tugas Pembantuan) di 34 Provinsi. 3. Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Penanggulangan Bencana.	
RAJA AMPAT	2020	Identifikasi dan Implementasi Pengembangan Tata Kelola Manajemen Pengunjung di Destinasi Pariwisata	Bantuan Lauk Pauk Siap Saji (BALASA)	Pemberian Dukungan Implementasi Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Publik di destinasi Pariwisata di Raja Ampat	Revitalisasi Destinasi Pariwisata
	2021	-	-	Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021	-
	2022	-	-	Dukungan penyusunan dokumen <i>Roadmap</i> Desa Wisata dan Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola <i>Homestay</i> Mangrove Klawalu-Kota Sorong, Kota Sorong (Penyangga Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat).	-
	2023	Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata	Pengembangan Jejaring Desa Wisata (JADESTA)	1. Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023. 2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional (Tugas Pembantuan) di 34 Provinsi.	-

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
				3. Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Penanggulangan Bencana.	
MOROTAI	2021	-	-	Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021	-
	2023	Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata	Pengembangan Jejaring Desa Wisata (JADESTA)	1. Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional (Tugas Pembantuan) di 34 Provinsi 3. Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Penanggulangan Bencana.	-
SAMBAS - SINGKAWANG	2020	-	Bantuan Lauk Pauk Siap Saji (BALASA)	-	Revitalisasi Destinasi Pariwisata
	2021	-	-	Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021	-
	2022	-	-	1. Pariwisata Terdampak Pandemi Covid-19 di Kota Pontianak, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat (Penyangga Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang). 2. Bimtek Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat	-

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
	2023	Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata	Pengembangan Jejaring Desa Wisata (JADESTA)	1. Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023. 2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional (Tugas Pembantuan) di 34 Provinsi. 3. Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Penanggulangan Bencana.	-
DERAWAN - BERAU	2020	-	-	-	Revitalisasi Destinasi Pariwisata
	2021	-	-	Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021	-
	2022	-	-	1. Bimtek Penguatan Konten Kreator dalam mendukung pengembangan destinasi di desa wisata, Kabupaten Berau, Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau. 2. Bimtek Penguatan Konten Kreator dalam mendukung pengembangan destinasi di desa wisata, Kabupaten Berau, Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau. 3. Bimtek Penguatan Peran Pelaku Pariwisata dalam Pengembangan Destinasi pada Desa Wisata di Kab. Berau pada Ekowisata	-

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
				Mangrove Teluk Semanting, Kabupaten Berau, Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau	
	2023	Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata	Pengembangan Jejaring Desa Wisata (JADESTA)	1. Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023. 2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional (Tugas Pembantuan) di 34 Provinsi.	-
TORAJA - MAKASSAR - SELAYAR	2020	-	Bantuan Lauk Pauk Siap Saji (BALASA)	-	-
	2021	-	-	Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021	-
	2022	-	-	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola <i>Homestay</i> di Desa Wisata Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan (Penyangga Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar)	-
	2023	Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata	Pengembangan Jejaring Desa Wisata (JADESTA)	1. Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023. 2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Sistem Informasi	-

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
				Kepariwisata Nasional (Tugas Pembantuan) di 34 Provinsi. 3. Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Penanggulangan Bencana.	
BIAK - TELUK CENDRAWASIH	2021	-	-	Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021	-
	2022	-	-	FGD Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Berbasis Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi dalam Pengembangan Destinasi Wisata Berkualitas, Terintegrasi dan Berkelanjutan di Biak Numfor, Papua, Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cenderawasih	Revitalisasi Toilet di DTW Goa Jepang, Kab. Biak Numfor, Papua, Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cenderawasih.
	2023	Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata	Pengembangan Jejaring Desa Wisata (JADESTA)	1. Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional (Tugas Pembantuan) di 34 Provinsi 3. Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Penanggulangan Bencana.	-

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
BALI	2020	-	1. Penerapan Tourism Hub di Destinasi Pariwisata Prioritas 2. Panglipuran, Desa Wisata Pemuteran, dan Desa Wisata Kutuh 3. Penguatan Jejaring dan Peningkatan Kapasitas di Destinasi Pariwisata	Bimbingan Teknis Pengembangan Infrastruktur Destinasi Pariwisata	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pengalaman Wisatawan di Destinasi Wisata dengan Menggunakan Teknologi Digital
	2021	-	-	Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021	-
	2022	-	-	1. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Pemetaan Desa Wisata Bali Aga. Destinasi Revitalisasi Bali. 2. FGD Penguatan Desa Wisata Penaban, Bali. Destinasi Revitalisasi Bali. 3. FGD Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah terkait DAK Fisik Berbasis Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi dalam Pengembangan Destinasi Wisata Berkualitas, Terintegrasi dan Berkelanjutan di Bali. Destinasi Revitalisasi Bali.	-
	2023	Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata	1. Pengembangan Jejaring Desa Wisata (JADESTA).	1. Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023. 2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Sistem Informasi	-

DESTINASI	Tahun	PERENCANAAN	KOORDINASI / JEJARING	BIMBINGAN TEKNIS	Dukungan 3A
			2. Fasilitasi Desa Wisata pada UNWTO 3rd Edition Best Tourism Village 2023	Kepariwisataan Nasional (Tugas Pembantuan) di 34 Provinsi. 3. Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Penanggulangan Bencana. 4. Pendampingan Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata	

Tabel 36. Daftar Kegiatan Tahun 2020-2023 untuk 19 Destinasi Prioritas yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan

Di tahun 2021, indikator kinerja jumlah destinasi pariwisata yang menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan mengalami keberhasilan dalam mencapai target realisasi yang dilakukan di 19 destinasi pariwisata dengan berbagai program atau kegiatan sertifikasi desa wisata berkelanjutan di 16 lokasi, Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 yang dilaksanakan di 50 lokasi, dukungan pembangunan di 5 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPSP), dan pendampingan implementasi pengelolaan sampah plastik di destinasi baik destinasi wisata bahari maupun desa wisata yang dilakukan 5 titik lokasi *pilot project*.

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja tersebut telah kembali mencapai target di 19 titik destinasi dengan program atau kegiatan tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Program atau kegiatan yang terlaksana dalam mendukung capaian indikator kinerja tersebut yaitu sertifikasi desa wisata berkelanjutan di 4 lokasi, Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022 yang dilakukan di 50 lokasi yang berbeda dari tahun sebelumnya, dan pendampingan implementasi pengelolaan sampah plastik di destinasi di 6 lokasi.

Sedangkan pada tahun 2023, indikator kinerja ini kembali berhasil mencapai target pemenuhan di 19 destinasi melalui program atau kegiatan yang hampir sama dengan tahun sebelumnya dan terdapat beberapa program atau kegiatan yang baru dilaksanakan di tahun 2023. Program atau kegiatan tersebut ialah Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023, dukungan pembangunan di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), sosialisasi pendampingan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional (Tugas Pembantuan) di 34 provinsi, fasilitasi penguatan tata kelola destinasi pariwisata penanggulangan bencana, koordinasi manajemen krisis, FGD koordinasi dan sinergitas program kegiatan lintas direktorat di Lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, ekspose pedoman pariwisata tangguh: validasi hasil uji coba profil resiliensi destinasi pariwisata, pendampingan pengelolaan sampah plastik di destinasi wisata, pengembangan kawasan konservasi, dan pengembangan ekosistem pariwisata pengembangan *shelter tourism*.

Seluruh program atau kegiatan yang telah disebutkan di atas memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengembangan destinasi wisata di Indonesia. Melalui berbagai program atau kegiatan

tersebut, para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat setempat, dapat memperoleh panduan, pelatihan, serta pendampingan yang lebih komprehensif dalam mengelola destinasi wisata secara berkelanjutan. Selain itu, program tersebut juga berperan dalam meningkatkan kualitas layanan, memperkuat promosi pariwisata, serta mendorong kolaborasi antar-pihak guna menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih solid. Dengan demikian, destinasi wisata di berbagai daerah dapat lebih mandiri, mampu menghadapi tantangan global, dan berkontribusi secara nyata dalam memajukan sektor pariwisata daerah, yang pada akhirnya juga berdampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah memberikan banyak manfaat yang nyata bagi pengembangan destinasi wisata di berbagai daerah di Indonesia. Keberhasilan program-program ini tidak hanya bergantung pada pelaksanaannya, tetapi juga pada komitmen destinasi yang telah mendapatkan manfaat tersebut untuk terus melanjutkan dan mengembangkan program atau kegiatan yang telah diperoleh serta menjadikan destinasi wisata yang menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan.

3.1.4 Meningkatnya Lama Tinggal (*Length of Stay*) Wisatawan Mancanegara di Destinasi

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Realisasi	Persentase Realisasi
Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara di Destinasi	Lama Tinggal (<i>Length of Stay</i>) wisatawan mancanegara di Destinasi	3-5 Hari	2,17 hari	72,4%

Tabel 37. Realisasi Sasaran Program "Lama Tinggal (*Length of Stay*) Wisatawan Mancanegara di Destinasi"

Pada tahun 2024, realisasi sasaran program ini masih mengikuti tren negatif sejak tahun 2022 dengan capaian jumlah realisasi yang kembali berada di bawah target 3-5 hari. Setelah melakukan evaluasi dan perbaikan sejak akhir tahun 2022, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur menyimpulkan beberapa masalah utama yang masih menjadi faktor penghambat keberhasilan, yaitu:

1. Metode Penghitungan

Penghitungan kinerja ini didasarkan pada *Survey Tingkat Penghunian Kamar Hotel (VHTS)* yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil survey tersebut kemudian diproses kembali oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. VHTS dihitung berdasarkan total malam yang dihabiskan wisatawan mancanegara di seluruh jenis akomodasi dibagi dengan total jumlah check in. Responden didapatkan melalui sensus pada seluruh hotel berbintang di suatu lokasi, dan sampel untuk hotel non bintang dan akomodasi non formal. Metode sampel ini menciptakan kemungkinan terlewatnya wisatawan dengan lama tinggal yang lebih lama.

2. Pola Perjalanan

Beberapa DTW memang didesain untuk waktu kunjungan yang singkat tapi dengan biaya yang tinggi. Hal tersebut terkadang sulit untuk bisa diubah karena DTW tersebut sudah dibangun dengan tujuan pola perjalanan yang singkat. Pola perjalanan singkat tersebut juga diperkuat dengan koneksi dengan lokasi lain, sehingga semakin sulit untuk memperpanjang pola perjalanan di satu lokasi.

3. Karakteristik Wisatawan

Wisatawan dengan mobilitas tinggi menciptakan pengaruh negatif pada indikator kinerja ini. Tren tinggal di kapal atau akomodasi non formal lainnya juga semakin menyulitkan

pengumpulan data lama tinggal secara akurat. Kemudahan akses juga membuat wisatawan bisa memilih lebih banyak lokasi dalam satu kunjungan dengan waktu tempuh perpindahan yang lebih singkat.

Berikut adalah data capaian rata-rata lama tinggal wisman di destinasi pada 38 provinsi tahun 2024 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui VHTS:

No.	Provinsi	Rata-Rata Lama Tinggal (Hari)
1.	Aceh	2,21
2.	Sumatera Utara	1,35
3.	Sumatera Barat	1,25
4.	Bengkulu	1,30
5.	Riau	1,27
6.	Kepulauan Riau	1,95
7.	Jambi	1,50
8.	Sumatera Selatan	1,31
9.	Kep. Bangka Belitung	1,67
10.	Lampung	1,27
11.	DKI Jakarta	1,54
12.	Jawa Barat	1,35
13.	Banten	1,36
14.	Jawa Tengah	1,33
15.	DI Yogyakarta	1,50
16.	Jawa Timur	1,47
17.	Bali	3,05
18.	Nusa Tenggara Barat	2,48
19.	Nusa Tenggara Timur	1,90
20.	Kalimantan Selatan	3,08
21.	Kalimantan Barat	1,88
22.	Kalimantan Timur	2,48
23.	Kalimantan Tengah	1,86
24.	Kalimantan Utara	1,91
25.	Sulawesi Utara	1,98
26.	Gorontalo	1,84
27.	Sulawesi Tengah	1,82
28.	Sulawesi Selatan	2,31
29.	Sulawesi Tenggara	1,74
30.	Sulawesi Barat	1,95
31.	Maluku	2,07
32.	Maluku Utara	1,88

No.	Provinsi	Rata-Rata Lama Tinggal (Hari)
33.	Papua	2,35
34.	Papua Barat	2,10
35.	Papua Barat Daya	1,32
36.	Papua Selatan	2,08
37.	Papua Tengah	2,74
38.	Papua Pegunungan	2,98
Rata-Rata Lama Tinggal Wisman		2,17

Tabel 38. Capaian Rata-Rata Lama Tinggal Wisman Tahun 2024

Upaya dalam mencapai target IKSP ini pada tahun 2024 dilakukan secara terintegrasi dengan IKSP “Tersedianya Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas yang Dikembangkan”. Lama tinggal menjadi salah satu indikator sekaligus tujuan keberhasilan dari pengembangan destinasi pariwisata. Dampak dari 4 kategori program pada IKSP ini memiliki detail yang cukup berbeda, jika dibandingkan dengan IKSP “Tersedianya Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas yang Dikembangkan”, yaitu:

1. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Destinasi

Pengembangan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang keberlanjutan melalui pengelolaan destinasi yang terstruktur. Dengan konsep ekosistem, diharapkan wisatawan dapat menikmati beragam pengalaman berwisata dalam satu destinasi secara terintegrasi. Sehingga wisatawan bisa memenuhi kebutuhan berwisata dalam 1 destinasi dan tidak perlu mempertimbangkan wisata singkat ke banyak destinasi. Seiring dengan tingginya lama tinggal wisatawan, maka akan semakin sulit bagi pengelola destinasi untuk menyembunyikan kekurangan mereka.

2. Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal Pengembangan Destinasi

SDM adalah salah satu hal krusial dalam mencapai target ini. Interaksi manusia bisa mengubah persepsi wisatawan terhadap daya tarik wisata, terlebih lagi, interaksi dengan orang yang sama secara berulang. Selain SDM yang berinteraksi langsung dalam pemenuhan layanan kepariwisataan, SDM yang tidak bersinggungan langsung juga menjadi faktor yang cukup menentukan. Kepastian kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar akan mampu meningkatkan pengalaman interaksi manusia dalam

membentuk suasana wisata yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan.

3. Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi

Durasi tinggal yang lama juga akan menciptakan permintaan yang berbeda, yang akan semakin jauh dari permintaan inti dalam melaksanakan wisata. Kondisi ini kemudian akan membutuhkan kerja sama dengan lebih banyak pihak. Maka pelaksanaan penguatan jejaring tata kelola destinasi pariwisata diharapkan mampu menghasilkan kolaborasi antar pihak untuk menciptakan pengalaman terbaik bagi wisatawan.

4. Dukungan Pengembangan Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas Destinasi

Salah satu dari 4 pilar pariwisata adalah destinasi, dengan 3 unsur pembangunnya; Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas. Dalam rangka menguatkan salah satu pilar inti pariwisata, Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur juga mendorong penguatan destinasi melalui dukungan pengembangan yang bersifat stimulan, bukan sebagai modal utama. Dukungan yang bersifat stimulan ini diharapkan dapat membantu pengelola destinasi untuk beroperasi dan mendorong pengembangan lainnya.

Kondisi pariwisata Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kondisi saat pandemi Covid-19 tahun 2020-2021. Pada saat itu, sulitnya mobilitas manusia membuat wisatawan cenderung memilih untuk berdiam di satu destinasi, sekaligus membatasi interaksi antar manusia. Kondisi tahun 2020-2021 menjadi kondisi yang sangat ideal untuk meningkatkan durasi lama tinggal wisatawan di suatu destinasi. Secara data, hal tersebut juga mampu meningkatkan kualitas responden karena pengumpulan data relatif lebih mudah yang disebabkan oleh ketatnya pencatatan mobilitas manusia.

Semenjak tahun 2022 saat pandemi Covid-19 mulai melandai, pola perjalanan wisatawan kembali seperti kondisi sebelum Covid-19, atau bahkan lebih singkat dari sebelumnya. Peningkatan tren media sosial juga turut berperan pada rendahnya pencapaian IKSP ini. Karena informasi yang disampaikan di media sosial biasanya sangat cepat, maka menghasilkan banyak keputusan berwisata secara lebih tidak

terencana/impulsif dengan tujuan destinasi yang lebih beragam. Rencana wisata yang impulsif cenderung menghasilkan durasi tinggal yang pendek.

Sampai dengan akhir tahun 2024, rendahnya kemampuan pengelola destinasi untuk menciptakan ekosistem yang nyaman juga masih banyak terjadi. Sehingga tidak sedikit pengelola destinasi yang gagal memenuhi kebutuhan wisatawan saat mereka memutuskan untuk tinggal lebih lama di suatu destinasi. Jika dilihat dari faktor yang lebih kecil lagi, ada beberapa destinasi yang masih gagal membuat atraksi utama mereka layak untuk dinikmati oleh wisatawan yang memilih untuk tinggal lebih lama di destinasi tersebut.

Dengan kondisi seperti itu, maka pada tahun 2022-2024, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur tetap gagal memenuhi target yang ditetapkan, meskipun telah melakukan beragam upaya untuk mencapai target yang ditetapkan. Sebagai evaluasi untuk pelaksanaan ke depan, diharapkan terjadi 4 perubahan signifikan yaitu:

1. Peningkatan kualitas data yang dihitung sehingga bisa lebih representatif atas semua jenis wisatawan
2. Perencanaan dan implementasi yang lebih berorientasi pada pola perjalanan dengan durasi lama tinggal yang panjang
3. Membuat *profiling* wisatawan untuk menciptakan strategi konversi minat dari durasi lama tinggal yang singkat menjadi durasi lama tinggal yang panjang
4. Merencanakan pembangunan dan kolaborasi untuk mengakomodir kebutuhan yang akan muncul seiring dengan meningkatnya durasi lama tinggal wisatawan

3.1.5 Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Internal Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Realisasi	Persentase Realisasi
Meningkatnya Kepuasan Satker Terhadap Layanan Internal Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	Tingkat Kepuasan Satker Terhadap Layanan Internal Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	3,5 Skala Likert	3,54 Skala Likert	101%

Tabel 39. Realisasi Capaian Sasaran Program "Meningkatnya Kepuasan Satker Terhadap Layanan Internal Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur"

Layanan internal Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur mendapatkan realisasi 3,5 dalam skala likert. Pencapaian ini menjaga tren peningkatan sejak tahun 2021, tahun awal ditetapkan SP ini. Pemenuhan SP ini dilaksanakan melalui 4 dimensi layanan, yaitu perencanaan, keuangan, hukum, serta tata usaha dan rumah tangga.

1. Perencanaan dan Pemantauan

Layanan ini dilakukan sepanjang tahun untuk kebutuhan di tahun berjalan dan tahun 2025. Fasilitasi komunikasi kepada biro perencanaan dan keuangan serta K/L lain seperti Bappenas dan Kantor Staf Presiden juga dilaksanakan pada layanan ini. Fokus utama dari layanan perencanaan dan pemantauan adalah menjadi pemberdaya (*enabler*) bagi seluruh rancangan program untuk pemenuhan indikator kinerja yang ditargetkan. Berikut adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam pelayanan perencanaan dan pemantauan:

No.	Kegiatan	Deskripsi
1.	Pendampingan Rencana Kerja dan RKAKL	Pendampingan dilakukan untuk Tahun Anggaran 2024, termasuk perubahan yang disebabkan oleh <i>quick win</i> Menteri. Secara simultan untuk perumusan Tahun 2025.
2.	Pendampingan perumusan SAKIP dan Rencana Strategis	Pendampingan dilakukan berupa penyusunan Lakin dan Laporan Tahunan 2024, Pengisian E-SAKIP oleh Kementerian PAN RB. Dilakukan juga pendampingan penyusunan rencana strategis tahun 2025 seiring dengan berakhirnya RPJMN.

No.	Kegiatan	Deskripsi
3.	Pendampingan pengisian pantauan KSP, dan Persi	Pendampingan dilakukan untuk pelaporan pemantauan kinerja dan anggaran oleh eksternal.
4.	Pendampingan DAK	Penyusunan dan kompilasi data
5.	Pendampingan Bahan	Koordinasi dan penyusunan bahan untuk kebutuhan pimpinan serta kebutuhan eksternal.

Tabel 40. Daftar Kegiatan Pelayanan Perencanaan dan Pemantauan di Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024

2. Keuangan

Sepanjang tahun 2024 terjadi beberapa peristiwa penting yang memengaruhi pengelolaan keuangan di Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Beberapa peristiwa penting tersebut adalah nilai IKPA, perubahan sistem pembayaran, pedoman perjalanan dinas, implementasi *Cash Management System* (CMS), peraturan baru DJPB, dan TUP. Secara simultan, layanan keuangan rutin juga terus dilakukan kepada satker. Berikut adalah tabel detail kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan layanan keuangan terhadap internal Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur:

No.	Kegiatan	Narasumber	Latar Belakang
1.	Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 di Lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	KPPN Jakarta VI, Kanwil DJPB Provinsi DKI Jakarta, dan DJA	Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan tahun 2024 yang lebih tertata dan akuntabel melalui evaluasi 2023 dan sosialisasi UP dan KKP
2.	Sosialisasi IKPA dan Perpajakan di Lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, DJP & KPPN Jakarta VI	Untuk meningkatkan pemahaman para pengelola keuangan serta meningkatkan nilai IKPA Satker Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur menjadi sangat baik melalui sosialisasi PMK 168 tahun 2023, penggunaan KKP, pengisian <i>output</i> , dan penggunaan Digipay
3.	Rapat Pembuatan KKP	Bank Mandiri	Implementasi penggunaan KKP oleh Setiap ketua tim di Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan

No.	Kegiatan	Narasumber	Latar Belakang
			Infrastruktur sebagai alat pembayaran dalam melakukan perjalanan dinas
4	Rapat Sosialisasi Mekanisme Pembayaran LS Penerima di Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	KPPN Jakarta VI	Sosialisasi perubahan sistem pembayaran di Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur terkait perjalanan dinas yang semula melalui LS Bendahara menjadi LS Penerima
5	Sosialisasi Pedoman Penyelenggara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Optimalisasi Penggunaan KKP di Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	Biro Renkeu dan KPPN Jakarta VI	Dalam rangka memahami pedoman perjalanan dinas Kemenparekraf/Baparekraf No. PDM/2/HK.01.04/S/2024
6	Sosialisasi Implementasi Cash Management System (CMS)	Bank Mandiri	Mendaftarkan pengguna CMS yaitu para PPK, BP, dan BPP sebagai wadah dalam transaksi yang perlu menggunakan jasa perbankan
7	Kegiatan Percepatan Pemenuhan Nilai ITKP Minimal Baik Tahun 2024	Biro UHP	Monitoring dan evaluasi demi tercapainya nilai ITKP Baik yaitu diatas 70
8	Sosialisasi Simplifikasi SPM	KPPN Jakarta VI	Adanya himbauan dari KPPN untuk mengurangi jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) dengan meningkatkan nilai di setiap SPM
9	Sosialisasi Implementasi Cash Management System (CMS) II	Bank Mandiri	Sosialisasi Implementasi Cash Management System (CMS) kepada para PPK, BP, dan BPP terkait bagaimana cara menggunakan CMS
10	Sosialisasi Pedoman Langkah-Langkah Akhir Tahun di Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	KPPN Jakarta VI	Sosialisasi terkait peraturan DJPB No. Per-13/PB/2024 tentang tata cara pertanggungjawaban keuangan akhir TA 2024
11	Sosialisasi Pedoman Langkah-Langkah Akhir Tahun di Lingkungan Deputi Bidang	KPPN Jakarta VI	Adanya himbauan dari KPPN agar tidak ada pengembalian TUP pada akhir tahun dan mekanisme pembayaran terkait anggaran banper yang baru terbuka

No.	Kegiatan	Narasumber	Latar Belakang
	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur II		blokirnya serta perpindahan anggaran untuk kegiatan <i>Quick Win</i> 2024

Tabel 41. Daftar Kegiatan Keuangan di Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024

3. Hukum

Dalam melaksanakan pemenuhan SP, beberapa program membutuhkan aturan khusus yang ditetapkan baik di tingkat Eselon 1 maupun Menteri. Dan sebagian program juga membutuhkan penetapan khusus oleh Eselon 1 atau Menteri. Bersamaan dengan layanan terkait aturan dan penetapan, layanan hukum juga diberikan untuk memperkuat komitmen kerja sama antara pihak eksternal dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara umum ataupun khusus pada Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur melalui *Memorandum of Understanding*. Berikut adalah daftar produk hukum yang pembuatannya dilayani oleh layanan hukum:

No	MoU/PKS	Tentang	Ruang Lingkup
1.	MOU KEMENPAREKRAF/ BAPAREKRAF DAN PT AMARTHA NUSANTARA RAYA Pemrakrasa: Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Masa Berlaku: 3 tahun (2024-2027) Tanggal: 19-10-2024 (Penandatanganan Plt. Sesmen)	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Pertukaran data dan/atau informasi; 2. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif; 3. pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif; 4. pengembangan industri dan investasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; 5. pengembangan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif; 6. pengembangan produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan (event) pariwisata dan ekonomi kreatif; 7. pengembangan ekonomi digital dan produk kreatif; dan 8. Kerja sama dan/atau kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

No	MoU/PKS	Tentang	Ruang Lingkup
2.	MOU DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR DAN PT BANK CENTRAL ASIA Masa Berlaku: 1 tahun (2024-2025) Tanggal: 16-11-2024 (Penandatanganan Deputi)	Kolaborasi Pengembangan Desa Wisata	1. Pemanfaatan dan Pertukaran data dan/atau informasi; 2. Pelatihan dan Pendampingan bagi pengelola desa wisata serta penguatan tata kelola Desa Wisata; 3. Pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan pariwisata di Desa Wisata; dan 4. Kerja Sama/kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
3.	MOU DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR DAN PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI Masa Berlaku: 2 tahun (2024 – 2026) Tanggal: 23-01-2024 (Penandatanganan Deputi)	Kolaborasi Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Pemanfaatan dan pertukaran data dan/atau informasi; 2. Pengembangan sarana dan prasarana di destinasi pariwisata; 3. Pendampingan dan penguatan daya tarik wisata; 4. Peningkatan kapasitas tata kelola destinasi pariwisata; dan 5. Kerja sama atau kegiatan lain sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing PIHAK.
4.	MOU DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR DAN DUSIT INTERNASIONAL Masa Berlaku: 1 tahun (2024 – 2025) Tanggal: 23-01-2024 (Penandatanganan Deputi)	Kolaborasi Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Pertukaran data dan/atau informasi; 2. Pengembangan sarana dan prasarana di destinasi pariwisata; 3. Pendampingan dan penguatan daya tarik wisata; 4. Peningkatan kapasitas tata kelola destinasi pariwisata; dan 5. Kerja sama atau kegiatan lain sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing PIHAK.
5.	PKS KEMENPAREKRAF/ BAPAREKRAF DAN TIKTOK PTE. LTD. Masa Berlaku: 5 tahun (2024-2029) Tanggal: 23-01-2024	Peningkatan Kapasitas Digital dan Penyediaan Jaringan Internet di Ruang Kreatif Dan/Atau Destinasi Pariwisata Di Indonesia	1. Pelaksanaan Program berupa pelatihan dan edukasi dalam rangka peningkatan literasi dan keterampilan terkait digital ekonomi kreatif bagi masyarakat lokal serta dukungan penyediaan jaringan internet di wilayah yang memiliki keterbatasan akses internet di Lokasi Pelaksanaan Program; 2. Pertukaran data dan informasi untuk keperluan perencanaan, implementasi, serta

No	MoU/PKS	Tentang	Ruang Lingkup
	(Penandatanganan Deputi)		pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kapasitas digital dan penyediaan jaringan internet di Lokasi Pelaksanaan Program; dan 3. Sosialisasi dan/atau publikasi program peningkatan kapasitas digital dan penyediaan jaringan internet yang dilakukan oleh PARA PIHAK.
6.	PKS DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR DAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN Masa Berlaku: 2 tahun (2024 – 2026) Tanggal: 02-06-2024 (Penandatanganan Deputi)	Pengembangan Destinasi Pariwisata Ramah Muslim	1. Pertukaran data dan informasi terkait pengembangan destinasi pariwisata ramah muslim; 2. Penyusunan kajian pengembangan destinasi pariwisata ramah muslim; 3. Sosialisasi pengembangan destinasi pariwisata ramah muslim; 4. Mendorong penguatan jejaring dan aktivasi pengembangan destinasi pariwisata ramah muslim di destinasi wisata; dan 5. Pendampingan akselerasi pelaksanaan sertifikasi halal produk di desa wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 42. Daftar Kegiatan Hukum di Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024

4. Tata Usaha dan Rumah Tangga

Tujuan utama dari layanan tata usaha dan rumah tangga ini adalah memastikan proses bekerja di Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dapat berjalan tanpa hambatan di luar substansi. Layanan ini memang sama sekali tidak terkait dengan substansi pariwisata dan ekonomi kreatif, akan tetapi layanan ini berperan penting bagi pemenuhan substansi yang dilakukan di Deputi Bidang Pengembangan Destinasi. Berikut adalah detail kegiatan yang dilaksanakan untuk melayani tata usaha dan rumah tangga:

No.	Klasifikasi	Output/Outcome
1.	Melakukan Tata Usaha, Persuratan, Rumah Tangga dan Arsip	a. SOP alur surat keluar masuk Deputi, SOP Pelaporan Bahan Pimpinan, SOP <i>join zoom Meeting</i> Rapat Terbatas di Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur/Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur b. Daftar surat masuk menggunakan <i>Google Sheet</i> . c. Penataan ulang arsip in-aktif di <i>Record Center</i> Gunung Putri d. Pengiriman arsip in-aktif ke <i>Record Center</i> Gunung Putri e. Pembedaan Arsip Aktif dan In-Aktif f. SOP Pengolahan Arsip Aktif dan Vital, SOP Pengelolaan Kearsipan

No.	Klasifikasi	Output/Outcome
2.	Pengelolaan Sistem Informasi	Pembaharuan dan penambahan titik Akses Poin untuk jaringan <i>Wireless Internet</i> di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Gedung Sapta Pesona Lantai 14 dan Gedung Kesenian Jalan Kimia
3.	Perlengkapan dan Penatausahaan BMN	a. Penghapusan BMN (Berupa persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat di Kepulauan Seribu) b. SOP Pengelolaan BMN c. Inventarisasi BMN Tahap I sudah dilaksanakan untuk kategori BMN yang memiliki Kartu Identitas Barang (KIB)
4.	Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Pejabat Eselon I dan II dan Penerapan Aplikasi Srikandi di Lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	a. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) melalui pendaftaran sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai Besar Sertifikasi Elektronik) BSSN b. Pembaharuan sertifikat elektronik setiap 2 tahun sekali c. Pembuatan dan pembaharuan akun SRIKANDI kepada seluruh pegawai ASN di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
5.	PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi) dan <i>Weekly Brief With Sandi Uno</i> (WBSU)	a. Melakukan penyusunan informasi terkait Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) kepada setiap unit Es. II di Lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, kemudian disampaikan ke Biro Komunikasi untuk dihimpun menjadi data DIP dan DIK Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif b. Selama periode Januari hingga Desember 2024, PIC PPID Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur telah menjawab pertanyaan publik melalui aplikasi www.lapor.go.id sebanyak 5 pertanyaan dan telah tuntas dijawab c. Selama periode Januari hingga Desember 2024, PIC PPID Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur telah aktif menjawab pertanyaan wartawan untuk kegiatan <i>Weekly Brief With Sandi Uno</i> (WBSU) sebanyak 29 kali kegiatan WBSU d. SOP Pelayanan Publik Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur e. Digitalisasi Pelaporan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) (dalam bentuk Bank Data) f. Penyampaian informasi berupa video pelayanan informasi publik di Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

Tabel 43. Daftar Kegiatan Tata Usaha dan Rumah Tangga di Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024

Pengukuran kepuasan dari seluruh jenis layanan ini dilakukan melalui survei yang ditujukan pada pegawai di satuan kerja pada Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. 23 pertanyaan yang diajukan memiliki format jawaban skala likert 4 poin dan dilakukan melalui *Google Form* untuk mencapai responden secara lebih luas dan

fleksibel. Penilaian pada setiap pertanyaan dilakukan penghitungan rata-rata untuk kemudian dilakukan rata-rata secara total. Sebanyak 20 pertanyaan menghasilkan rata-rata jawaban 3,5 dan 3 pertanyaan memiliki rata-rata jawaban 3,6. Sehingga setelah dilakukan penghitungan secara total, rata-rata dari survei tingkat kepuasan terhadap layanan internal Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024 memiliki nilai 3,54 yang membuat Sasaran Program Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Internal Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024 mencapai target yang telah ditetapkan.

3.2. Realisasi Anggaran 2024

Realisasi anggaran Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur pada Tahun Anggaran 2024 mencapai 99,65% dengan total blokir sejumlah Rp54.126.506.000 yang terbagi pada lima unit eselon 2. Secara parsial unit eselon 2, capaian realisasi terendah berada di 99,26%. Berikut adalah detail capaian realisasi anggaran tahun 2024:

NO.	URAIAN	PAGU	BLOKIR	TARGET TW IV	% TARGET	REALISASI PEMBAYARAN	%
1.	Sekretariat Deputi	23,189,742,000	828,258,000	23,069,289,000	99.00%	23,167,811,885	99.91%
2.	Pengembangan Tata Kelola Destinasi	65,683,522,000	14,216,478,000	63,996,778,440	99.00%	65,198,138,606	99.26%
3.	Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	31,654,497,000	37,645,503,000	31,500,000,000	98.00%	31,637,093,020	99.95%
4.	Pengembangan Destinasi Pariwisata I	38,692,982,000	707,018,000	36,000,000,000	98.00%	38,568,280,498	99.68%

NO.	URAIAN	PAGU	BLOKIR	TARGET TW IV	% TARGET	REALISASI PEMBAYARAN	%
5.	Pengembangan Destinasi Pariwisata II	27,620,751,000	729,249,000	25,022,070,000	98.00%	27,609,811,425	99.96%
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur		186,841,494,000	54,126,506,000	179,588,137,440	96.12%	186,181,135,434	99.65%

Tabel 44. Rincian Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari total pagu anggaran senilai Rp186.841.494.000 yang tersedia, terdapat Rp54.126.506.000 atau sekitar 28% yang tidak bisa digunakan untuk memenuhi sasaran program yang telah ditargetkan untuk tahun 2024. Dengan berbagai efisiensi yang berhasil dilakukan untuk menyiasati blokir anggaran yang tidak berhasil dibuka, maka Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur tidak dapat memenuhi sebagian dari target sasaran program yang telah ditetapkan.

3.4. Kinerja Lain-Lain T.A. 2024

3.4.1 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pariwisata pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015 berupa pembangunan fisik. Kemudian pada tahun 2019, pemerintah menggulirkan jenis DAK baru, yaitu DAK Non Fisik. DAK non fisik ini telah diterapkan di bidang pariwisata sejak 2019 sebagai pelengkap dari DAK fisik bidang pariwisata sampai dengan tahun 2024. Kemudian di tahun 2022, DAK bidang pariwisata mendapatkan kebijakan baru dengan perubahan signifikan, yaitu masuknya DAK bidang pariwisata sebagai satu dari lima DAK Tematik. Keputusan ini membuat suatu daerah yang mendapatkan DAK bidang pariwisata akan secara otomatis menjadi prioritas utama bagi DAK bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM), bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bidang Perdagangan, bidang Lingkungan Hidup, dan bidang Jalan.

Arah kebijakan DAK bidang pariwisata tahun 2024 difokuskan pada ketuntasan dan penyelesaian untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat dan produk domestik bruto (PDB) sektor pariwisata. Terdapat 6 poin utama dalam pelaksanaan DAK bidang pariwisata di 2024:

1. Mendukung RKP 2024 “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, khususnya arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha.
2. Mendukung Prioritas Nasional 1 “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan” pada RKP 2024, Program Prioritas 6 “Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi”, Kegiatan Prioritas 3 “Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok”.
3. Sinergi dengan Major Project “Destinasi Pariwisata Prioritas”, terutama pada pembangunan 10 DPP, termasuk penuntasan 5 DPSP didalamnya, dimana DAK merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam pelaksanaan Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas untuk pengembangan atraksi dan amenitas yang merupakan kewenangan daerah.
4. Peningkatan diversifikasi atraksi dan amenitas pariwisata untuk meningkatkan lama tinggal (*length of stay*) dan pengeluaran harian wisatawan (*daily spending*).
5. Peningkatan jalan mantap menuju daya tarik wisata (DTW).

Arah kebijakan tersebut memiliki 3 sasaran dan target yang berusaha dicapai di tahun 2024 ini:

1. Terbangunnya 112 DTW yang terintegrasi dengan rantai pasok (IKM, UMKM, dan/atau Pasar Wisata).
2. Terbangunnya sarana pengelolaan sampah yang memadai di 112 DTW
3. Meningkatnya kualitas masyarakat pariwisata, pelaku usaha pariwisata, tata kelola destinasi, perencanaan pengembangan destinasi pariwisata, serta peningkatan optimalisasi operasionalisasi TIC di Destinasi Pariwisata Prioritas.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur melaksanakan DAK fisik bidang pariwisata dan DAK non fisik bidang

pariwisata. Untuk bisa mendapatkan DAK bidang pariwisata, setiap daerah perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Data Teknis

- Dokumen Perencanaan Daerah, merupakan dokumen-dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh Daerah dalam hal pengembangan di sektor pariwisata (RIPPARDA, RTRW Pariwisata)
- Kondisi Pariwisata Daerah, merupakan informasi terkait kondisi-kondisi yang berhubungan dengan sektor pariwisata di daerah pengusul DAK. (Alokasi APBD, PAD, Kunjungan Wisman Wisnus)
- Pelaporan Hasil DAK Daerah, merupakan informasi terkait pelaporan hasil dari pembangunan Daya Tarik Wisata di daerah yang menggunakan dana DAK.
- Status Daerah, merupakan informasi terkait status kab/kota. (termasuk didalam KPPN/Geopark Nasional/Status Internasional/Daerah 3T/Indeks Rawan Bencana Indonesia)

2. Daya Tarik Wisata (DTW) yang akan diusulkan

- Hanya dapat mengusulkan 1 DTW untuk setiap daerah
- DTW yang diusulkan, ditetapkan/berdasarkan arahan kepala daerah yang telah memiliki kunjungan
- Menyiapkan surat keputusan penetapan DTW yang akan diusulkan pada DAK 2024 yang di tanda tangani Kepala Daerah
- Kondisi DTW saat pengajuan (sarana, akses, dsb.)

3. *Readiness Criteria*

- Lahan
 - o Lahan milik Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atau dokumen kepemilikan lahan lainnya yang sah;
 - o Lahan pribadi/yayasan/swasta yang diserahkan ke Pemerintah Daerah dibuktikan dengan Akta Hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
 - o Surat izin penggunaan lahan dari Instansi Pemerintah Pusat/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang mengelola lahan dan Naskah Kerjasama antara Kepala Daerah dengan Instansi yang berwenang, untuk lahan pemerintah daerah/pusat yang tidak dibawah

pengelolaan/kewenangan OPD/Instansi yang membidangi pariwisata;

- Lahan pemerintah desa yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atas nama desa atau dokumen kepemilikan lahan lainnya yang sah dan dikerjasamakan kepada pemerintah daerah untuk di kelola dengan membuat Naskah kerjasama antara kepala daerah dengan pemerintah desa
- Khusus untuk provinsi Papua dan Papua Barat, bentuk kepemilikan tanah selain tersebut diatas, dibuktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak atau surat bukti dipinjamkan hasil musyawarah adat dan diakui oleh kepala daerah untuk dikelola oleh OPD yang membidangi pariwisata.

- *Masterplan*

Memiliki *Masterplan* (yang mendetailkan rencana umum pembangunan dan pemanfaatan aspek ekonomi dan budaya) dan/atau memiliki *Site Plan* (*Site Plan* mendetailkan rencana pembangunan, zonasi Kawasan dan desain tapak di lokasi DTW)

- OPD

Terdapat OPD dengan nomenklatur Pariwisata, memiliki tugas dan fungsi pengembangan pariwisata dan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah

Setelah memenuhi syarat tersebut, maka Provinsi/Kabupaten/Kota perlu memilih menu DAK yang sudah tersedia untuk dibangun di DTW yang telah dipilih, dan sesuai dengan masterplan yang telah dibuat. Langkah berikutnya adalah kurasi yang dilakukan oleh Kemenparekraf/Baparekraf bersama dengan Bappenas dan Kemenkeu. Daerah yang lolos kurasi maka disebut sebagai Lokasi Prioritas (Lokpri) dan ditetapkan sebagai penerima DAK melalui Keputusan Menteri parekraf/Kepala Baparekraf.



Gambar 38. Alur Pelaksanaan DAK Bidang Pariwisata

Setiap tahunnya, menu yang tersedia pada DAK selalu diperbarui berdasarkan masukan dan kebutuhan dari seluruh daerah di Indonesia. Di Tahun 2024 terdapat 42 menu DAK fisik bidang pariwisata yang dapat dipilih oleh daerah. Sedangkan untuk DAK non fisik, Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur hanya mengampu 1 menu, yaitu Peningkatan Kualitas Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata dalam bentuk Fasilitas Penyusunan *Masterplan* Daya Tarik Wisata (DTW).

14 Rincian kegiatan	PEMBANGUNAN AMENITAS DAN ATRAKSI KAWASAN WISATA BAHARI DAN PERAIRAN	10 Rincian Kegiatan	PEMBANGUNAN AMENITAS DAN ATRAKSI KAWASAN WISATA ALAM (NONBAHARI)	10 Rincian Kegiatan	PEMBANGUNAN AMENITAS DAN ATRAKSI KAWASAN WISATA BUDAYA DAN PERKOTAAN	8 Rincian Kegiatan	PEMBANGUNAN AMENITAS DAN ATRAKSI KAWASAN WISATA PERDESAAN DAN DESA WISATA
	1. Pantai 2. Sungai 3. Danau 4. Waduk		1. Taman Nasional 2. Situs Geosite 3. Hutan Pinus 4. Pegunungan/Bukit 5. Air Terjun		1. Rest Area 2. Kompleks Istana/Candi 3. Wisata Buatan/Tematik 4. Wisata Religi		1. Desa Wisata 2. Kampung Tematik 3. Agrowisata 4. Pondok Wisata
	1. Bangunan TIC Dan Perlengkapannya 2. Fasilitas Kebersihan 3. Penataan Lansekap Dan Perlengkapannya 4. Panggung Kesenian/ Pertunjukan/ Amphiteater 5. Dive Center Dan Peralatannya 6. Surfing Center Dan Peralatannya 7. Titik Labuh/Singgah Kapal Yacht Dan Perlengkapannya 8. Dermaga Wisata 9. Fasilitas Mitigasi Bencana Alam 10. Fasilitas Rekreasi Penunjang Kegiatan Wisata 11. Fasilitas Umum 12. Fasilitas Aksesibilitas 13. Visibilitas Geopark 14. Perahu Wisata		1. Bangunan TIC Dan Perlengkapannya 2. Fasilitas Mitigasi Bencana Alam 3. Fasilitas Kebersihan 4. Penataan Lansekap Dan Perlengkapannya 5. Panggung Kesenian/Pertunjukan/ Amphiteater 6. Fasilitas Hiking 7. Fasilitas Rekreasi Penunjang Kegiatan Wisata 8. Fasilitas Umum 9. Fasilitas Aksesibilitas 10. Visibilitas Geopark		1. Bangunan TIC Dan Perlengkapannya 2. Fasilitas Mitigasi Bencana Alam 3. Fasilitas Kebersihan 4. Penataan Lansekap Dan Perlengkapannya 5. Panggung Kesenian/ Pertunjukan/ Amphiteater 6. Pusat Kreasi Destinasi Pariwisata 7. Fasilitas Rekreasi Penunjang Kegiatan Wisata 8. Fasilitas Umum 9. Fasilitas Aksesibilitas 10. Taman Wisata Olahraga		1. Bangunan TIC Dan Perlengkapannya 2. Fasilitas Mitigasi Bencana Alam 3. Fasilitas Kebersihan 4. Penataan Lansekap Dan Perlengkapannya 5. Panggung Kesenian/ Pertunjukan/ Amphiteater 6. Fasilitas Rekreasi Penunjang Kegiatan Wisata 7. Fasilitas Umum 8. Fasilitas Aksesibilitas

Tabel 45. Menu DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2024

Untuk pelaksanaan tahun 2024, DAK bidang pariwisata memiliki pagu sebesar Rp450.000.000.000 yang kemudian disetujui oleh Bappenas melalui Krisna sebesar Rp447.705.542.007 untuk 114 lokasi prioritas dengan rincian 106 Kabupaten/Kota dan 8 Provinsi.

No.	Provinsi	Kab/Kota	2024	
			Fisik	Non Fisik
			Pagu	Pagu
			447.705.542.007	18.531.000.000
1.	Provinsi Aceh		-	-
		Kota Sabang	2.505.491.000	-
2.	Provinsi Sumatera Utara		-	-
		Kab. Dairi	2.938.076.000	515.000.000
		Kab. Humbang Hasundutan	5.253.675.000	515.000.000
		Kab. Karo	2.109.066.000	-
		Kab. Nias Barat	2.992.869.000	-
		Kab. Nias Utara	5.934.756.000	-
		Kab. Pakpak Bharat	1.062.372.500	-
		Kab. Samosir	8.133.785.000	515.000.000
		Kab. Simalungun	6.418.984.000	515.000.000
		Kab. Tapanuli Utara	7.930.356.000	515.000.000
		Kab. Toba	8.521.746.000	515.000.000
3.	Provinsi Sumatera Selatan		-	-
		Kota Pagar Alam	1.296.004.000	-
4.	Provinsi Sumatera Barat		-	-
		Kab. Agam	2.140.000.224	-
		Kab. Padang Pariaman	2.447.480.000	-
		Kab. Pesisir Selatan	3.062.418.000	-
		Kab. Solok	2.769.793.000	-
		Kab. Tanah Datar	3.135.861.000	-
		Kota Padang	1.686.081.000	515.000.000
5.	Provinsi Bengkulu		-	-
		Kab. Bengkulu Utara	3.654.387.000	-
6.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		-	-
		Kab. Bangka	2.941.500.000	515.000.000
		Kab. Bangka Selatan	5.281.700.000	-
		Kab. Bangka Tengah	-	-
		Kab. Belitung	-	-
		Kab. Belitung Timur	2.730.000.000	515.000.000
		Kota Pangkal Pinang	2.397.225.000	515.000.000
7.	Provinsi Riau		-	-
		Kab. Bengkalis	3.055.599.000	-
8.	Provinsi Kepulauan Riau		-	-
		Kab. Bintan	2.784.501.000	-
		Kab. Lingga	3.020.842.000	-
		Kab. Natuna	1.262.000.000	-
		Kota Tanjung Pinang	2.771.153.000	515.000.000
9.	Provinsi Jambi		-	-

No.	Provinsi	Kab/Kota	2024	
			Fisik	Non Fisik
			Pagu	Pagu
			447.705.542.007	18.531.000.000
		Kab. Kerinci	1.960.634.000	-
		Kab. Merangin	2.503.382.000	-
10.	Provinsi Lampung		-	-
		Kab. Lampung Barat	1.682.285.000	-
11.	Provinsi Banten		-	-
		Kab. Lebak	1.147.974.000	515.000.000
		Kab. Pandeglang	1.840.813.119	506.000.000
12.	Provinsi Jawa Barat		-	-
		Kab. Bandung	2.534.247.000	515.000.000
		Kab. Bogor	2.422.475.000	515.000.000
		Kab. Garut	1.161.977.000	-
		Kab. Subang	5.838.895.000	-
		Kab. Sukabumi	1.207.612.000	-
		Kab. Tasikmalaya	1.337.522.000	515.000.000
		Kota Sukabumi	2.340.459.000	-
13.	Provinsi Jawa Tengah		1.933.575.000	-
		Kab. Banjarnegara	6.232.250.000	-
		Kab. Jepara	4.020.288.000	-
		Kab. Karanganyar	1.552.500.000	-
		Kab. Klaten	5.604.510.000	515.000.000
		Kab. Magelang	3.390.524.000	515.000.000
		Kab. Purworejo	2.501.491.000	515.000.000
		Kab. Sragen	2.531.997.000	-
		Kab. Tegal	2.853.310.000	-
		Kota Surakarta	1.420.575.000	-
14.	Provinsi DI. Yogyakarta		1.700.333.000	-
		Kab. Bantul	7.374.871.000	515.000.000
		Kab. Kulon Progo	2.341.100.000	-
		Kab. Sleman	2.700.500.000	-
15.	Provinsi Jawa Timur		-	-
		Kab. Malang	2.601.210.000	515.000.000
		Kab. Pacitan	6.304.426.000	515.000.000
		Kab. Pasuruan	7.019.175.000	515.000.000
		Kota Mojokerto	5.465.250.000	-
16.	Provinsi Kalimantan Barat		-	-
		Kab. Kayong Utara	2.002.000.000	-
		Kab. Sambas	2.025.500.000	-
17.	Provinsi Kalimantan Timur		-	-
		Kab. Berau	5.540.536.000	515.000.000
18.	Provinsi Kalimantan Tengah		-	-
		Kab. Kotawaringin Barat	2.160.424.000	515.000.000

No.	Provinsi	Kab/Kota	2024	
			Fisik	Non Fisik
			Pagu	Pagu
			447.705.542.007	18.531.000.000
19.	Provinsi Bali		-	-
		Kab. Bangli	5.433.565.000	-
		Kab. Karangasem	4.526.158.000	515.000.000
		Kab. Klungkung	2.164.424.000	-
		Kota Denpasar	6.673.444.000	-
20.	Provinsi Nusa Tenggara Barat		2.267.645.000	-
		Kab. Bima	4.438.171.000	-
		Kab. Lombok Barat	1.820.372.164	515.000.000
		Kab. Lombok Tengah	5.507.103.000	515.000.000
		Kab. Lombok Timur	2.636.767.000	515.000.000
		Kab. Lombok Utara	8.481.530.000	-
		Kota Mataram	4.557.568.000	-
21.	Provinsi Nusa Tenggara Timur			-
		Kab. Alor	2.245.690.000	-
		Kab. Belu	5.327.545.000	-
		Kab. Manggarai	5.311.304.000	-
		Kab. Manggarai Barat	6.723.568.000	-
		Kab. Ngada	6.832.722.000	-
		Kab. Rote Ndao	1.517.750.000	-
		Kab. Sumba Timur	4.111.056.000	-
22.	Provinsi Gorontalo		-	-
		Kab. Boalemo	1.936.000.000	-
		Kab. Gorontalo	5.079.746.000	-
		Kota Gorontalo	5.003.110.000	-
23.	Provinsi Sulawesi Utara		1.729.839.000	-
		Kab. Minahasa Utara	2.040.000.000	515.000.000
		Kota Bitung	5.033.801.000	515.000.000
		Kota Tomohon	5.687.115.000	-
24.	Provinsi Sulawesi Selatan		-	-
		Kab. Tana Toraja	1.596.483.000	-
		Kab. Toraja Utara	1.601.064.000	515.000.000
25.	Provinsi Sulawesi Tenggara		-	-
		Kab. Wakatobi	7.545.838.000	515.000.000
		Kota Bau-Bau	4.577.002.000	-
		Kota Kendari	4.246.383.000	515.000.000
26.	Provinsi Maluku		-	-
		Kab. Maluku Tenggara	4.275.638.000	-
27.	Provinsi Maluku Utara		-	-
		Kab. Pulau Morotai	5.771.432.000	-
		Kab. Halmahera Utara	2.588.500.000	-

No.	Provinsi	Kab/Kota	2024	
			Fisik	Non Fisik
			Pagu	Pagu
			447.705.542.007	18.531.000.000
		Kota Tidore Kepulauan	5.281.236.000	-
28.	Provinsi Papua			-
		Kab. Biak Numfor	5.679.864.000	515.000.000
		Kab. Kepulauan Yapen	5.951.167.000	-
		Kab. Supiori	5.816.163.000	-
		Kab. Waropen	9.003.015.000	-
29.	Provinsi Papua Barat		-	-
		Kab. Fak Fak	2.015.935.000	-
		Kab. Manokwari Selatan	9.022.939.000	-
		Kab. Teluk Wondama	4.710.912.000	515.000.000
		Kota Sorong	11.537.127.000	-
30.	Provinsi Papua Selatan		-	-
		Kab. Asmat	9.463.206.000	-
		Kab. Merauke	4.638.610.000	-
31.	Provinsi Papua Barat Daya		-	-
		Kab. Raja Ampat	3.829.251.000	-
		Kab. Sorong	5.213.022.000	-
32.	Provinsi Papua Pegunungan		-	-
		Kab. Jayawijaya	3.177.723.000	-
		Kab. Yahukimo	10.134.737.000	-

Tabel 46. Penerima DAK Fisik Bidang Pariwisata T.A. 2024

Cukup banyak lokpri yang berhasil melaksanakan dan memanfaatkan DAK secara baik, sehingga diputuskan untuk dapat menerima DAK Fisik Bidang Pariwisata pada lebih dari satu tahun anggaran, bahkan mendapatkan secara beruntun dari 2020-2024. Pelaksanaan dan pemanfaatan DAK yang telah diterima juga menjadi salah satu kriteria kurasi penerima DAK. Penilaian ini didasarkan pada DAK yang diterima pada 2 tahun sebelum tahun anggaran pengajuan DAK.

Dalam perkembangannya, ditetapkan bahwa DAK harus lebih fokus dan bermanfaat, sehingga kurasi juga menjadi lebih ketat. Secara aturan, pada tahun 2022 adalah tonggak awal pelaksanaan DAK yang lebih terfokus. Hal tersebut terlihat secara statistik, pada tahun 2020 DAK disalurkan pada 257 lokpri dibandingkan dengan 58 lokpri pada DAK tahun 2022.

No.	Provinsi	Kab/Kota	Pagu DAK Fisik Tahun 2020	Pagu DAK Fisik Tahun 2021	Pagu DAK Fisik Tahun 2022	Pagu DAK Fisik Tahun 2023
			594.544.954.538	585.411.184.271	371.532.686.942	450.000.000.000
1.	Provinsi Aceh		-	-	-	-
		Kab. Aceh Tamiang	-	-	-	1.000.001.000
		Kab. Aceh Singkil	1.710.658.000	-	-	-
		Kab. Aceh Tengah	3.490.040.000	-	-	-
		Kab. Aceh Tenggara	-	1.434.991.000	-	-
		Kab. Bener Meriah	2.056.579.000	-	-	-
		Kab. Simeulue	1.840.258.323	-	-	-
		Kota Banda Aceh	-	11.803.951.263	-	-
		Kota Sabang	2.895.811.726	-	-	-
2.	Provinsi Sumatera Utara		3.955.952.000	-	-	-
		Kab. Dairi	-	4.462.323.000	8.181.087.000	2.360.280.000
		Kab. Deli Serdang	2.779.662.600	-	-	-
		Kab. Humbang Hasundutan	-	4.303.114.000	1.250.382.000	2.115.525.000
		Kab. Karo	-	6.163.334.000	2.587.921.875	7.531.761.000
		Kab. Nias Barat	2.335.016.000	-	-	-
		Kab. Nias Selatan	2.594.244.000	10.012.313.000	-	-
		Kab. Nias Utara	2.419.308.000	-	-	-
		Kab. Pakpak Bharat	4.311.969.000	928.000.000	1.180.000.000	3.350.363.000
		Kab. Samosir	5.006.081.000	4.942.268.900	2.146.725.000	15.140.768.000
		Kab. Simalungun	-	1.030.000.000	-	8.089.764.000
		Kab. Tapanuli Utara	-	5.103.335.000	1.047.387.500	16.998.459.000
		Kab. Tapanuli Tengah	3.084.934.000	-	-	-
		Kab. Toba	-	10.623.043.000	-	16.145.096.000
3.	Provinsi Sumatera Selatan		-	-	-	-
		Kab. Musi Rawas	1.486.531.000	-	-	15.686.030.000
		Kab. Ogan Ilir	1.065.158.000	-	-	-
		Kab. Ogan Komering Ilir	1.921.776.000	-	-	-
		Kab. Ogan Komering Ulu	2.287.597.000	-	-	-

No.	Provinsi	Kab/Kota	Pagu DAK Fisik Tahun 2020	Pagu DAK Fisik Tahun 2021	Pagu DAK Fisik Tahun 2022	Pagu DAK Fisik Tahun 2023
			594.544.954.538	585.411.184.271	371.532.686.942	450.000.000.000
		Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1.822.018.734	-	-	-
		Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1.732.521.000	-	-	-
		Kota Pagar Alam	1.534.989.054	-	-	-
		Kota Palembang	363.874.580	-	-	-
4.	Provinsi Sumatera Barat		2.785.896.355	-	-	-
		Kab. Agam	2.001.477.535	9.576.133.000	-	1.198.699.000
		Kab. Dharmasraya	2.153.866.550	-	-	-
		Kab. Kepulauan Mentawai	2.672.887.000	-	4.103.399.000	1.000.000.000
		Kab. Lima Puluh Kota	1.215.924.000	-	-	-
		Kab. Padang Pariaman	557.995.020	1.333.374.650	-	-
		Kab. Pasaman Barat	3.063.155.000	-	-	-
		Kab. Pesisir Selatan	2.723.154.217	3.291.965.919	5.309.104.133	3.358.776.000
		Kab. Sijunjung	2.554.532.000	4.493.486.000	-	-
		Kab. Solok	1.379.847.374	4.568.886.000	-	-
		Kab. Solok Selatan	2.674.140.566	-	-	-
		Kab. Tanah Datar	2.515.543.250	7.869.120.844	-	2.618.803.000
		Kota Bukit Tinggi	1.941.793.000	179.500.998	1.050.000.000	-
		Kota Padang	-	8.483.654.000	-	-
		Kota Padang Panjang	1.606.591.000	1.897.013.000	-	-
		Kota Pariaman	2.355.000.000	-	-	-
		Kota Payakumbuh	2.680.526.000	-	-	-
		Kota Sawahlunto	2.028.560.652	4.695.617.000	5.590.200.000	3.074.238.000
		Kota Solok	770.382.000	4.589.238.000	-	-
5.	Provinsi Bengkulu		-	-	-	-
		Kab. Bengkulu Selatan	1.675.893.895	-	-	-
		Kab. Bengkulu Utara	400.855.000	-	-	-
		Kab. Kaur	2.903.928.000	-	-	-

No.	Provinsi	Kab/Kota	Pagu DAK Fisik Tahun 2020	Pagu DAK Fisik Tahun 2021	Pagu DAK Fisik Tahun 2022	Pagu DAK Fisik Tahun 2023
			594.544.954.538	585.411.184.271	371.532.686.942	450.000.000.000
		Kab. Lebong	1.935.180.500	-	-	-
		Kab. Mukomuko	3.239.515.350	-	-	-
		Kab. Rejang Lebong	1.284.662.500	-	-	-
		Kab. Seluma	2.198.978.000	-	-	-
		Kota Bengkulu	799.838.060	-	-	-
6.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		-	400.000.000	-	-
		Kab. Bangka	864.850.000	-	3.153.500.000	-
		Kab. Bangka Barat	1.306.202.000	-	-	2.305.971.000
		Kab. Bangka Selatan	1.614.833.000	1.489.771.000	-	15.315.415.000
		Kab. Bangka Tengah	400.000.000	2.405.999.000	-	-
		Kab. Belitung	2.369.250.000	3.680.220.000	2.325.000.000	1.126.261.000
		Kab. Belitung Timur	1.503.125.000	-	1.775.542.000	4.780.972.000
		Kota Pangkal Pinang	2.273.374.000	-	6.866.849.000	-
7.	Provinsi Riau		-	-	-	-
		Kab. Indragiri Hilir	731.622.268	-	-	-
		Kab. Indragiri Hulu	1.885.209.900	-	-	-
		Kab. Kampar	1.287.900.000	-	-	-
		Kab. Kepulauan Meranti	2.822.842.200	-	-	-
		Kab. Kuantan Singingi	760.774.000	-	-	-
		Kota Dumai	3.386.921.920	-	-	-
		Kota Pekanbaru	1.417.655.000	-	-	-
8.	Provinsi Kepulauan Riau		-	-	-	-
		Kab. Bintan	898.523.000	-	1.212.819.000	-
		Kab. Karimun	1.511.404.000	2.447.473.000	-	-
		Kab. Kep. Anambas	-	2.387.726.280	-	-
		Kab. Lingga	2.450.956.000	-	-	-
		Kab. Natuna	3.453.714.499	2.983.824.000	-	1.000.001.000
		Kota Batam	2.553.660.000	-	-	-

No.	Provinsi	Kab/Kota	Pagu DAK Fisik Tahun 2020	Pagu DAK Fisik Tahun 2021	Pagu DAK Fisik Tahun 2022	Pagu DAK Fisik Tahun 2023
			594.544.954.538	585.411.184.271	371.532.686.942	450.000.000.000
		Kota Tanjung Pinang	3.248.924.000	10.716.020.000	3.801.161.000	2.143.775.000
9.	Provinsi Jambi		2.922.299.000	-	-	-
		Kab. Kerinci	-	-	-	2.032.403.000
		Kab. Merangin	2.837.818.774	-	-	1.623.977.000
		Kab. Muaro Jambi	816.103.234	-	-	-
		Kab. Tanjung Jabung Timur	1.293.511.000	-	-	-
		Kota Jambi	2.082.866.000	-	-	-
		Kota Sungai Penuh	2.769.407.000	-	-	-
10.	Provinsi Lampung		2.895.000.000	-	-	-
		Kab. Lampung Barat	1.061.609.740	-	-	2.319.365.000
		Kab. Lampung Tengah	4.041.822.000	-	-	-
		Kab. Mesuji	3.468.269.342	-	-	-
		Kab. Pesawaran	1.427.892.000	-	-	-
		Kab. Pesisir Barat	3.098.108.942	-	-	-
		Kab. Pringsewu	1.015.954.427	-	-	-
		Kab. Tanggamus	2.226.045.000	-	-	-
		Kab. Tulang Bawang	2.390.152.000	-	-	-
		Kab. Tulang Bawang Barat	3.155.697.406	-	-	-
		Kota Bandar Lampung	1.734.519.700	-	-	-
		Kota Metro	2.605.692.000	-	-	-
11.	Provinsi Banten		-	-	-	-
		Kab. Lebak	1.210.878.000	2.462.799.000	7.478.784.000	2.845.712.000
		Kab. Pandeglang	-	-	1.525.687.000	-
12.	Provinsi Jawa Barat		-	-	-	-
		Kab. Bandung	1.408.400.000	-	-	4.603.317.000
		Kab. Ciamis	1.000.000.000	-	-	-
		Kab. Cianjur	1.044.744.000	2.489.999.000	-	-
		Kab. Garut	2.154.000.000	2.945.264.000	-	1.076.511.000
		Kab. Pangandaran	3.367.544.000	2.061.663.000	-	-

No.	Provinsi	Kab/Kota	Pagu DAK Fisik Tahun 2020	Pagu DAK Fisik Tahun 2021	Pagu DAK Fisik Tahun 2022	Pagu DAK Fisik Tahun 2023
			594.544.954.538	585.411.184.271	371.532.686.942	450.000.000.000
		Kab. Subang	1.928.000.000	-	-	-
		Kab. Sukabumi	-	-	-	8.686.617.000
		Kab. Tasikmalaya	-	-	7.383.330.150	1.812.303.000
		Kota Bandung	1.743.130.840	-	-	-
		Kota Tasikmalaya	1.428.159.900	-	-	-
13.	Provinsi Jawa Tengah		6.213.913.000	6.024.302.000	-	-
		Kab. Banjarnegara	5.368.480.000	-	-	5.458.699.000
		Kab. Banyumas	945.358.000	-	-	-
		Kab. Batang	3.444.963.000	-	-	-
		Kab. Boyolali	1.289.102.000	6.547.662.000	-	-
		Kab. Brebes	2.268.301.000	-	-	-
		Kab. Cilacap	909.295.000	-	-	-
		Kab. Demak	2.377.310.000	-	-	-
		Kab. Jepara	3.358.000.000	9.232.025.000	-	3.859.125.000
		Kab. Karanganyar	3.245.279.000	1.399.999.000	-	-
		Kab. Kebumen	3.219.160.000	-	-	-
		Kab. Kendal	3.093.200.000	-	-	-
		Kab. Klaten	1.721.778.000	1.751.716.000	5.563.732.000	6.027.041.000
		Kab. Magelang	3.199.935.000	6.112.934.106	3.889.181.000	11.182.931.000
		Kab. Pekalongan	1.373.706.780	-	-	-
		Kab. Pemasang	616.366.000	-	-	-
		Kab. Purbalingga	1.031.897.680	-	-	-
		Kab. Purworejo	3.009.766.000	5.324.394.000	1.382.650.000	5.066.053.000
		Kab. Semarang	5.487.026.214	9.210.494.000	1.680.518.018	2.438.360.000
		Kab. Sragen	4.541.220.000	4.420.226.835	3.471.395.000	1.097.207.000
		Kab. Temanggung	6.746.467.000	-	-	-
		Kab. Wonogiri	3.032.361.000	14.554.594.000	-	5.110.370.000
		Kab. Wonosobo	6.685.378.000	10.844.194.000	-	9.738.359.000
		Kota Pekalongan	2.209.041.000	-	-	-

No.	Provinsi	Kab/Kota	Pagu DAK Fisik Tahun 2020	Pagu DAK Fisik Tahun 2021	Pagu DAK Fisik Tahun 2022	Pagu DAK Fisik Tahun 2023
			594.544.954.538	585.411.184.271	371.532.686.942	450.000.000.000
		Kota Salatiga	-	-	4.875.381.000	-
		Kota Semarang	5.559.001.000	713.927.000	6.080.042.459	3.698.380.000
		Kota Surakarta	1.859.331.408	4.218.958.000	4.046.305.032	-
		Kota Tegal	1.692.550.000	-	-	-
14.	Provinsi DI. Yogyakarta		5.230.832.000	-	-	-
		Kab. Bantul	-	-	14.294.000.000	-
		Kab. Gunung kidul	1.406.379.000	2.013.167.500	-	-
		Kab. Kulon Progo	5.987.790.000	-	-	1.775.615.000
		Kab. Sleman	1.754.191.000	1.598.102.000	-	-
		Kota Yogyakarta	4.421.688.929	2.842.690.000	-	-
15.	Provinsi Jawa Timur		553.010.000	3.073.368.000	-	-
		Kab. Banyuwangi	1.918.795.000	3.319.979.000	-	1.132.149.000
		Kab. Blitar	327.367.000	-	-	-
		Kab. Bondowoso	1.100.744.386	4.030.662.000	8.341.896.000	1.329.309.000
		Kab. Jember	1.008.287.000	-	-	-
		Kab. Lumajang	1.501.666.500	3.977.929.000	10.672.207.000	1.806.215.000
		Kab. Magetan	2.054.271.996	4.815.428.000	-	-
		Kab. Malang	3.012.923.995	-	-	-
		Kab. Pacitan	5.311.142.980	-	14.209.419.000	7.379.170.000
		Kab. Pasuruan	5.085.409.000	-	5.070.748.000	13.562.635.000
		Kab. Probolinggo	5.812.285.000	11.540.752.000	12.173.717.000	2.379.729.000
		Kab. Sampang	1.888.483.000	-	-	-
		Kab. Situbondo	2.395.762.000	2.668.561.000	5.841.675.000	2.601.545.000
		Kab. Tulungagung	1.372.559.000	-	-	-
		Kota Blitar	1.374.088.000	-	-	-
		Kota Malang	3.582.990.000	-	-	-
		Kota Mojokerto	-	-	-	18.589.397.000
		Kota Pasuruan	-	-	5.642.639.000	5.939.402.000
		Kota Probolinggo	609.661.500	-	-	-

No.	Provinsi	Kab/Kota	Pagu DAK Fisik Tahun 2020	Pagu DAK Fisik Tahun 2021	Pagu DAK Fisik Tahun 2022	Pagu DAK Fisik Tahun 2023
			594.544.954.538	585.411.184.271	371.532.686.942	450.000.000.000
16.	Provinsi Kalimantan Barat		-	-	-	-
		Kab. Bengkayang	1.276.002.000	-	-	-
		Kab. Kapuas Hulu	2.126.820.000	-	-	-
		Kab. Kayong Utara	1.448.833.000	-	-	-
		Kab. Landak	-	1.239.740.000	-	-
		Kab. Sambas	1.459.730.000	-	-	-
		Kab. Sekadau	1.639.649.000	-	-	-
		Kab. Sintang	550.081.000	-	-	-
		Kota Singkawang	1.428.355.400	-	1.214.459.000	-
17.	Provinsi Kalimantan Utara		-	-	-	-
		Kab. Bulungan	1.786.560.000	-	-	-
		Kab. Malinau	1.026.017.007	-	-	-
		Kab. Nunukan	2.547.039.000	-	-	-
		Kota Tarakan	2.995.364.000	-	-	-
18.	Provinsi Kalimantan Selatan		-	-	-	-
		Kab. Banjar	3.264.292.000	-	-	-
		Kab. Hulu Sungai Selatan	984.900.000	-	-	2.133.943.000
		Kab. Tanah Bumbu	2.274.477.643	-	-	-
		Kota Banjarbaru	1.064.485.000	-	-	-
19.	Provinsi Kalimantan Timur		-	-	-	-
		Kab. Berau	-	-	-	1.214.634.000
		Kab. Kutai Kartanegara	1.603.458.000	-	-	-
20.	Provinsi Kalimantan Tengah		2.318.744.520	-	-	-
		Kab. Barito Utara	1.453.325.000	-	-	-
		Kab. Katingan	2.487.005.500	-	-	-
		Kab. Kotawaringin Barat	978.279.000	-	-	-
		Kab. Kotawaringin Timur	3.333.677.000	-	-	-

No.	Provinsi	Kab/Kota	Pagu DAK Fisik Tahun 2020	Pagu DAK Fisik Tahun 2021	Pagu DAK Fisik Tahun 2022	Pagu DAK Fisik Tahun 2023
			594.544.954.538	585.411.184.271	371.532.686.942	450.000.000.000
		Kab. Pulang Pisau	2.546.006.000	-	-	-
		Kab. Seruyan	1.646.587.000	-	-	-
		Kab. Sukamara	3.416.385.875	-	-	-
		Kota Palangkaraya	2.234.426.080	-	-	-
21.	Provinsi Bali		-	-	-	-
		Kab. Badung	-	1.196.325.000	-	-
		Kab. Bangli	924.306.350	1.369.999.000	-	14.344.885.000
		Kab. Buleleng	2.487.280.143	2.146.092.000	4.943.866.000	-
		Kab. Gianyar	954.787.000	1.601.999.000	1.735.000.000	-
		Kab. Jembrana	-	-	4.518.000.000	-
		Kab. Karangasem	3.316.370.000	3.967.498.000	-	-
		Kab. Klungkung	2.122.962.000	9.403.308.000	4.352.764.000	9.550.329.000
		Kab. Tabanan	1.000.000.000	1.400.599.000	-	-
22.	Provinsi Nusa Tenggara Barat		2.683.634.000	-	-	-
		Kab. Lombok Barat	5.679.592.160	2.920.639.000	1.318.074.450	-
		Kab. Lombok Tengah	5.847.940.000	9.420.996.000	13.860.524.000	5.036.750.000
		Kab. Lombok Timur	832.792.200	-	4.644.543.000	-
		Kab. Lombok Utara	5.162.800.000	4.558.845.000	-	15.574.937.000
		Kab. Sumbawa	2.574.691.000	-	-	-
		Kota Bima	1.317.307.000	-	-	-
		Kota Mataram	2.374.507.309	11.775.339.206	-	10.739.804.000
23.	Provinsi Nusa Tenggara Timur		2.123.152.337	1.849.999.000	-	-
		Kab. Alor	806.492.000	-	-	1.740.120.000
		Kab. Belu	-	-	-	1.676.452.000
		Kab. Ende	-	13.053.855.148	-	-
		Kab. Flores Timur	1.923.577.000	5.359.498.000	-	-
		Kab. Manggarai	-	1.370.372.000	-	-

No.	Provinsi	Kab/Kota	Pagu DAK Fisik Tahun 2020	Pagu DAK Fisik Tahun 2021	Pagu DAK Fisik Tahun 2022	Pagu DAK Fisik Tahun 2023
			594.544.954.538	585.411.184.271	371.532.686.942	450.000.000.000
		Kab. Manggarai Barat	4.669.049.800	2.131.091.000	-	7.589.997.000
		Kab. Manggarai Timur	1.189.251.000	4.401.526.500	1.045.230.000	-
		Kab. Nagekeo	-	1.000.232.000	-	-
		Kab. Ngada	644.889.549	540.000.000	-	2.218.794.000
		Kab. Rote Ndao	1.817.467.000	-	-	1.139.591.000
		Kab. Sikka	871.537.000	3.852.513.000	-	-
		Kab. Sumba Barat Daya	3.313.282.000	-	-	-
		Kab. Timor Tengah Selatan	1.849.733.000	-	-	-
24.	Provinsi Gorontalo		2.246.587.000	-	-	-
		Kab. Boalemo	1.558.738.640	-	-	-
		Kab. Bone Bolango	2.323.695.000	-	-	-
		Kab. Gorontalo	1.313.225.000	-	-	-
25.	Provinsi Sulawesi Barat		900.937.238	-	-	-
		Kab. Majene	3.125.073.000	-	-	-
		Kab. Mamuju Tengah	2.335.363.000	-	-	-
		Kab. Polewali Mandar	1.301.329.000	-	-	-
26.	Provinsi Sulawesi Tengah		2.099.648.000	-	-	-
		Kab. Banggai Laut	2.446.926.000	-	-	-
		Kab. Morowali Utara	1.586.287.580	-	-	-
		Kab. Parigi Moutong	3.193.755.950	-	-	-
		Kab. Poso	1.115.872.000	-	-	-
		Kab. Sigi	2.868.142.000	-	-	-
		Kab. Tojo Una-una	3.349.445.000	-	-	-
		Kota Palu	1.663.008.000	-	-	-
27.	Provinsi Sulawesi Utara		3.141.764.000	3.919.694.000	-	-
		Kab. Bolaang Mongondow Selatan	633.772.000	-	-	-

No.	Provinsi	Kab/Kota	Pagu DAK Fisik Tahun 2020	Pagu DAK Fisik Tahun 2021	Pagu DAK Fisik Tahun 2022	Pagu DAK Fisik Tahun 2023
			594.544.954.538	585.411.184.271	371.532.686.942	450.000.000.000
		Kab. Bolaang Mongondow Utara	936.159.000	-	-	-
		Kab. Kepulauan Sangihe	3.471.880.750	-	-	-
		Kab. Minahasa	2.510.847.003	-	-	-
		Kab. Minahasa Selatan	-	-	-	8.259.029.000
		Kota Bitung	-	2.672.197.000	17.060.319.000	7.284.412.000
		Kota Manado	-	3.504.211.000	3.499.960.000	2.545.778.000
		Kota Tomohon	2.415.325.000	-	-	-
28.	Provinsi Sulawesi Selatan		732.963.250	3.889.468.000	-	-
		Kab. Bantaeng	2.828.300.000	4.106.202.000	-	-
		Kab. Barru	1.117.616.000	1.919.999.000	-	-
		Kab. Bone	1.671.664.000	-	-	-
		Kab. Bulukumba	1.195.246.000	2.765.999.000	-	1.000.000.000
		Kab. Enrekang	-	7.087.669.000	-	-
		Kab. Jeneponto	-	2.502.411.000	-	-
		Kab. Kepulauan Selayar	1.820.416.000	1.070.120.000	1.891.103.000	-
		Kab. Maros	-	3.265.492.000	4.925.000.000	-
		Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1.164.817.000	1.999.999.000	-	1.174.269.000
		Kab. Sidenreng Rappang	-	1.183.999.000	-	1.970.937.000
		Kab. Sinjai	2.779.716.000	-	-	-
		Kab. Soppeng	1.446.233.000	-	-	-
		Kab. Tana Toraja	3.766.266.000	3.875.998.000	11.521.261.000	-
		Kab. Toraja Utara	3.198.812.000	7.378.189.000	-	-
		Kota Pare-Pare	1.586.199.725	-	-	-
29.	Provinsi Sulawesi Tenggara		4.544.666.000	5.299.457.000	-	-
		Kab. Buton	3.423.141.990	4.451.040.000	-	-
		Kab. Buton Tengah	3.258.648.280	-	-	-

No.	Provinsi	Kab/Kota	Pagu DAK Fisik Tahun 2020	Pagu DAK Fisik Tahun 2021	Pagu DAK Fisik Tahun 2022	Pagu DAK Fisik Tahun 2023
			594.544.954.538	585.411.184.271	371.532.686.942	450.000.000.000
		Kab. Kolaka Timur	386.952.596	-	-	-
		Kab. Konawe Selatan	2.153.830.000	-	-	-
		Kab. Konawe Utara	417.200.000	-	-	-
		Kab. Muna Barat	1.787.061.000	-	-	-
		Kab. Wakatobi	8.177.608.450	36.650.819.000	19.357.574.000	13.900.776.000
		Kota Bau-Bau	1.443.400.000	6.538.220.000	-	7.235.648.000
		Kota Kendari	2.052.962.000	4.279.400.000	5.321.863.000	2.246.220.000
30.	Provinsi Maluku		-	-	-	-
		Kab. Maluku Tenggara	2.142.990.000	-	-	-
		Kab. Seram Bagian Barat	2.200.651.000	-	-	-
		Kab. Seram Bagian Timur	2.569.236.000	-	-	-
31.	Provinsi Maluku Utara		-	6.297.156.480	-	-
		Kab. Pulau Morotai	-	36.357.743.000	19.879.242.810	6.312.514.000
		Kab. Halmahera Barat	1.843.333.344	-	-	-
		Kab. Halmahera Timur	3.762.820.000	-	-	-
		Kab. Halmahera Tengah	4.339.303.500	-	-	-
		Kab. Halmahera Selatan	827.184.925	-	-	-
		Kab. Halmahera Utara	5.517.611.000	-	-	-
		Kota Ternate	2.109.785.273	-	2.377.800.000	-
		Kota Tidore Kepulauan	2.338.280.615	-	-	2.591.933.000
32.	Provinsi Papua		-	-	-	-
		Kab. Biak Numfor	4.440.109.000	10.466.572.878	23.811.919.000	21.723.091.000
		Kab. Kepulauan Yapen	-	-	-	5.082.272.000
		Kab. Merauke	-	2.213.083.000	-	-
		Kab. Jayapura	-	2.408.232.000	-	-
		Kab. Supiori	1.022.200.000	-	-	-
		Kota Jayapura	-	21.343.073.000	-	-
33.	Provinsi Papua Tengah		-	-	-	-

No.	Provinsi	Kab/Kota	Pagu DAK Fisik Tahun 2020	Pagu DAK Fisik Tahun 2021	Pagu DAK Fisik Tahun 2022	Pagu DAK Fisik Tahun 2023
			594.544.954.538	585.411.184.271	371.532.686.942	450.000.000.000
		Kab. Nabire		-	-	2.385.155.000
34.	Provinsi Papua Barat		-	15.871.951.000	-	-
		Kab. Fak Fak	-	-	-	-
		Kab. Manokwari	2.894.498.850	-	-	4.496.527.000
		Kab. Manokwari Selatan	-	-	-	-
		Kab. Raja Ampat	2.463.310.000	-	3.118.520.000	-
		Kab. Sorong	-	7.715.522.000	-	-
		Kab. Sorong Selatan	3.398.144.000	-	-	-
		Kab. Tambrauw	1.626.955.705	-	10.953.075.000	-
		Kab. Teluk Wondama	-	4.713.100.764	14.062.313.315	12.217.281.000
		Kota Sorong	2.499.709.200	16.612.216.000	20.915.892.200	4.787.637.000
35.	Provinsi Papua Barat Daya		-	-	-	-
		Kab. Raja Ampat		-	-	4.461.855.000
		Kab. Tambrauw	-	-	-	3.449.415.000
		Kab. Sorong	-	-	-	2.402.161.000

Tabel 47. Penerima DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2020-2023

Sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 sebanyak 333 Kabupaten, Kota, dan Provinsi di Indonesia telah menerima DAK Fisik Bidang Pariwisata serta DAK Non Fisik Bidang Pariwisata untuk menu Masterplan dengan jumlah pagu mencapai Rp 2.467.725.367.758. Berikut adalah daftar lokpri dan jumlah yang diterima, sesuai dengan Kepmenparekraf 2020-2024 tentang DAK fisik dan Non Fisik:

No.	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah DAK yang Diterima
			2.467.725.367.758
1.	Provinsi Aceh		-
		Kab. Aceh Tamiang	1.000.001.000
		Kab. Aceh Singkil	1.710.658.000
		Kab. Aceh Tengah	3.490.040.000
		Kab. Aceh Tenggara	1.434.991.000
		Kab. Bener Meriah	2.056.579.000
		Kab. Simeulue	1.840.258.323
		Kota Banda Aceh	11.803.951.263
		Kota Sabang	5.401.302.726
2.	Provinsi Sumatera Utara		3.955.952.000
		Kab. Dairi	18.456.766.000
		Kab. Deli Serdang	2.779.662.600
		Kab. Humbang Hasundutan	13.437.696.000
		Kab. Karo	18.392.082.875
		Kab. Nias Barat	5.327.885.000
		Kab. Nias Selatan	12.606.557.000
		Kab. Nias Utara	8.354.064.000
		Kab. Pakpak Bharat	10.832.704.500
		Kab. Samosir	35.884.627.900
		Kab. Simalungun	16.053.748.000
		Kab. Tapanuli Utara	31.594.537.500
		Kab. Tapanuli Tengah	3.084.934.000
		Kab. Toba	35.804.885.000
		Kota Gunungsitoli	2.700.677.000
3.	Provinsi Sumatera Selatan		-
		Kab. Empat Lawang	1.446.297.000
		Kab. Lahat	907.891.500
		Kab. Musi Banyuasin	2.731.588.000
		Kab. Musi Rawas	17.172.561.000
		Kab. Ogan Ilir	1.065.158.000
		Kab. Ogan Komering Ilir	1.921.776.000
		Kab. Ogan Komering Ulu	2.287.597.000
		Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1.822.018.734
		Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1.732.521.000

		Kota Pagar Alam	2.830.993.054
		Kota Palembang	363.874.580
4.	Provinsi Sumatera Barat		2.785.896.355
		Kab. Agam	14.916.309.759
		Kab. Dharmasraya	2.153.866.550
		Kab. Kepulauan Mentawai	7.776.286.000
		Kab. Lima Puluh Kota	1.215.924.000
		Kab. Padang Pariaman	4.338.849.670
		Kab. Pasaman Barat	3.063.155.000
		Kab. Pesisir Selatan	17.745.418.269
		Kab. Sijunjung	7.048.018.000
		Kab. Solok	8.718.526.374
		Kab. Solok Selatan	2.674.140.566
		Kab. Tanah Datar	16.139.328.094
		Kota Bukit Tinggi	3.171.293.998
		Kota Padang	10.684.735.000
		Kota Padang Panjang	3.503.604.000
		Kota Pariaman	2.355.000.000
		Kota Payakumbuh	2.680.526.000
		Kota Sawahlunto	15.388.615.652
		Kota Solok	5.359.620.000
5.	Provinsi Bengkulu		
		Kab. Bengkulu Selatan	1.675.893.895
		Kab. Bengkulu Utara	4.055.242.000
		Kab. Kaur	2.903.928.000
		Kab. Lebong	1.935.180.500
		Kab. Mukomuko	3.239.515.350
		Kab. Rejang Lebong	1.284.662.500
		Kab. Seluma	2.198.978.000
		Kota Bengkulu	799.838.060
6.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		400.000.000
		Kab. Bangka	7.474.850.000
		Kab. Bangka Barat	6.213.933.000
		Kab. Bangka Selatan	23.701.719.000
		Kab. Bangka Tengah	2.805.999.000
		Kab. Belitung	9.500.731.000
		Kab. Belitung Timur	11.304.639.000
		Kota Pangkal Pinang	12.052.448.000
7.	Provinsi Riau		-
		Kab. Indragiri Hilir	731.622.268
		Kab. Indragiri Hulu	1.885.209.900
		Kab. Kampar	1.287.900.000
		Kab. Kepulauan Meranti	2.822.842.200
		Kab. Kuantan Singingi	760.774.000
		Kab. Bengkalis	3.055.599.000
		Kota Dumai	3.386.921.920
		Kota Pekanbaru	1.417.655.000

8.	Provinsi Kepulauan Riau		-
		Kab. Bintan	4.895.843.000
		Kab. Karimun	3.958.877.000
		Kab. Kep. Anambas	2.387.726.280
		Kab. Lingga	5.471.798.000
		Kab. Natuna	8.699.539.499
		Kota Batam	2.553.660.000
		Kota Tanjung Pinang	23.196.033.000
9.	Provinsi Jambi		2.922.299.000
		Kab. Kerinci	3.993.037.000
		Kab. Merangin	6.965.177.774
		Kab. Muaro Jambi	816.103.234
		Kab. Tanjung Jabung Timur	1.293.511.000
		Kota Jambi	2.082.866.000
		Kota Sungai Penuh	2.769.407.000
10.	Provinsi Lampung		2.895.000.000
		Kab. Lampung Barat	5.063.259.740
		Kab. Lampung Tengah	4.041.822.000
		Kab. Mesuji	3.468.269.342
		Kab. Pesawaran	1.427.892.000
		Kab. Pesisir Barat	3.098.108.942
		Kab. Pringsewu	1.015.954.427
		Kab. Tanggamus	2.226.045.000
		Kab. Tulang Bawang	2.390.152.000
		Kab. Tulang Bawang Barat	3.155.697.406
		Kota Bandar Lampung	1.734.519.700
		Kota Metro	2.605.692.000
11.	Provinsi Banten		-
		Kab. Lebak	15.661.147.000
		Kab. Pandeglang	3.872.500.119
12.	Provinsi Jawa Barat		-
		Kab. Bandung	9.060.964.000
		Kab. Bogor	2.937.475.000
		Kab. Ciamis	1.000.000.000
		Kab. Cianjur	3.534.743.000
		Kab. Garut	7.337.752.000
		Kab. Pangandaran	5.429.207.000
		Kab. Subang	7.766.895.000
		Kab. Sukabumi	9.894.229.000
		Kab. Tasikmalaya	11.048.155.150
		Kota Bandung	1.743.130.840
		Kota Sukabumi	2.340.459.000
		Kota Tasikmalaya	1.428.159.900
13.	Provinsi Jawa Tengah		14.171.790.000
		Kab. Banjarnegara	17.059.429.000
		Kab. Banyumas	945.358.000
		Kab. Batang	3.444.963.000

		Kab. Boyolali	7.836.764.000
		Kab. Brebes	2.268.301.000
		Kab. Cilacap	909.295.000
		Kab. Demak	2.377.310.000
		Kab. Jepara	20.469.438.000
		Kab. Karanganyar	6.197.778.000
		Kab. Kebumen	3.219.160.000
		Kab. Kendal	3.093.200.000
		Kab. Klaten	21.183.777.000
		Kab. Magelang	28.290.505.106
		Kab. Pekalongan	1.373.706.780
		Kab. Pemasang	616.366.000
		Kab. Purbalingga	1.031.897.680
		Kab. Purworejo	17.799.354.000
		Kab. Semarang	18.816.398.232
		Kab. Sragen	16.062.045.835
		Kab. Temanggung	6.746.467.000
		Kab. Tegal	2.853.310.000
		Kab. Wonogiri	22.697.325.000
		Kab. Wonosobo	32.116.132.000
		Kota Pekalongan	2.209.041.000
		Kota Salatiga	4.875.381.000
		Kota Semarang	16.051.350.459
		Kota Surakarta	11.545.169.440
		Kota Tegal	1.692.550.000
14.	Provinsi DI. Yogyakarta		6.931.165.000
		Kab. Bantul	22.183.871.000
		Kab. Gunung kidul	3.419.546.500
		Kab. Kulon Progo	10.104.505.000
		Kab. Sleman	6.052.793.000
		Kota Yogyakarta	7.264.378.929
15.	Provinsi Jawa Timur		3.626.378.000
		Kab. Banyuwangi	6.370.923.000
		Kab. Blitar	327.367.000
		Kab. Bondowoso	14.802.611.386
		Kab. Jember	1.008.287.000
		Kab. Lumajang	17.958.017.500
		Kab. Magetan	6.869.699.996
		Kab. Malang	6.129.133.995
		Kab. Pacitan	33.719.157.980
		Kab. Pasuruan	31.252.967.000
		Kab. Probolinggo	31.906.483.000
		Kab. Sampang	1.888.483.000
		Kab. Situbondo	13.507.543.000
		Kab. Tulungagung	1.372.559.000
		Kota Blitar	1.374.088.000
		Kota Malang	3.582.990.000
		Kota Mojokerto	24.054.647.000

		Kota Pasuruan	11.582.041.000
		Kota Probolinggo	609.661.500
16.	Provinsi Kalimantan Barat		-
		Kab. Bengkayang	1.276.002.000
		Kab. Kapuas Hulu	2.126.820.000
		Kab. Kayong Utara	3.450.833.000
		Kab. Landak	1.239.740.000
		Kab. Sambas	3.485.230.000
		Kab. Sekadau	1.639.649.000
		Kab. Sintang	550.081.000
		Kota Singkawang	2.642.814.400
17.	Provinsi Kalimantan Utara		-
		Kab. Bulungan	1.786.560.000
		Kab. Malinau	1.026.017.007
		Kab. Nunukan	2.547.039.000
		Kota Tarakan	2.995.364.000
18.	Provinsi Kalimantan Selatan		-
		Kab. Banjar	3.264.292.000
		Kab. Hulu Sungai Selatan	3.118.843.000
		Kab. Tanah Bumbu	2.274.477.643
		Kota Banjarbaru	1.064.485.000
19.	Provinsi Kalimantan Timur		-
		Kab. Berau	7.270.170.000
		Kab. Kutai Kartanegara	1.603.458.000
20.	Provinsi Kalimantan Tengah		2.318.744.520
		Kab. Barito Utara	1.453.325.000
		Kab. Katingan	2.487.005.500
		Kab. Kotawaringin Barat	3.653.703.000
		Kab. Kotawaringin Timur	3.333.677.000
		Kab. Pulang Pisau	2.546.006.000
		Kab. Seruyan	1.646.587.000
		Kab. Sukamara	3.416.385.875
		Kota Palangkaraya	2.234.426.080
21.	Provinsi Bali		-
		Kab. Badung	1.196.325.000
		Kab. Bangli	22.072.755.350
		Kab. Buleleng	9.577.238.143
		Kab. Gianyar	4.291.786.000
		Kab. Jembrana	4.518.000.000
		Kab. Karangasem	12.325.026.000
		Kab. Klungkung	27.593.787.000
		Kab. Tabanan	2.400.599.000
		Kota Denpasar	6.673.444.000

22.	Provinsi Nusa Tenggara Barat		4.951.279.000
		Kab. Bima	4.438.171.000
		Kab. Lombok Barat	12.253.677.774
		Kab. Lombok Tengah	40.188.313.000
		Kab. Lombok Timur	8.629.102.200
		Kab. Lombok Utara	33.778.112.000
		Kab. Sumbawa	2.574.691.000
		Kota Bima	1.317.307.000
		Kota Mataram	29.447.218.515
23.	Provinsi Nusa Tenggara Timur		3.973.151.337
		Kab. Alor	4.792.302.000
		Kab. Belu	7.003.997.000
		Kab. Ende	13.053.855.148
		Kab. Flores Timur	7.283.075.000
		Kab. Manggarai	6.681.676.000
		Kab. Manggarai Barat	21.113.705.800
		Kab. Manggarai Timur	6.636.007.500
		Kab. Nagekeo	1.000.232.000
		Kab. Ngada	10.236.405.549
		Kab. Rote Ndao	4.474.808.000
		Kab. Sikka	4.724.050.000
		Kab. Sumba Timur	4.111.056.000
		Kab. Sumba Barat Daya	3.313.282.000
		Kab. Timor Tengah Selatan	1.849.733.000
24.	Provinsi Gorontalo		2.246.587.000
		Kab. Boalemo	3.494.738.640
		Kab. Bone Bolango	2.323.695.000
		Kab. Gorontalo	6.392.971.000
		Kota Gorontalo	5.003.110.000
25.	Provinsi Sulawesi Barat		900.937.238
		Kab. Majene	3.125.073.000
		Kab. Mamuju Tengah	2.335.363.000
		Kab. Polewali Mandar	1.301.329.000
26.	Provinsi Sulawesi Tengah		2.099.648.000
		Kab. Banggai Laut	2.446.926.000
		Kab. Morowali Utara	1.586.287.580
		Kab. Parigi Moutong	3.193.755.950
		Kab. Poso	1.115.872.000
		Kab. Sigi	2.868.142.000
		Kab. Tojo Una-una	3.349.445.000
		Kota Palu	1.663.008.000
27.	Provinsi Sulawesi Utara		8.791.297.000
		Kab. Bolaang Mongondow Selatan	633.772.000

		Kab. Bolaang Mongondow Utara	936.159.000
		Kab. Kepulauan Sangihe	3.471.880.750
		Kab. Minahasa	2.510.847.003
		Kab. Minahasa Selatan	8.259.029.000
		Kab. Minahasa Utara	2.555.000.000
		Kota Bitung	32.565.729.000
		Kota Manado	9.549.949.000
		Kota Tomohon	8.102.440.000
28.	Provinsi Sulawesi Selatan		4.622.431.250
		Kab. Bantaeng	6.934.502.000
		Kab. Barru	3.037.615.000
		Kab. Bone	1.671.664.000
		Kab. Bulukumba	4.961.245.000
		Kab. Enrekang	7.087.669.000
		Kab. Jeneponto	2.502.411.000
		Kab. Kepulauan Selayar	4.781.639.000
		Kab. Maros	8.190.492.000
		Kab. Pangkajene dan Kepulauan	4.339.085.000
		Kab. Sidenreng Rappang	3.154.936.000
		Kab. Sinjai	2.779.716.000
		Kab. Soppeng	1.446.233.000
		Kab. Tana Toraja	20.760.008.000
		Kab. Toraja Utara	12.693.065.000
		Kota Pare-Pare	1.586.199.725
29.	Provinsi Sulawesi Tenggara		9.844.123.000
		Kab. Buton	7.874.181.990
		Kab. Buton Tengah	3.258.648.280
		Kab. Kolaka Timur	386.952.596
		Kab. Konawe Selatan	2.153.830.000
		Kab. Konawe Utara	417.200.000
		Kab. Muna Barat	1.787.061.000
		Kab. Wakatobi	86.147.615.450
		Kota Bau-Bau	19.794.270.000
		Kota Kendari	18.661.828.000
30.	Provinsi Maluku		-
		Kab. Maluku Tenggara	6.418.628.000
		Kab. Seram Bagian Barat	2.200.651.000
		Kab. Seram Bagian Timur	2.569.236.000
31.	Provinsi Maluku Utara		6.297.156.480
		Kab. Pulau Morotai	68.320.931.810
		Kab. Halmahera Barat	1.843.333.344
		Kab. Halmahera Timur	3.762.820.000
		Kab. Halmahera Tengah	4.339.303.500
		Kab. Halmahera Selatan	827.184.925
		Kab. Halmahera Utara	8.106.111.000

		Kota Ternate	4.487.585.273
		Kota Tidore Kepulauan	10.211.449.615
32.	Provinsi Papua		-
		Kab. Biak Numfor	66.636.555.878
		Kab. Kepulauan Yapen	11.033.439.000
		Kab. Merauke (Sebelum Pemekaran)	2.213.083.000
		Kab. Jayapura	2.408.232.000
		Kab. Supiori	6.838.363.000
		Kab. Waropen	9.003.015.000
		Kota Jayapura	21.343.073.000
33.	Provinsi Papua Tengah		-
		Kab. Nabire	2.385.155.000
34.	Provinsi Papua Barat		15.871.951.000
		Kab. Fak Fak	2.015.935.000
		Kab. Manokwari	7.391.025.850
		Kab. Manokwari Selatan	9.022.939.000
		Kab. Raja Ampat (Sebelum Pemekaran)	5.581.830.000
		Kab. Sorong (Sebelum Pemekaran)	7.715.522.000
		Kab. Sorong Selatan (Sebelum Pemekaran)	3.398.144.000
		Kab. Tambrauw	12.580.030.705
		Kab. Teluk Wondama	36.218.607.079
		Kota Sorong	56.352.581.400
35.	Provinsi Papua Selatan		-
		Kab. Asmat	9.463.206.000
		Kab. Merauke	4.638.610.000
36.	Provinsi Papua Barat Daya		-
		Kab. Raja Ampat	8.291.106.000
		Kab. Tambrauw	3.449.415.000
		Kab. Sorong (Sesudah Pemekaran)	7.615.183.000
37.	Provinsi Papua Pegunungan		-
		Kab. Jayawijaya	3.177.723.000
		Kab. Yahukimo	10.134.737.000

Tabel 48. Total Penerimaan DAK T.A. 2020-2024 di Setiap Lokpri

Dari 5 tahun pelaksanaan, terdapat beberapa catatan penting terus terjadi di banyak daerah pengusul DAK selama bertahun-tahun. Permasalahan ini terjadi pada 3 fase pelaksanaan DAK, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pasca:

1. Perencanaan

- Dokumen perencanaan (utamanya *masterplan* dan DED) dengan kualitas rendah
- Konflik antara DED dan masterplan
- Kurang komprehensif atau bahkan tidak tersedianya peraturan daerah untuk kepariwisataan
- Kurang mengakomodir kearifan lokal
- Tidak tersedianya lahan yang sesuai syarat
- Lokasi lahan yang masih bersifat pengembangan lahan
- Kurangnya visi dan komitmen pemanfaatan DAK
- Perencanaan kerangka waktu (*time frame*) yang terlalu pendek
- Rendahnya komitmen untuk menuntaskan masterplan

2. Pelaksanaan

- Kurangnya pelibatan APIP Pusat dan Daerah
- Ketidakpatuhan pada Jukops DAK
- Ketidakpatuhan pada masterplan dan DED yang telah diajukan, atau bahkan mengubah DED secara sepihak
- Pelaporan yang terlambat kemudian berdampak pada keterlambatan transfer ke daerah

3. Paska

- Rendahnya pelaksanaan komitmen pemanfaatan
- Pembiaran aset yang pembangunannya tidak selesai
- Kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat, sehingga masalah yang terjadi cenderung sudah tidak bisa diperbaiki secara utuh

3.4.3 Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pada tahun 2024, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur melaksanakan Rencana Aksi (Renaksi) PUG Kemenparekraf/Baparekraf, yaitu penyusunan Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan. Pedoman ini adalah perwujudan pelaksanaan amanat Pembangunan Nasional serta SDG 5, dengan tujuan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan ini juga menjadi melibatkan Kemen PPPA dan Kemendes PDTT sebagai kolaborator. Pedoman ini dapat diunduh pada tautan <https://kemenparekraf.go.id/kebijakan/pedoman-desa-wisata-ramah-perempuan>.

Diharapkan, *pentahelix* dapat saling berkolaborasi mewujudkan Desa Wisata Ramah Perempuan dengan memanfaatkan panduan yang telah dibuat ini. Sehingga upaya yang dilakukan dapat terintegrasi secara terstruktur dan sistematis, untuk kemudian dapat memberi nilai tambah dan dampak berganda (*multiplier effect*) bagi desa yang melakukan transformasi menjadi Desa Wisata Ramah Perempuan. Beberapa poin yang diutamakan dalam pedoman ini adalah:

- Memperkuat peran dan partisipasi aktif perempuan
- Meningkatkan kunjungan dengan pengalaman unik dan nyaman, khususnya pada wisatawan perempuan
- Meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) Masyarakat desa, utamanya perempuan dalam peran pada ekosistem Desa Wisata
- Pendayagunaan sumber daya lokal desa

Secara garis besar, pedoman ini memiliki 3 ruang lingkup:

1. Implementasi

Implementasi Desa Wisata Ramah Perempuan adalah pelaksanaan atau penerapan dalam upaya mewujudkan Desa Wisata Ramah Perempuan, yang mempunyai prinsip inklusif, demokratis, gotong royong, dan afirmatif. Implementasi ditandai dengan adanya aktivasi, yang berfungsi untuk mengarahkan kegiatan/aktivitas apa saja yang perlu dilaksanakan agar dapat mewujudkan suatu kondisi Desa Wisata yang ramah perempuan dapat berjalan dengan baik dan optimal. Aktivasi tersebut memiliki 7 ruang lingkup dengan aktivitasnya masing-masing:

- Kelembagaan
- Atraksi dan Fasilitas Wisata
- Sumber Daya Manusia
- Pengembangan dan Pengelolaan Usaha
- Pengelolaan Pengunjung
- Pengelolaan Risiko
- Promosi

2. Pembinaan

Pembinaan merupakan suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang melibatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan

sesuai tanggung jawab dan kewenangannya agar perencanaan dan pelaksanaan oleh Pengelola Desa Wisata Ramah Perempuan dapat sesuai dengan hasil yang diharapkan. Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan ini berfungsi sebagai perangkat (tools) dalam meningkatkan dan meninjau peran partisipatif dan pelibatan aktif perempuan, serta membuka akses dalam pembangunan Desa Wisata Ramah Perempuan sehingga bisa membantu para pengelola Desa Wisata agar mampu bertransformasi menjadi Desa Wisata Ramah Perempuan. Pembinaan ini memiliki kerangka kerja yang disusun dengan memadupadankan kriteria Desa Wisata dengan indikator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dengan berorientasi pada hasil dan cakupan, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- Masyarakat Sadar Wisata
- Kunjungan Wisatawan
- Sarana dan Prasarana (Fasilitas Pariwisata)
- Lapangan Kerja
- Inovasi

3. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan dan tindak lanjut pembentukan Desa Wisata Ramah Perempuan telah berjalan sesuai dengan Pedoman. Evaluasi dilakukan untuk menghasilkan informasi dan menilai capaian dan kinerja dalam berbagai aspek kaitannya dengan pengembangan Desa Wisata Ramah Perempuan. Pemantauan ini dilakukan dengan pola pengecekan data dukung atas indikator yang ditentukan pada setiap aktivasi dan aktivitas. Indikator serta data dukung untuk setiap aktivasi dan aktivitas telah tertulis pada pedoman, namun tidak bersifat mengikat dan bisa diubah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Desa Wisata Ramah Perempuan yang dibuatkan pedomannya ini adalah konsep yang mengintegrasikan pariwisata dengan pemberdayaan perempuan sebagai upaya menciptakan lingkungan wisata yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Penyusunan pedoman ini merupakan tindak lanjut dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD)

Pengarusutamaan Gender dalam upaya merintis Desa Wisata Ramah Perempuan dan Anak pada bulan Juni 2024 dengan melibatkan K/L terkait, Pengelola Desa Wisata, Akademisi, dan Praktisi.

Untuk penyebarluasan informasi, sosialisasi sekaligus peluncuran pedoman dilaksanakan pada rangkaian acara visitasi ADWI di Desa Wisata Les, Kabupaten Buleleng, Bali tanggal 31 Agustus 2024. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta perwakilan dari Kementerian Desa dan PDTT hadir pada sosialisasi dan peluncuran tersebut, sebagai representasi dari 3 K/L yang berkomitmen untuk pembangunan Desa Wisata Ramah Perempuan.

Dalam tagging anggaran, beberapa program yang dijalankan untuk mencapai IKSP tahun 2024 juga berpengaruh dalam capaian Pengarusutamaan Gender. Program tersebut memiliki potensi yang besar untuk mendukung pengarusutamaan gender dalam pengembangan destinasi pariwisata. Dengan melibatkan perempuan dalam setiap tahap perencanaan, pengelolaan, dan peningkatan kapasitas SDM, program-program ini dapat menciptakan peluang setara dalam sektor pariwisata, mengurangi kesenjangan gender, dan memberdayakan perempuan di tingkat lokal. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi perempuan itu sendiri, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi pariwisata secara keseluruhan. Berikut adalah rincian kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata (Tingkat Mikro)

Dalam penyusunan dokumen perencanaan, penting untuk memperhatikan partisipasi dan kontribusi perempuan dalam pengembangan daya tarik wisata. Program ini dapat memasukkan perspektif gender dengan memastikan bahwa perempuan, terutama di komunitas lokal, dilibatkan dalam proses perencanaan. Perempuan sering kali memiliki pengetahuan tradisional yang penting terkait dengan budaya lokal, potensi alam, dan kegiatan wisata yang relevan. Pengarusutamaan gender dalam tahap perencanaan ini dapat memastikan bahwa daya tarik wisata yang dikembangkan tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga menciptakan peluang bagi perempuan untuk berperan dalam

ekonomi pariwisata, baik sebagai pelaku usaha, pemandu wisata, atau dalam pengelolaan atraksi berbasis budaya.

2. Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Program penguatan jejaring tata kelola destinasi pariwisata menciptakan peluang untuk melibatkan perempuan dalam berbagai tingkatan manajerial dan pengelolaan destinasi. Dalam jejaring ini, penting untuk memperkenalkan dan menegakkan prinsip kesetaraan gender, baik dalam pengambilan keputusan, perencanaan, maupun pelaksanaan kebijakan destinasi. Melalui penguatan jejaring ini, perempuan dapat diberdayakan untuk mengambil peran kepemimpinan dalam mengelola destinasi pariwisata, yang sering kali didominasi oleh laki-laki. Dengan meningkatkan kapasitas perempuan di level pengelolaan destinasi, program ini berkontribusi dalam menciptakan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata.

3. Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM

Bimbingan teknis (bimtek) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengarusutamakan gender dengan memberikan pelatihan yang lebih inklusif. Program bimtek ini dapat dirancang untuk secara khusus meningkatkan keterampilan perempuan dalam bidang pariwisata, baik dalam aspek manajerial, pemasaran, maupun pengelolaan destinasi. Selain itu, program pelatihan ini dapat menekankan pentingnya kesetaraan dalam sektor pariwisata, mendorong perempuan untuk mengambil peran yang lebih signifikan dalam pengelolaan destinasi wisata. Dengan memberikan perempuan keterampilan yang relevan, program ini tidak hanya meningkatkan kapasitas mereka di bidang pariwisata tetapi juga memberdayakan mereka secara ekonomi.

4. Kelana Nusantara

Merupakan salah satu bentuk kegiatan aktivasi dari program strategi pengembangan Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif) Indonesia, sebagai wadah serap aspirasi dalam bentuk forum diskusi untuk berbagi gagasan dari pelaku usaha ekraf berskala kecil menengah untuk membuka kesempatan kerja dan peluang usaha yang lebih luas. Kegiatan ini dilaksanakan di 10 Kabupaten/Kota:

- Kabupaten Badung

- Kota Jambi
- Kota Banda Aceh
- Kota Surakarta
- Kabupaten Padang Pariaman
- Kota Balikpapan
- Kabupaten Tabanan
- Kota Palembang
- Kota Banda Aceh
- Kabupaten Bandung Barat

5. Forum Diskusi Pelaku Ekonomi Kreatif

Dilaksanakan dalam bentuk diskusi kelompok terpumpun dengan menghadirkan tokoh yang dapat memberikan inspirasi dan ide kreatif dalam pengembangan usaha. Pada tahun 2024, forum diskusi ini telah dilaksanakan di 3 Kota; Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Tabanan.

6. Pendampingan Pengelolaan Sampah di Destinasi Wisata

Pendampingan pengelolaan sampah di destinasi wisata merupakan salah satu tantangan besar yang memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh pihak, termasuk perempuan. Sebagai bagian dari upaya pengarusutamaan gender, perempuan memiliki peranan dalam menciptakan suasana lingkungan yang bersih dan asri di destinasi wisata. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan memberdayakan perempuan dalam pengelolaan sampah sehingga dapat memberikan perubahan positif bagi kebersihan destinasi wisata. Selain itu, program tersebut diharapkan dapat mendorong dan memperkuat peran perempuan dalam memimpin komunitas sadar lingkungan sehingga masyarakat dan wisatawan dapat teredukasi dengan baik serta bertanggung jawab terhadap lingkungan disekitarnya.

7. Bimtek Pemetaan Potensi Wisata

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi serta menguatkan kualitas jejaring antar stakeholder di destinasi pariwisata agar terbentuk ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, dan pengeluaran wisatawan. Dalam program tersebut, diperlukan peran perempuan untuk melakukan kolaborasi dan pengambilan keputusan dalam menentukan potensi dan tantangan yang ada di

destinasi wisata. Kontribusi yang dilakukan oleh kaum perempuan terhadap program ini menjadi salah satu bentuk kesetaraan gender di industri pariwisata. Pengembangan destinasi wisata yang baik dapat terwujud dari keterlibatan seluruh pihak, terutama perempuan untuk mempertimbangkan faktor gender dalam mengidentifikasi potensi wisata sehingga tercipta lingkungan pariwisata yang lebih ramah, nyaman, aman, dan adil bagi perempuan dalam berwisata.

8. Bimtek Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dilaksanakan dengan mengikutsertakan perempuan dalam mengidentifikasi strategi peningkatan kualitas produk wisata, meningkatkan kualitas tata kelola destinasi wisata, penguatan segmentasi pasar daya tarik wisata, dan penguatan kualitas jejaring antar pelaku wisata. Bimtek ini sebagai wadah untuk mengembangkan keterampilan diri seorang perempuan dalam mengelola destinasi wisata dengan baik dan tepat. Keterlibatan perempuan dapat memberikan pandangan yang lebih luas mengenai tata kelola destinasi yang berkelanjutan, inklusif, serta responsif terhadap kebutuhan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal, wisatawan, dan pelaku industri pariwisata.

3.4.4 Program Pemberdayaan Ekonomi dalam Rangka Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur terus memberikan dampak pada tujuan 8, 10, 11 dan 12 SDG. Di tahun 2024, sejalan dengan pelaksanaan PUG, maka Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur juga turut memberikan dampak pada tujuan 5 SDG.

Berikut adalah kontribusi program di Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur tahun 2024 terhadap Rencana Aksi Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata (Tingkat Mikro)

Penyusunan dokumen perencanaan yang melibatkan komunitas lokal dalam pengembangan daya tarik wisata dapat memberikan akses ekonomi kepada masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan.

Program ini bertujuan untuk menggali potensi wisata lokal dan menciptakan daya tarik yang dapat meningkatkan jumlah pengunjung. Dengan meningkatkan jumlah wisatawan, daerah yang sebelumnya kurang berkembang dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Dalam konteks pengurangan kemiskinan ekstrim, program ini membantu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang terlibat langsung dalam sektor pariwisata, seperti melalui usaha *homestay*, kuliner lokal, dan kerajinan tangan.

2. Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Penguatan jejaring tata kelola destinasi pariwisata menciptakan peluang bagi masyarakat lokal untuk mengakses pasar yang lebih luas dan memperoleh pendapatan dari sektor pariwisata. Melalui kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, program ini membantu meningkatkan kapasitas lokal dalam mengelola dan memanfaatkan potensi pariwisata. Dalam upaya pengurangan kemiskinan ekstrim, program ini mendukung akses yang lebih besar ke pasar dan peluang usaha di sektor pariwisata bagi masyarakat di daerah yang sebelumnya terisolasi atau terpinggirkan. Dengan meningkatkan kapasitas pengelolaan destinasi, program ini mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif, yang secara langsung membantu mengurangi kemiskinan ekstrim.

3. Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM

Bimbingan teknis (bimtek) dalam peningkatan kapasitas SDM berperan penting dalam mengurangi kemiskinan ekstrim dengan meningkatkan keterampilan masyarakat lokal, terutama di daerah yang paling membutuhkan. Program bimtek ini tidak hanya berfokus pada pelatihan keterampilan manajerial, tetapi juga pada keterampilan teknis yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat lokal di sektor pariwisata. Dengan keterampilan yang lebih baik, masyarakat miskin di daerah terpinggirkan memiliki peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan pendapatan mereka, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan luar. Pelatihan ini memberi mereka alat untuk keluar dari kemiskinan dengan cara yang berkelanjutan dan memberdayakan.

4. *Workshop* Peningkatan Inovasi dan Kewirausahaan

Program ini merupakan tindak lanjut dari Kabupaten/Kota Kreatif yang Dikembangkan sebagai bentuk penguatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Program ini dilaksanakan di 27 Kabupaten/Kota selama tahun 2024 dengan rincian:

- Kota Singkawang
- Kabupaten Gorontalo
- Kota Cimahi
- Kabupaten Lombok Barat
- Kabupaten Badung
- Kabupaten Tabanan
- Kota Kediri
- Kabupaten Tapanuli Utara
- Kabupaten Wonosobo
- Kabupaten Purbalingga
- Kota Yogyakarta
- Kabupaten Malang
- Kota Tanjungpinang
- Kota Cirebon
- Kep. Seribu
- Kabupaten Buleleng
- Kabupaten Bangli
- Kabupaten Minahasa Utara
- Kabupaten Tangerang
- Kabupaten Banyuwangi
- Kabupaten Bangka
- Kota Adm. Jakarta Selatan
- Kota Semarang
- Kota Bitung
- Kabupaten Bekasi
- Kabupaten Kuningan
- Kabupaten Merauke

5. Bimtek Peningkatan Kualitas Destinasi Pariwisata

Bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kualitas destinasi pariwisata mampu membawa dampak yang positif bagi *stakeholder* terkait dalam meningkatkan pemahaman arah kebijakan dan strategi pengembangan destinasi wisata, termasuk memperhatikan kawasan masyarakat yang kurang terjangkau. Pada program ini, *stakeholder* dapat berperan aktif dalam memberikan sosialisasi dan pelatihan keterampilan khusus kepada masyarakat lokal guna meningkatkan kualitas destinasi pariwisata, sehingga industri pariwisata dapat menjadi penggerak kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Hal tersebut sebagai upaya dalam menekan kemiskinan ekstrim terhadap masyarakat yang berada di sekitar destinasi wisata.

6. Bimtek Pengelolaan Destinasi dan Inovasi

Bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan destinasi dan inovasi merupakan salah satu program yang dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu pengentasan kemiskinan ekstrim yang terjadi pada masyarakat lokal. Melalui kegiatan ini, pengelola dapat memetakan potensi, tantangan, serta menyusun rencana aksi

pengembangan destinasi wisata. Dalam program ini, dibutuhkan pula inovasi terbaru yang dapat melibatkan masyarakat lokal dalam memulihkan perekonomian. Inovasi tersebut dapat mendatangkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Bimtek ini mampu memperkuat sinergi antara stakeholder dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

3.4.5 Sustainable Development Goals (SDGs)

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur terus memberikan dampak pada tujuan 8, 10, 11 dan 12 SDG. Di tahun 2024, sejalan dengan pelaksanaan PUG, maka Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur juga turut memberikan dampak pada tujuan 5 SDG. Berikut adalah detail kinerja Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur terhadap SDG yang sesuai dengan *tagging* aplikasi persi:

1. Tujuan 5 – Kesetaraan gender

No.	Program	Penjelasan
1.	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Program ini meningkatkan peran perempuan dalam pengelolaan destinasi wisata melalui kolaborasi antar <i>stakeholder</i> dan pelatihan keterampilan, memberikan mereka kesempatan untuk terlibat dalam manajemen destinasi dan ekonomi lokal.
2.	Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM	Memberikan pelatihan khusus bagi perempuan dalam sektor pariwisata, mendorong mereka untuk mengambil peran kepemimpinan dan pengelolaan destinasi secara lebih inklusif.
3.	Pendampingan Pengelolaan Sampah di Destinasi Wisata	Perempuan memiliki peranan penting dalam pengelolaan sampah di destinasi wisata melalui pelatihan keterampilan dan kepemimpinan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berdaya saing.
4.	Pendampingan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI)	Memberikan pendampingan terhadap perempuan dalam mendorong keterlibatan aktif untuk mengembangkan desa wisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
5.	Penyusunan Capaian Tata Kelola Destinasi melalui <i>Quality Tourism</i>	Program ini mengajak partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait capaian tata kelola destinasi dengan penerapan <i>quality tourism</i> yang menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing pariwisata.
6.	Bimbingan Teknis <i>Workshop</i> Tugas Pembantuan Sisparnas	Pada program ini perempuan dapat berperan dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi wisata guna

		memperkuat sektor pariwisata melalui penyediaan data yang mendukung kemajuan destinasi wisata.
7.	Workshop Evaluasi dan Implementasi Protokol Keamanan dan Keselamatan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas	Perempuan dapat berperan aktif dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi protokol keamanan dan keselamatan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas sehingga menciptakan lingkungan wisata yang lebih inklusif, ramah, dan aman bagi seluruh wisatawan.

Tabel 49. Daftar Kegiatan Pada Tujuan 5 SDG's di Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024

2. Tujuan 8 – Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

No.	Program	Penjelasan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata (Tingkat Mikro)	Perencanaan yang matang untuk pengembangan daya tarik wisata berbasis komunitas menciptakan peluang pekerjaan lokal yang layak, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah melalui peningkatan sektor pariwisata.
2.	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Program ini membangun kapasitas manajerial di tingkat lokal, menciptakan peluang kerja di sektor pariwisata dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah.
3.	SDM Pengelola Destinasi Pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya - Bimbingan Teknis Pengelolaan Destinasi	Memberikan pemahaman terkait tata Kelola destinasi wisata dan meningkatkan keterampilan masyarakat lokal dalam manajemen destinasi, sehingga menciptakan pekerjaan yang lebih layak dan meningkatkan kualitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara keseluruhan.
4.	Pendampingan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI)	Program ini memberikan pendampingan serta pelatihan khusus terhadap pengelolaan desa wisata sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
5.	Penyusunan Capaian Tata Kelola Destinasi melalui <i>Quality Tourism</i>	Perencanaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan produk pariwisata yang bernilai tinggi sehingga memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat lokal dan menumbuhkan perekonomian di sekitar kawasan destinasi wisata.
6.	Bimbingan Teknis <i>Workshop</i> Tugas Pembantuan Sisparnas	Memberikan kesadaran dan pemahaman mengenai Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional (Sisparnas) kepada masyarakat lokal sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan sebagai upaya dalam mendukung pelayanan bagi pelaku pariwisata dan pemerintah daerah.
7.	Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan	Meningkatkan kesadaran masyarakat lokal terhadap keberlanjutan lingkungan desa wisata dan mendorong terciptanya usaha pariwisata yang ramah lingkungan sehingga tidak hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan perekonomian daerah.
8.	Pendukung Pembangunan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas	Destinasi Pariwisata Super Prioritas memiliki peran dalam mendorong perekonomian nasional. Pembangunan ini tidak hanya sekadar meningkatkan daya tarik wisata tetapi juga membuka peluang pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat lokal.

Tabel 50. Daftar Kegiatan Pada Tujuan 8 SDG's di Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024

3. Tujuan 10 – Berkurangnya kesenjangan

No.	Program	Penjelasan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata (Tingkat Mikro)	Program ini mendukung pengelolaan destinasi yang merata dengan memperhatikan potensi lokal, memberi peluang ekonomi kepada daerah yang sebelumnya kurang berkembang melalui pengembangan daya tarik wisata yang berbasis pada kearifan lokal.
2.	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Program ini memperkuat kolaborasi antar daerah dan sektor pariwisata, membantu mengurangi kesenjangan dalam pengelolaan destinasi antara pusat dan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan di wilayah yang lebih terpencil.
3.	SDM Pengelola Destinasi Pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya - Bimbingan Teknis Pengelolaan Destinasi	Peningkatan kapasitas SDM dalam manajemen destinasi mendukung pengelolaan yang lebih berkelanjutan (<i>sustainable tourism</i>), dengan menekankan pentingnya tata kelola yang berkelanjutan dan ramah lingkungan serta berfokus pada keberlanjutan sosial dan ekonomi.
4.	Pendampingan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI)	Program ini dilaksanakan sebagai upaya dalam mengurangi kesenjangan serta melakukan pendampingan kepada masyarakat lokal agar mampu menggerakkan perekonomian daerah dan menciptakan peluang kerja yang berkelanjutan.
5.	Penyusunan Capaian Tata Kelola Destinasi melalui <i>Quality Tourism</i>	Menyusun langkah strategis untuk memenuhi capaian tata kelola destinasi melalui prinsip <i>quality tourism</i> sehingga dapat memastikan keseimbangan antara pertumbuhan industri pariwisata dan kesejahteraan masyarakat lokal.
6.	Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan	Program ini dilakukan untuk memastikan bahwa desa wisata dikelola dengan prinsip keberlanjutan, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Melalui sertifikasi tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, sehingga dapat berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial.
7.	Pendukung Pembangunan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas	Memberikan dukungan pembangunan di DPSP yang mencakup berbagai aspek, baik dari penyediaan aksesibilitas yang lebih baik, pengembangan fasilitas umum, hingga pemberdayaan masyarakat lokal dalam ekosistem pariwisata. Pembangunan infrastruktur yang memadai dapat mendorong manfaat ekonomi yang lebih merata.
8.	<i>Workshop</i> Evaluasi dan Implementasi Protokol Keamanan dan Keselamatan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas	Dalam rangka memastikan standar keamanan yang optimal, <i>Workshop Evaluasi dan Implementasi Protokol Keamanan dan Keselamatan</i> di DPSP menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi risiko, serta perlindungan bagi wisatawan dan masyarakat lokal sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari kesenjangan sosial dan ekonomi.

Tabel 51. Daftar Kegiatan Pada Tujuan 10 SDG's di Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024

4. Tujuan 11 – Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan

No.	Program	Penjelasan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata (Tingkat Mikro)	Mengembangkan destinasi yang berkelanjutan dengan perencanaan yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, serta meningkatkan daya tarik wisata yang tidak hanya menguntungkan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem.
2.	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Pengelolaan destinasi yang berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak dalam menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan bahwa destinasi berkembang tanpa merusak lingkungan atau kualitas hidup masyarakat lokal.
3.	Dokumen Perencanaan (Desain Strategis Rencana Aksi Pengembangan Desa Wisata Terpadu	Mengembangkan destinasi dengan rencana aksi berupa tahapan dan Langkah-langkah strategis dalam memadukan pengembangan dan pengelolaan desa wisata sesuai dengan karakteristik dan tingkat perkembangan desa wisata
4.	Pendampingan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI)	Memberikan pendampingan dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata melalui langkah strategis yang dapat menciptakan lingkungan yang berkelanjutan bagi seluruh aspek kehidupan.
5.	Penyusunan Capaian Tata Kelola Destinasi melalui <i>Quality Tourism</i>	Merencanakan penyusunan capaian tata kelola destinasi berdasarkan <i>quality tourism</i> untuk menciptakan pengalaman berkualitas bagi wisatawan dan menjaga keberlanjutan sektor pariwisata.
6.	Bimbingan Teknis <i>Workshop</i> Tugas Pembantuan Sisparnas	Mengembangkan Sisparnas yang berguna untuk mendukung pelayanan pariwisata tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan serta memudahkan masyarakat lokal dalam memberikan panduan mengenai potensi wisata.
7.	Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan	Menjamin pengelolaan desa wisata berbasis prinsip keberlanjutan serta meningkatkan kesadaran semua pihak dalam mewujudkan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
8.	Audit <i>Surveillance</i> Desa Wisata Berkelanjutan	Memastikan desa wisata memenuhi kriteria dari prinsip pariwisata berkelanjutan serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.
9.	Pendukung Pembangunan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas	Memberikan dukungan pembangunan yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.
10.	Pendukung Sarana Pariwisata	Penyediaan sarana pariwisata dapat menciptakan lingkungan yang nyaman bagi wisatawan serta mendukung upaya pelestarian alam untuk keberlanjutan jangka panjang.
11.	Penyediaan Sistem Informasi Prakiraan Cuaca Berbasis Dampak (<i>Impact Based Forecast</i>) di Sektor Pariwisata	Memfasilitasi destinasi wisata melalui Sistem Informasi Prakiraan Cuaca Berbasis Dampak (<i>Impact Based Forecast</i>) guna mengurangi risiko bencana yang dapat menghambat sektor pariwisata, sekaligus mendukung keberlanjutan industri pariwisata dengan perencanaan mitigasi yang lebih baik.
12.	<i>Workshop</i> Evaluasi dan Implementasi Protokol Keamanan dan Keselamatan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas	Memberikan pemahaman dan pendampingan mengenai evaluasi dan implementasi protokol keamanan dan keselamatan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan.

Tabel 52. Daftar Kegiatan Pada Tujuan 11 SDG's di Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024

5. Tujuan 12 – Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab

No.	Program	Penjelasan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata (Tingkat Mikro)	Perencanaan pengembangan daya tarik wisata berbasis pada prinsip ekowisata, yang mendukung konsumsi dan produksi lokal yang lebih bertanggung jawab, serta mengurangi ketergantungan pada barang-barang impor.
2.	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Program ini mempromosikan prinsip keberlanjutan dalam tata kelola destinasi, mendorong pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan.
3.	SDM Pengelola Destinasi Pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya - Bimbingan Teknis Pengelolaan Destinasi	Pelatihan yang diberikan kepada masyarakat lokal untuk mengelola destinasi wisata secara berkelanjutan dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, mendukung tujuan untuk produksi dan konsumsi yang lebih bertanggung jawab.
4.	Pendampingan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI)	Program pendampingan kepada masyarakat lokal dalam mengelola desa wisata dengan memanfaatkan kekayaan alam, budaya, dan sosial sebagai upaya untuk memfilter pengaruh negatif dari lingkungan luar.
5.	Penyusunan Capaian Tata Kelola Destinasi melalui <i>Quality Tourism</i>	Perencanaan tata kelola destinasi melalui <i>quality tourism</i> dengan mendorong produksi dan konsumsi lokal sebagai ciri khas destinasi sehingga menciptakan pengalaman yang berkualitas bagi wisatawan.
6.	Audit <i>Surveillance</i> Desa Wisata Berkelanjutan	<i>Monitoring</i> dan evaluasi terkait kualitas desa wisata dengan mengutamakan prinsip berkelanjutan dan mendorong pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab.

Tabel 53. Daftar Kegiatan Pada Tujuan 12 SDG's di Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024

3.5. Evaluasi Internal

Dalam memenuhi target dari Sasaran Program yang telah ditetapkan, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur juga melaksanakan pemantauan dan evaluasi internal demi terciptanya perbaikan di masa mendatang. Berikut adalah beberapa catatan evaluasi yang kami rangkum berdasarkan pelaksanaan di tahun 2024:

1. Penyusunan perencanaan kinerja perlu dilakukan secara lebih cermat dan akurat, utamanya terkait aturan yang berlaku. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan nantinya akan mengalami lebih sedikit kendala administratif.
2. Penguatan pemantauan dan evaluasi berkala sebelum eskalasi masalah terjadi. Hal tersebut juga harus diikuti dengan rencana kendali agar masalah tersebut dapat diselesaikan sedini mungkin.
3. Perlu peningkatan kolaborasi, koordinasi, dan kerja sama dengan seluruh unit kerja di Kemenparekraf/Baparekraf yang terkait, serta K/L lain atau mitra strategis lain untuk melakukan optimalisasi potensi dan pemulihan pasca pandemi.
4. Perlu menciptakan inovasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang efisien, efektif serta berdampak luas bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2024, mengacu pada Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2024, dengan capaian kinerja berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja, sebagai berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi	Persentase Realisasi
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Rasio Pemenuhan Infrastruktur Ekraf terhadap Kebutuhan Infrastruktur Ekraf	100%	117%
2.	Tersedianya Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas yang Dikembangkan	Jumlah Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas yang Dikembangkan	19 Destinasi	100%
3.	Tersedianya Destinasi Pariwisata yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan	19 Destinasi	100 %
4.	Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara di Destinasi	Lama Tinggal (<i>Length of Stay</i>) Wisman di Destinasi	2,17 Hari	72,4 %
5.	Meningkatnya Kepuasan Satker Terhadap Layanan Internal Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	Tingkat Kepuasan Satker Terhadap Layanan Internal Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	3,54 (Skala Likert)	101%

Tabel 54. Realisasi Capaian Kinerja Berdasarkan PK Tahun 2024

Sementara total realisasi anggaran Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur pada Tahun Anggaran 2024 adalah Rp 186.181.135.434,- atau sebesar 99,65%. Dari total pagu anggaran senilai Rp 240.968.000.000 yang tersedia, terdapat Rp 54.126.506.000 atau sekitar 28% yang tidak bisa digunakan untuk memenuhi sasaran program yang telah ditargetkan untuk tahun 2024.

4.2 Rekomendasi/Langkah-Langkah Perbaikan

Beberapa langkah penting sebagai bahan pertimbangan untuk mempertahankan kinerja tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan anggaran, sehingga pencapaian target kinerja program dan anggaran dapat tetap efektif dan tepat sasaran;
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar unit organisasi internal di lingkungan Kementerian Pariwisata, serta unsur *pentahelix* lainnya seperti Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, komunitas dan pihak-pihak lain yang berperan dalam sektor pariwisata;
3. Meningkatkan implementasi sistem *monitoring* dan evaluasi terpadu untuk hasil *monitoring* dan evaluasi yang lebih efektif dan efisien;
4. Terus menciptakan inovasi dalam pengembangan destinasi pariwisata untuk mendukung perbaikan kinerja di masa mendatang.



LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja (PK) Awal Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hariyanto

Jabatan : Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Sandiaga Salahuddin Uno

Jabatan : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,

Sandiaga Salahuddin Uno

Pihak Pertama,

Hariyanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif	1. Rasio Pemenuhan Infrastruktur Ekraf terhadap Kebutuhan Infrastruktur Ekraf	85%
2.	Tersedianya Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas yang Dikembangkan	2. Jumlah Destinasi Pariwisata Berdasarkan Prioritas yang Dikembangkan	19 Destinasi
3.	Tersedianya Destinasi Pariwisata yang menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan	3. Jumlah Destinasi Pariwisata yang menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan	19 Destinasi
4.	Meningkatnya lama tinggal wisatawan mancanegara di Destinasi	4. Lama tinggal (length of stay) wisatawan di Destinasi	3-5 Hari
5.	Meningkatnya Kepuasan Sakder Terhadap Layanan Internal Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	5. Tingkat Kepuasan Sakder Terhadap Layanan Internal Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	3,5 (Skala Likert)

Kegiatan		Anggaran
1. Pengembangan Tata Kelola Destinasi	Rp	79.900.000.000
2. Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Rp	84.300.000.000
3. Pengembangan Destinasi I	Rp	24.250.000.000
4. Pengembangan Destinasi II	Rp	24.000.000.000
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	Rp	24.018.000.000
Total		Rp 236.468.000.000
6. Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (Tugas Pembantuan)	Rp	17.100.000.000
7. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Tugas Pembantuan)	Rp	14.000.000.000
Total		Rp 267.568.000.000

Jakarta, Januari 2024

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif,

Sandiaga Salahuddin Uno

Deputy Bidang Pengembangan
Destinasi dan Infrastruktur

Hariyanto